

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2005 - 2025**

***KABUPATEN SUMEDANG
SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS
PADA TAHUN 2025
(SUMEDANG SEHATI)***



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2008**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 2 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sumedang memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 1, Seri D.1).
16. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 65, Seri D. 42).
17. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008.
18. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang.

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006, Seri D).
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007, Seri E.).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2005-2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan.
6. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten yang mengatur struktur dan pola tata ruang Kabupaten Sumedang.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat Kabupaten Sumedang.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Sumedang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJPD memuat visi, misi, arah dan tahapan prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD memuat kebijakan keuangan daerah, program pembangunan daerah dijabarkan melalui rencana kerja SKPD yang bersifat indikatif.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJPD diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan prinsip-prinsip kebersamaan.
- (2) RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

Tujuan RPJPD adalah :

- a. Menetapkan visi, misi, arah dan tahapan prioritas pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun mendatang sebagai pedoman penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 4

- (1) RPJPD mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu di wilayah Kabupaten Sumedang.

- (2) RPJPD terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) RPJPD merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Sumedang yang memuat visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah untuk periode 20 tahun kedepan sejak tahun 2005 sampai dengan 2025 berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dijabarkan lebih lanjut kedalam RPJMD untuk 4 tahapan periode perencanaan pembangunan.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Tahapan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini meliputi 4 tahapan periode yaitu :
 1. RPJMD ke-1, (Tahun 2005-2008)
 2. RPJMD ke-2, (Tahun 2009-2013)
 3. RPJMD ke-3, (Tahun 2014-2018)
 4. RPJMD ke-4, (Tahun 2019-2025)

Pasal 6

- (1) Sistematisan RPJPD adalah sebagai berikut :
 - Bab I. Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Landasan Hukum
 - 1.4. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lain
 - 1.5. Sistematika Penulisan
 - 1.6. Mekanisme Penyusunan
 - Bab II. Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah
 - 2.1. Kondisi dan Analisis Kondisi Umum Daerah
 - 2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah
 - 2.3. Modal Dasar
 - Bab III. Visi dan Misi
 - 3.1. Visi Daerah
 - 3.2. Misi Daerah
 - Bab IV. Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - 4.1. Arah Pembangunan Daerah
 - 4.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - Bab V. Penutup
- (2) Isi beserta uraian RPJPD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD lainnya dengan mempertimbangkan aspirasi berbagai stakeholders daerah.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJPD dan RPJMD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Rencana Strategis Daerah.
- (2) Dokumen Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya mengenai perencanaan pembangunan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan RPJPD tetap berlaku sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode jabatan Kepala Daerah berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Februari 2008



Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Februari 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2008 NOMOR 2.

KATA PENGANTAR

Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat bersama 19 Kabupaten lainnya yaitu Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Banten, Pandeglang, Lebak, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka sebagaimana tertuang dalam Bab 1, Pasal 1 dan Pasal 3.

Secara administrasi Kabupaten Sumedang terletak pada posisi $60^{\circ}40'$ - $70^{\circ}83'$ Lintang Selatan dan $107^{\circ}44'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 152.220 ha terdiri dari 26 kecamatan dengan 270 desa dan 7 kelurahan yang berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang di sebelah Utara, dengan Kabupaten Majalengka di sebelah Timur, dengan Kabupaten Garut sebelah selatan dan Kabupaten Bandung di sebelah Barat.

Kondisi administrasi geografis yang berbukit memberikan sumberdaya kekayaan alam menjadi potensi pembangunan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan dan kemakmuran masyarakat ditunjang jumlah penduduk yang relative banyak dengan modal rohaniah, mental serta keanekaragaman budaya lokal yang menjadi penggerak dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana daerah lainnya, sejak pendirian Kabupaten Sumedang derap pembangunan daerah telah memperlihatkan dinamika yang terus menyesuaikan dengan perubahan kondisi, potensi serta kebutuhan masyarakat daerah yang tidak terlepas dari perkembangan politik era reformasi dan otonomi daerah telah memberikan perubahan yang mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan utama dari pembangunan daerah tidak terlepas dan menjadi bagian integral dari tujuan utama pembangunan nasional, sebagaimana terkandung dalam tujuan penyelenggaraan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berisikan pada kehendak nasional untuk melindungi warga masyarakatnya serta mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Perwujudan tujuan pembangunan daerah terus diupayakan secara berkesinambungan oleh para penyelenggara pemerintahan, walaupun perubahan regulasi serta paradigma pembangunan daerah senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan penyesuaian kebutuhan yang dikehendaki masyarakat.

Sejalan dengan perubahan konstitusi dan paradigma yang ada, penyelenggaraan pembangunan daerah mengalami perubahan sejak era reformasi bergulir, dimana kebutuhan menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah, tidak lagi bertumpu pada penetapan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat MPR dalam memandu perencanaan

pembangunan kurun 5 tahunan, melainkan diletakkan pada pendekatan politis yang terkait dengan proses pemilihan kepemimpinan nasional hingga daerah. Melalui penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang digariskan melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang saling berkorelasi secara berkesinambungan antar tingkatan pemerintahan untuk kurun yang lebih panjang, telah meletakkan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan daerah, harus semakin memiliki relevansi, baik dalam fokus maupun pola penanganannya, dengan tetap memberikan ruang kekhasan dan kapasitas potensi daerah dalam meletakkan urgensi penanganan permasalahan yang dihadapi. Sebagai upaya pencapaian fokus tujuan pembangunan untuk kurun 20 tahun mendatang membutuhkan penataan kembali dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya, sehingga penyelenggaraan pembangunan daerah akan menghasilkan sebuah capaian kemakmuran bagi masyarakat daerah, yang turut berkontribusi pada capaian pembangunan nasional yang dikehendaki dalam konstitusi Undang Undang Dasar 1945.

Berangkat dari pemaknaan keterkaitan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah serta relevan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/sj/2005 tentang petunjuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota wajib menyusun dokumen RPJPD dan RPJMD. Maka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, merupakan dokumen perencanaan yang tersusun atas sebuah fokus kebutuhan dalam memberi arah tujuan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kabupaten Sumedang yang sesuai urgensi permasalahan daerah dengan tetap menjalin keterkaitannya dengan komitmen pembangunan nasional yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini tidak terlepas dari tujuan RPJPD yang mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, arah, tahapan prioritas pembangunan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga seluruh upaya yang

dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat koordinatif, integratif, sinergis dan berkelanjutan. Juga sebagai pedoman penyusunan RPJMD dan penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Berkenaan dengan itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 disusun melalui pendekatan teknokratis, demokratis dan partisipatif, politis, top down dan bottom up planning pada setiap tahapan yang terdiri dari penyusunan rancangan RPJPD, penyelenggaraan musyawarah pembangunan (Musrenbang) RPJPD dan penetapan dalam peraturan daerah. Pada setiap tahapan dilakukan diskusi dan konsultasi publik serta penjangkaran aspirasi dan sosialisasi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya dengan melibatkan berbagai stakeholders kunci antara lain Bappenas dan Depdagri, Bapeda Provinsi Jawa Barat, Akademisi seperti Unsap, Unpad, Ikopin, Unwim, IPDN dan ITB, Praktisi, DPRD Kabupaten Sumedang, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kecamatan, Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), organisasi masyarakat dan pers serta tokoh masyarakat. Pada tahapan penetapan dalam peraturan daerah dilakukan pembahasan intensif dan menyeluruh yang difasilitasi oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumedang melalui konsultasi dan koordinasi dengan Bappenas, Depdagri dan Bapeda Provinsi Jawa Barat serta studi komparatif ke Kabupaten Grobogan Jawa Tengah dan kunjungan lapangan ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Dengan selesainya RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif baik langsung maupun tidak langsung demi kemajuan Kabupaten Sumedang.

Akhirnya harapan kami semoga semua pihak penyelenggara pemerintahan daerah, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Sumedang dapat menggunakan dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 sebagai dasar dalam melakukan aktifitas di segala bidang pembangunan.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lain	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
1.6. Mekanisme Penyusunan	6
BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH	
2.1. Kondisi dan Analisis Kondisi Umum Daerah	7
2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup	7
2.1.2. Demografi	17
2.1.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam	18
2.1.4. Sosial Budaya dan Politik	27
2.1.5. Pemerintahan	34
2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah	36
2.2.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup	36
2.2.2. Demografi	37
2.2.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam	38
2.2.4. Sosial Budaya dan Politik	47
2.2.5. Pemerintahan	53
2.3. Modal Dasar	54
BAB III VISI DAN MISI	
3.1. Visi Daerah	55
3.2. Misi Daerah	59
BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1. Arah Pembangunan Daerah	64

4.1.1.	Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berpendidikan, Berbudaya dan Berpola Hidup Sehat	64
4.1.2.	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh dan Berkelanjutan Berbasis Pada Agribisnis, Pariwisata dan Industri	69
4.1.3.	Mewujudkan Masyarakat Daerah yang Berakhlak Mulia yang Berlandaskan Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang Makin Toleran Sesuai Dengan Falsafah Pancasila	79
4.1.4.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	80
4.1.5.	Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis Dalam Kesetaraan Gender Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia	82
4.2.	Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah	84
4.2.1.	RPJMD ke-1 (2005-2008)	85
4.2.2.	RPJMD ke-2 (2009-2013)	90
4.2.3.	RPJMD ke-3 (2014-2018)	95
4.2.4.	RPJMD ke-4 (2019-2025)	98

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat bersama 19 Kabupaten lainnya yaitu Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Banten, Pandeglang, Lebak, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka sebagaimana tertuang dalam Bab 1, Pasal 1 dan Pasal 3.

Pada mulanya Kabupaten Sumedang adalah sebuah kerajaan dibawah kekuasaan Raja Galuh yang didirikan oleh Prabu Geusan Adji Putih atas perintah Prabu Suryadewata sebelum Keraton Galuh dipindahkan ke Padjajaran Bogor. Nama Kerajaan pun mengalami beberapa perubahan, yang pertama adalah Kerajaan Tembong Agung, dipimpin Prabu Adji Putih, kemudian menjadi Kerajaan Himbar Buana dipimpin Prabu Tadjimalela dan akhirnya menjadi Kerajaan Sumedang Larang.

Secara administrasi Kabupaten Sumedang terletak pada posisi 60°40'-70°83' Lintang Selatan dan 107°44' Bujur Timur, dengan luas wilayah 152.220 ha terdiri dari 26 kecamatan dengan 270 desa dan 7 kelurahan, yang berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang di sebelah Utara, Kabupaten Majalengka di sebelah Timur dan Kabupaten Garut sebelah Selatan serta Kabupaten Bandung di sebelah Barat.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, sejak pendirian Kabupaten Sumedang derap pembangunan daerah telah memperlihatkan dinamika yang terus menyesuaikan dengan perubahan kondisi, potensi serta kebutuhan masyarakat daerah. Dalam penyelenggaraannya, tujuan utama dari pembangunan daerah tidak terlepas dan menjadi bagian integral dari tujuan utama pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam tujuan penyelenggaraan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berintikan pada kehendak nasional untuk melindungi warga masyarakatnya serta mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Perwujudan tujuan pembangunan daerah demikian terus diupayakan secara berkesinambungan oleh para penyelenggara pemerintahan, walaupun perubahan regulasi serta paradigma pembangunan daerah senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan penyesuaian kebutuhan yang dikehendaki masyarakat.

Sejalan dengan perubahan konstitusi dan paradigma yang ada, penyelenggaraan pembangunan daerah mengalami perubahan sejak era reformasi bergulir, dimana kebutuhan menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah, tidak lagi bertumpu pada penetapan

Garis Garis Besar Haluan Negara yang dibuat MPR dalam memandu perencanaan pembangunan kurun 5 tahunan, melainkan diletakkan pada pendekatan politis yang terkait dengan proses pemilihan kepemimpinan nasional hingga daerah. Melalui penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang digariskan melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Maka kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang saling berkorelasi secara berkesinambungan antar tingkatan pemerintahan untuk kurun yang lebih panjang, telah meletakkan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan daerah, harus semakin memiliki relevansi, baik dalam fokus maupun pola penanganannya, dengan tetap memberikan ruang kekhasan dan kapasitas potensi daerah dalam meletakkan urgensi penanganan permasalahan yang dihadapi daerah. Sebagai upaya pencapaian fokus tujuan pembangunan untuk kurun 20 tahun mendatang membutuhkan penataan kembali di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya, sehingga penyelenggaraan pembangunan daerah akan menghasilkan sebuah capaian kemakmuran bagi masyarakat, yang turut berkontribusi pada capaian pembangunan nasional yang dikehendaki dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Berangkat dari pemaknaan keterkaitan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah serta relevan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/sj/2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh pemerintah daerah baik Provinsi dan kabupaten/kota wajib menyusun dokumen RPJPD dan RPJMD. Berkenaan dengan itu, RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, merupakan dokumen perencanaan yang tersusun atas sebuah fokus kebutuhan dalam memberi arah tujuan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Sumedang yang sesuai urgensi permasalahan daerah dengan tetap menjalin keterkaitannya dengan komitmen pembangunan nasional yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat, termasuk Millenium Development Goals (MDG's), serta dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat koordinatif, integratif dan sinergis. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menetapkan visi, misi, arah dan tahapan prioritas pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun mendatang sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.
 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 1, Seri D.1).
 16. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 65, Seri D. 42).
 17. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008.

18. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang.
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006, Seri D).
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007, Seri E.).

1.4. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lain

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 merupakan bagian integral dan saling keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat serta dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kabupaten yang masih berlaku.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan.

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lain, sistematika penulisan dan mekanisme penyusunan.

Bab II. Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah.

Berisi penjelasan mengenai kondisi umum daerah pada saat ini dan prediksi untuk 20 tahun ke depan serta modal dasar.

Bab III. Visi dan Misi.

Berisi visi dan misi pembangunan daerah tahun 2005-2025.

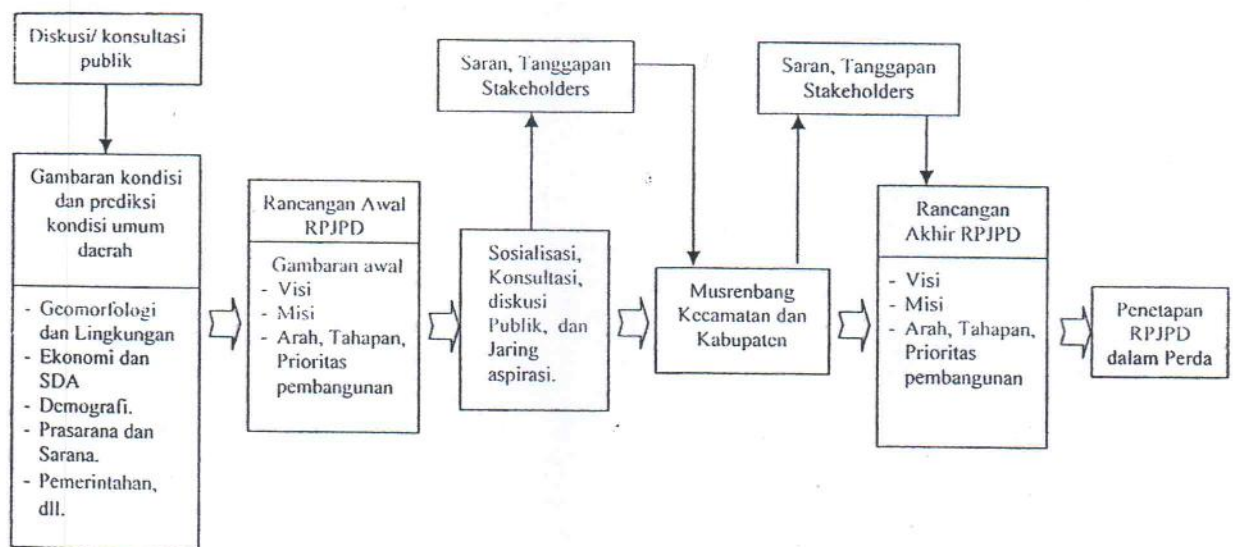
Bab IV. Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan.

Bab V. Penutup.

1.6. Mekanisme Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 disusun melalui pendekatan teknokratis, demokratis dan partipatif, politis, top down dan bottom up planning pada setiap tahapan yang terdiri dari penyusunan rancangan RPJPD, penyelenggaraan musyawarah pembangunan (musrenbang) RPJPD dan penetapan dalam peraturan daerah.

Pada setiap tahapan dilakukan diskusi dan konsultasi publik serta penjaringan aspirasi dan sosialisasi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya dengan melibatkan berbagai stakeholders kunci antara lain Pemerintah Pusat (Bappenas dan Departemen Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bapeda), Akademisi seperti Unsap, Unpad, Ikopin, Unwim, IPDN dan ITB, Praktisi, DPRD Kabupaten Sumedang, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kecamatan, Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), organisasi masyarakat dan pers serta tokoh masyarakat. Adapun tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Sumedang sebagaimana gambar di bawah ini :



BAB II

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan regional maupun nasional, sebagai upaya terus menerus menuju perubahan yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas manusia khususnya masyarakat Kabupaten Sumedang, sesuai potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Perencanaan pembangunan daerah jangka panjang didasarkan pada kondisi awal perencanaan serta tantangan yang akan dihadapi dalam jangka waktu perencanaan.

2.1. Kondisi dan Analisis Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Sumedang secara administrasi terletak pada posisi 60°40' - 70°83' Lintang Selatan dan 107°44' Bujur Timur, dengan luas wilayah 152.220 ha terdiri dari 26 kecamatan dengan 270 desa dan 7 kelurahan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Indramayu dan Subang
Sebelah Selatan	: Kabupaten Garut
Sebelah Barat	: Kabupaten Bandung
Sebelah Timur	: Kabupaten Majalengka

Berdasarkan peta geologi lembar Bandung dan Arjawinangun satuan batuan di daerah Sumedang dapat dikelompokkan menjadi 15 (lima belas) satuan, urutan stratigrafi dari muda ke tua adalah sebagai berikut :

1. Aluvium (Qa).

Aluvium terdiri dari lempung, lanau, pasir, kerikil yang merupakan endapan sungai. Penyebaran batuan ini, meliputi daerah bagian utara, timur sampai bagian tengah daerah pemetaan, yaitu di sekitar lembah Sungai Cimanuk, Sungai Cilutung dan daerah Lembah Tamba dengan luas penyebaran 641,28 km² (21,11%). Tanah pelapukan dari satuan batuan ini berupa lempung lanauan sampai pasir lempungan, berwarna abu-abu kecoklatan, kepadatan sedang, plastisitas rendah, kesarangan tinggi, tebal 1-2,50 meter. Pelapukan satuan batu ini mempunyai berat jenis 2,60 g/cm³, berat isi asli 1,44 g/cm³, berat isi jenuh 1,46 g/cm³, berat isi kering 0,78g/cm³, batas cair 23,28%, indek plastis 66,94 %, kohesi 0,08 kg/cm² dan sudut geser dalam 17,13⁰.

2. Lava Hasil Gunungapi Muda (Qy1).

Satuan ini berupa aliran lava muda Gunung Cereme bersifat andesit dan basal, berwarna abu-abu tua, keras dan kompak. Penyebaran menempati bagian utara dan selatan Gunung Cereme, dan di bagian barat, yaitu sekitar Pasir Dayeuh Mungging dengan luas 46,35 km² (1,53%). Tanah pelapukan berupa lanau, berwarna coklat tua kemerahan, agak lunak, plastisitas rendah, kesarangan sedang, dengan ketebalan 0,75-1,5 meter.
3. Hasil Gunungapi Muda Tak Teruraikan (Qyu).

Satuan ini merupakan hasil endapan Gunung Tampomas yang terdiri dari breksi, lava bersifat andesit dan basal, pasir tufaan dan lapili. Penyebaran satuan ini menempati di bagian utara yang memanjang ke bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur daerah pemetaan dengan luas penyebaran 855,35 km² (28,15%). Tanah pelapukan berupa lanau lempungan, berwarna abu-abu kekuningan sampai kemerahan, bersifat teguh-lunak, plastisitas sedang sampai sangat rendah, kesarangan sedang, dengan ketebalan 1-2,50 meter.
4. Lava Hasil Gunungapi Tua (Qvl).

Satuan ini berupa aliran lava tua yang bersifat andesit, berwarna abu-abu tua, keras dengan kekar lempengan (sheeting joint). Satuan ini mempunyai penyebaran setempat-setempat, yaitu terdapat di sebelah barat Nanggerang dan Pasir Mungkal dengan luas penyebaran 62,20 km² (2,05%). Tanah pelapukan dari satuan ini berupa lanau lempungan, berwarna coklat kemerahan, bersifat teguh, plastisitas sedang, kesarangan rendah, dengan tebal tanah pelapukan 1-2 meter.
5. Breksi Hasil Gunungapi Tua (Qvb).

Satuan batuan ini terdiri dari breksi gunungapi dan endapan lahar. Breksi berwarna abu-abu tua, keras, komponen terdiri dari batuan beku andesit dan basal, masa dasar pasir tufa. Penyebarannya terdapat di bagian selatan daerah pemetaan, yaitu sekitar Pasir Guranteng, Tagog dan Pasir Waru, dengan luas 107,90 km² (3,55%). Tanah pelapukannya berupa pasir lempungan, berwarna coklat kemerahan, bersifat urai, plastisitas sangat rendah, kesarangan sedang-tinggi, dengan ketebalan 1,5-2,5 meter.
6. Hasil Gunungapi Tua Tak Teruraikan (Qvu).

Satuan batuan ini terdiri dari breksi gunungapi, lahar dan lava bersifat andesit dan basal. Breksi berwarna abu-abu tua agak kekuningan, keras, komponen batuan beku andesit, kemas terbuka, masa dasar pasir halus. Lava berwarna abu-abu, keras dan kompak. Penyebarannya terdapat di bagian barat dan timur daerah pemetaan, yaitu sekitar daerah Nanggerang, Sidopati, Batur, Wonohayu, Padahantan, Gunung Putri, Pasir Munjul dan

daerah Mandirancam, mencakup luas 236,07 km² (7,77%). Tanah pelapukannya berupa lanau lempungan, berwarna coklat kemerahan, bersifat agak lunak-teguh, plastisitas rendah, kesarangan sedang, dengan ketebalan 2-3 meter. Tanah pelapukan satuan batuan ini mempunyai berat jenis 2,61 g/cm³, berat isi asli 1,47 g/cm³, berat isi jenuh 1,58 g/cm³, berat isi kering 0,91 g/cm³, batas cair 101,04%, indek plastis 56,07%, kohesi 0,18 kg/cm² dan sudut geser dalam 3,44⁰.

7. Breksi terlipat (Qob).

Satuan ini terdiri dari breksi gunung api, breksi tufaan, batupasir, lempung tufaan dan graywake. Breksi berwarna abu-abu, keras, komponen batuan beku andesit, masa dasar pasir tufa. Penyebaran satuan batu ini terdapat di bagian tengah daerah pemetaan yang membentuk bukit kecil antara lain Gunung Kemunding, Gunung Jongkang, Pasir Paregeg dan Gunung enepah dengan luas 35,20 km² (1,16%) dari luas daerah pemetaan. Tanah pelapukan berupa lempung pasir sampai pasir lempungan, berwarna coklat kekuningan sampai kemerahan, bersifat teguh-agak urai, plastisitas sedang-rendah, kesarangan rendah, dengan ketebalan tanah pelapukan 1,5-2,5 meter. Pelapukan batuan ini mempunyai berat jenis 2,57 g/cm³, berat isi asli 1,56 g/cm³, berat isi jenuh 1,56 g/cm³, berat isi kering 1,02 g/cm³, batas cair 102,93%, indek plastis 56,75%, kohesi 0,122 kg/cm², dan sudut geser dalam 8,43⁰.

8. Formasi Cilang (Pt).

Formasi Cilang terdiri dari batu pasir tufaan, lempung tufaan, konglomerat dan kadang-kadang ditemukan lensa-lensa batu pasir gampingan. Batu pasir tufaan berwarna coklat muda, keras dan kompak, berbutir halus-sedang. Penyebaran terdapat di bagian tengah dan barat daerah pemetaan, yaitu sekitar Pasir Laja, Cihandap, Pasir Darawal, Pasir Juring dan sekitar daerah Sukahaji dengan luas 71,7 km² (2,36%) dari luas daerah pemetaan. Tanah pelapukan berupa lanau lempungan, berwarna coklat kekuningan, bersifat agak teguh, plastisitas rendah, kesarangan rendah, dengan ketebalan 1-2,75 meter. Sifat fisik dari tanah pelapukan satuan batuan ini ialah berat jenis 2,50 g/cm³, berat isi asli 1,33 g/cm³, berat isi jenuh 1,43 g/cm³, berat isi kering 0,71 g/cm³, batas cair 117,60%, indek plastis 36,53%, kohesi 0,14 kg/cm² dan sudut geser dalam 10,10⁰.

9. Formasi Kliwungu (Pk).

Formasi Kliwungu terdiri dari batu lempung dengan sisipan batu pasir tufaan, konglomerat. Batu lempung berwarna abu-abu tua, bersifat keras. Penyebaran batuan terdapat di bagian selatan dan tengah yaitu di sekitar Cisalak, Cikubang, Tarikolot, Bongas, Ciwaringin dan Leuwimunding dengan luas 91,15 km² (3,00%) dari luas daerah

pemetaan. Tanah pelapukan berupa lempung, berwarna abu agak kekuningan, lunak-teguh, plastisitas tinggi, kesarangan rendah, dengan ketebalan tanah pelapukan 1,50-2,50 meter. Berat jenis tanah 2,71 g/cm³, berat isi asli 1,49 g/cm³, berat isi jenuh 1,61 g/cm³, berat isi kering 0,97 g/cm³, batas cair 88,26%, indek plastis 44,30%, kohesi 0,24 kg/cm², dan sudut geser dalam 7,58⁰.

10. Formasi Subang Anggota Batu Lempung (Msc).

Formasi Subang batu lempung terdiri dari batu lempung terdiri dari batu lempung yang mengandung lapisan batu gamping dan kadang-kadang ditemukan sisipan batu pasir goukonit. Batulempung berwarna abu-abu tua, bersifat hancur (brittle) bila kering dan mudah lunak bila basah. Penyebaran batuan ini terdapat di bagian tengah daerah pemetaan, yaitu di sekitar Pasir Soga, Pasir Panenjauan, Warungbuah, Pasir Kibodas Kerep dan Pasir Gedongan, dengan luas 166,4 km² (5,485) dari luas daerah pemetaan. Tanah pelapukan berupa lempung, berwarna abu-abu tua, bersifat lunak bila basah, plastisitas tinggi, kesarangan sangat rendah, dengan ketebalan tanah pelapukan 2-3,50 meter. Tanah pelapukan satuan batuan ini mempunyai berat jenis 2,65 g/cm³, berat isi asli 1,32 g/cm³, berat isi jenuh 1,45 g/cm³, berat isi kering 0,78 g/cm³, batas cair 83,43%, indek plastis 22,72%, kohesi 0,20 kg/cm², sudut geser dalam 5,48⁰.

11. Formasi Halang Anggota Atas (Mhu)

Formasi Halang Anggota Atas terdiri dari batu pasir tufa, lempung dan konglomerat. Batu pasir merupakan bagian yang utama, berwarna abu-abu kekuningan, berbutir halus, keras. Penyebaran batuan meliputi daerah Bantarujeg, Bojongsalam dan Pasir Jawa, dengan luas 35,10 km² (1,16%) dari luas daerah pemetaan. Tanah pelapukan berupa pasir lanauan, berwarna coklat kemerahan, bersifat urai, plastisitas rendah, kesarangan sedang dengan ketebalan tanah pelapukan 1,00-2,50 meter. Tanah pelapukan satuan batuan ini mempunyai berat jenis 2,57 g/cm³, berat isi asli 1,38 g/cm³, berat isi jenuh 1,51 g/cm³, berat isi kering 0,80 g/cm³, batas cair 111,41%, indek plastis 51,01%, kohesi 0,23 kg/cm², sudut geser dalam 4,97⁰.

12. Formasi Halang Anggota Bawah (Mhl)

Formasi Halang Anggota Bawah terdiri dari breksi, tufa, lempung dan konglomerat. Breksi berwarna abu-abu, komponen andesit, keras, masa dasar pasir. Penyebaran batuan terdapat di bagian tengah dan selatan daerah pemetaan, yaitu di sekitar Pasir Jatilawang, Gunung Halarang, Pasir Cimanggulang, Pasir Dangdeur dan sekitar daerah Talaga dengan luas 51,70 km² (1,70%). Tanah pelapukan berupa lanau lempungan, berwarna coklat kekuningan sampai kemerahan, bersifat agak lunak sampai teguh, plastisitas rendah, agak

sarang dengan ketebalan tanah pelapukan 1,50-2,00 meter. Tanah pelapukan satuan batuan ini mempunyai berat jenis 2,61 g/cm³, berat isi asli 1,44 g/cm³, berat isi jenuh 1,56 g/cm³, berat isi kering 0,91 g/cm³, batas cair 94,68%, indek plastis 43,65%, kohesi 0,15 kg/cm², sudut geser dalam 3,13⁰.

13. Formasi Cinambo Anggota Serpih (Omtu).

Formasi Cinambo terdiri dari batu lempung dengan selingan batu-pasir gampingan, pasir gampingan dan pasir tufaan. Batu lempung berwarna abu-abu tua, bersifat hancur (brittle) bila kering. Penyebaran satuan batuan ini menempati di bagian tengah daerah pemetaan, yaitu di sekitar selatan Cicuruk kolot, Pasir Bangengek, Pasir Bawagung dan di sekitar daerah Maja, dengan luas 64,45 km² (2,12%) dari luas daerah pemetaan. Tanah pelapukan dari batuan ini berupa lempung berwarna abu-abu tua, bersifat lunak bila basah, plastisitas tinggi, kesarangan sangat rendah, dengan ketebalan tanah pelapukan berkisar antara 1,5-2,5 meter. Tanah pelapukan satuan batuan ini mempunyai berat jenis 2.60 g/cm³, berat isi asli 1,44 g/cm³, berat isi jenuh 1,56 g/cm³, berat isi kering 0,91 g/cm³, batas cair 117,30%, indek plastis 66,65%, kohesi 0,18 kg/cm², sudut geser dalam 3,75⁰.

14. Formasi Cinambo Anggota Batupasir (Omtl).

Formasi Cinambo ini terdiri dari batupasir, tufa, lempung, batupasir gampingan dan lanau. Satuan ini berwarna abu-abu kekuningan sampai abu-abu gelap, sangat kompak, pada batu pasir mempunyai ciri perlapisan tebal dengan sisipan serpih dan lempung yang tipis dan padat berwarna kehitam-hitaman. Penyebaran batuan terdapat di bagian tengah dan timur daerah pemetaan, antara lain terdapat di sekitar Pasir Mojagede, Gunung Walik, Cikadang dan Cipicung, dengan luas 96,05 km² (3,16%) dari seluruh luas daerah pemetaan. Tanah pelapukan berupa lempung lanauan, berwarna coklat kemerahan, teguh, plastisitas sedang, dengan ketebalan tanah pelapukan 1,50-2,00 meter. Tanah pelapukan dari satuan batuan ini mempunyai berat jenis 2,69 g/cm³, berat isi jenuh 1,59 g/cm³, berat isi asli 1,50 g/cm³, berat isi kering 0,94 g/cm³, batas cair 100,44%, indek plastis 60,77%, kohesi 0,22 kg/cm², sudut geser dalam 5,19⁰.

15. Batuan Terobosan (ha).

Satuan ini berupa andesit hornblende berwarna abu-abu, keras dan berbentuk lempeng dengan lebar 20-30 meter. Penyebaran satuan ini sangat terbatas dan setempat-setempat membentuk bukit-bukit kecil, seperti di daerah Palasari, Gunung Jajar, Gunung Kuda dan Gunung Maung, dengan luas 16,45 km² (0,54%). Tanah pelapukan berupa pasir lempung, warna abu-abu, bersifat urai, plastisitas rendah, kesarangan rendah, dengan ketebalan tanah pelapukan 0,5-1,25 meter.

Aspek lainnya dari geomorfologi adalah topografi. Bentuk permukaan wilayah Kabupaten Sumedang sangat variatif dari permukaan yang datar sampai yang bergunung, sedangkan ketinggiannya secara keseluruhan terletak antara 20-1000 meter dpl. Secara umum klasifikasi kelas ketinggian wilayah Kabupaten Sumedang dapat dibagi atas :

1. 20-100 meter dpl, meliputi sebagian besar Wilayah Kecamatan Tomo dan Kecamatan Ujungjaya serta sebagian kecil bagian utara Kecamatan Buahdua dan bagian utara Kecamatan Surian.
2. 10-500 meter dpl, meliputi sebagian besar Kecamatan Surian, Buahdua, Conggeang, Paseh, Tanjungkerta, Surian, Situraja, Cisit, Jatigede dan Jatinunggal serta sebagian kecil di bagian tengah Kecamatan Wado, bagian tengah Kecamatan Darmaraja, bagian selatan Sumedang Utara, bagian utara Sumedang Selatan, serta bagian utara Tanjungmedar.
3. 501-1000 meter dpl, meliputi Sebagian besar Kecamatan Cimalaka, Cisarua, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Tanjungmedar, Rancakalong, Pamulihan, Tanjungsari, Jatinunggal, Cimanggung, Paseh, dan Cibugel serta sebagian kecil di bagian barat selatan Kecamatan Tanjungkerta, bagian selatan Buahdua, bagian barat Conggeang, serta bagian selatan Kecamatan Wado.
4. Lebih dari 1000 meter dpl, meliputi sebagian besar Kecamatan Sukasari, Cimanggung dan Cibugel serta sebagian kecil di bagian barat Kecamatan Rancakalong, bagian utara dan selatan Pamulihan, bagian selatan Sumedang Selatan, bagian selatan Situraja, Darmaraja dan Wado serta sebagian kecil Kecamatan Paseh, Conggeang, Buahdua, dan Cimalaka yang merupakan puncak Gunung Tampomas.

Sedangkan topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan atas 5 kelas, yakni :

1. 0-8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut Kabupaten Sumedang yang meliputi sebagian besar Kecamatan Ujungjaya serta sebagian Kecamatan Tomo dan Conggeang; bagian barat laut Kabupaten Sumedang yang meliputi sebagian Kecamatan Surian, Buahdua, dan Tanjungkerta; bagian barat daya Kabupaten Sumedang yang meliputi Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung; serta kawasan perkotaan Sumedang yang meliputi sebagian besar Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Sumedang Utara.
2. 8-15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37%. Wilayah Kabupaten Sumedang yang dominan dengan kemiringan tipe ini terletak di bagian tengah ke utara yang meliputi sebagian Kecamatan Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, dan Buahdua, serta sebagian besar Kecamatan Cisarua dan Conggeang, bagian

barat laut yang meliputi sebagian Kecamatan Surian, Tanjungmedar, dan Tanjungkerta, serta bagian barat daya yang meliputi sebagian besar Kecamatan Cimanggung serta sebagian Kecamatan Tanjungsari dan Pamulihan.

3. 15-25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di Wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara yang meliputi sebagian besar Kecamatan Jatigede, Cisit, Jatinunggal, Wado, dan Tomo serta sebagian Kecamatan Paseh, Situraja dan Darmaraja, bagian selatan sampai barat daya yang meliputi sebagian besar Kecamatan Pamulihan dan Ganeas serta sebagian Kecamatan Sumedang Selatan, Cimanggung, Tanjungsari, Jatinangor, dan Sukasari serta bagian barat yang meliputi sebagian Kecamatan Rancakalong, Tanjungmedar, dan Surian.
4. 25-40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah yang meliputi sebagian besar Kecamatan Tanjungkerta dan Cimalaka serta sebagian Kecamatan Tanjungmedar, Rancakalong, Sumedang Utara, Buahdua, dan Conggeang, bagian selatan yang meliputi sebagian besar Kecamatan Situraja serta sebagian Kecamatan Cimanggung, Pamulihan, Sumedang Selatan, Cibugel, Ganeas, Cisit, dan Darmaraja, serta bagian timur yang meliputi sebagian Kecamatan Wado, Jatinunggal, dan Jatigede.
5. Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan yang meliputi sebagian besar Kecamatan Cibugel serta sebagian Kecamatan Cisit, Situraja, Ganeas, dan Sumedang Selatan, bagian timur yang meliputi sebagian Kecamatan Jatinunggal dan Jatigede, serta bagian barat yang meliputi sebagian besar Kecamatan Sukasari dan Rancakalong serta sebagian Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, dan Tanjungmedar.

Kondisi topografi berkaitan dengan iklim merupakan jumlah rata-rata dari kondisi peristiwa yang terjadi di atmosfer di suatu wilayah pada waktu yang lama. sehingga dapat membantu dalam perumusan pengembangan sektor-sektor pembangunan terutama pertanian. Wilayah Kabupaten Sumedang memiliki rata-rata curah hujan per tahun cukup tinggi yaitu sebesar 2430.75 mm. Jumlah hari hujan terkecil berada di Kecamatan Cibugel dengan 52 hari hujan, kemudian Kecamatan Buahdua dengan 76 hari hujan, Wado 83 hari hujan, serta Tomo 84 hari hujan. Kecuali kecamatan yang alat pengukurnya rusak atau yang belum memiliki data curah hujan, sebelas kecamatan lainnya memiliki jumlah hari hujan di atas 100 hari.

Kemudian aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah tersebut, di mana pengendalian dan pengaturan tata air tersebut meliputi masalah sumber air, kebutuhan air tanaman, banjir, peluapan, erosi, dan sedimentasi. Sumber air suatu wilayah tergantung pada daur hidrologi wilayah tersebut, baik daur alami maupun yang telah diintervensi manusia. Daur hidrologis alami dipengaruhi oleh kondisi cuaca, topografi, geologi, dan letak dari wilayah tersebut dalam satuan wilayah sungai atau daerah tangkapan air.

Aliran-aliran sungai besar di wilayah ini bersama dengan anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat digolongkan atas 6 Sub DAS yakni Sub DAS Citarik, Cipeles, Cipunegara, Cipelang, Cimanuk, dan Sub DAS Cilutung. Terkait dengan DAS adalah keberadaan air tanah yang secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya curah hujan, luas daerah peresapan, sifat kelulusan bahan permukaan, lapisan batuan serta morfologi suatu wilayah. Tipe air tanah terbagi dalam 2 kategori yakni air tanah bebas dan air tanah tertekan.

1. Air tanah bebas, sering disebut dengan air tanah dangkal, karena dapat diperoleh dengan mudah (menggali pada kedalaman antara 1-20 meter). Di daerah dataran umumnya kedalaman pencapaian air lebih dangkal yakni <3 meter. Sedangkan di daerah perbukitan, muka air tanah mencapai >3 meter dari permukaan tanah seperti di daerah Tanjungsari yang mencapai 20 meter. Di Daerah Paseh dan sekitarnya, muka air tanah mencapai 4-10 meter dan air tanah terdapat pada rongga-rongga endapan lahar dan breksi.
2. Air tanah tertekan terdapat dalam lapisan yang terletak antara dua lapisan batuan kedap air. Air tanah tertekan jarang dijumpai di Wilayah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hidrogeologinya, wilayah Kabupaten Sumedang dapat dikategorikan dalam 5 tipe estimasi produktivitas air tanah, yaitu :

1. Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir, meliputi akuifer dengan produktivitas sedang (akuifer tidak menerus, tipis, dan rendah keterusannya), muka air tanah umumnya dangkal, debit sumur umumnya kurang dari 5 liter/detik. Komposisi litologinya terdiri dari aluvium berupa lempung, pasir, dan kerikil.
2. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir meliputi :
 - a. Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas (akuifer dengan keterusan dan kedalaman muka air tanah yang sangat beragam) dengan debit sumur yang umumnya lebih dari 5 liter/detik.
 - b. Akuifer produktif dengan keterusan yang sangat beragam. Umumnya air tanah ini tidak digunakan karena dalamnya muka air tanah. Komposisi litologi batuan dan

kelulusannya berupa endapan vulkanik muda yang terdiri dari breksi tufaan, lahar, tufa, dan aliran lava dengan kelulusan yang beragam.

3. Akuifer (bercelah/sarang) dengan produktivitas rendah dan daerah air tanah langka meliputi :
 - a. Akuifer dengan produktivitas rendah, setempat berarti. Umumnya keterusannya sangat rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah yang terbatas. Jenis air tanah ini diperoleh di lembah-lembah atau pada zona-zona pelapukan. Sedangkan komposisi litologi batuan dan kelulusan dari wilayah ini umumnya batu pasir tufaan dengan batu apung, nafal tufaan, serpih tufaan berselingan dengan batu lempung atau nafal. Kelulusan yang dimiliki umumnya rendah sampai sedang.
 - b. Daerah air tanah langka. Komposisi litologi batuan dan kelulusan jenis air tanah langka di wilayah ini berupa breksi vulkanik, tufa dan lava bersisipan batu pasir, batu lanau, dan batu lempung sangat padu. Umumnya tingkat kelulusannya rendah dengan kelulusan sedang terutama berada di zona pelapukan yang tebal.

Selain air tanah adalah air permukaan berupa sungai. Sungai berfungsi mengumpulkan air hujan ke daerah aliran sungai. Dengan membandingkan curah hujan rata-rata dengan volume air sungai, diperkirakan sebagian besar curah air hujan meresap ke dalam tanah dan sisanya mengalir sebagai air permukaan. Sungai-sungai besar yang banyak dimanfaatkan airnya adalah Sungai Cipeles, Sungai Cirajang, Sungai Cipunegara, dan Sungai Cisugan. Hulunya di daerah pegunungan antara lain Gunung Tampomas, Gunung Pangarang, dan Gunung Calangcang. Disamping air sungai, air permukaan ditunjang oleh keberadaan mata air termasuk mata air panas seperti di Kecamatan Conggeang dan Buahdua dengan debit antara 10-100 liter/detik.

Berdasarkan kondisi geomorfologi dan lingkungan, beberapa kendala pengembangan wilayah adalah terjadinya bencana alam antara lain gerakan tanah (longsor, nendetan dan rayapan), erosi tanah dan banjir. Kejadian selama kurun waktu 10 tahun yaitu pada tahun 1995, 2000 dan 2005 kejadian bencana alam longsor dan banjir lebih banyak terjadi dibandingkan bencana lainnya bahwa kejadian bencana alam longsor pada tahun 2005 sebanyak 81 kali kejadian lebih banyak dibanding tahun 2000 yaitu sebanyak 23 kejadian atau meningkat 525,17% dibanding tahun 2000 terutama di kecamatan Sumedang Selatan, Situraja, Jatinunggal dan Tanjungmedar sedangkan bencana banjir sebanyak 36 kali kejadian lebih banyak dibanding tahun 2000 yaitu sebanyak 9 kejadian atau meningkat 400% dibanding tahun 2000 terutama terjadi di Kecamatan Jatinangor, Cimangung, Situraja dan Surian. Begitu juga dengan kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Sumedang seperti

di wilayah Cadaspangeran, Cigendel, Pamulihan, Sukasirnarasa, Pasir Biru, Pamekaran, Sumedang-Wado-Malangbong, Nagarawangi, Sukaluyu, Kaduwangi, Sukamulya-Ujungjaya, Palasari dan lokasi penambangan pasir Galian C di sekitar Kecamatan Cimalaka yang mengakibatkan lahan terbuka dan kritis. Sampai dengan tahun 2003 lahan kritis di Kabupaten Sumedang seluas 19.431,37 ha dan yang sudah ditangani sampai dengan tahun 2005 seluas 14.119,85 ha atau 72,66% melalui Gerakan Penghijauan, Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis, dan Gerakan Sumedang Hijau dan BLN Citarik.

Penurunan daya dukung lingkungan akibat kerusakan lingkungan juga akibat pencemaran air, tanah dan udara dari limbah industri terutama di zona industri di Kecamatan Jatinangor dan Cintanggung. Sampai dengan akhir tahun 2005 terdapat 26 industri yang berada dalam kawasan, sedangkan industri diluar kawasan antara lain FT. Polifin, Kahatex, Yogie Saputra, Wisika, Insan Sandang, Banon, Supratex, Five Star, TBM. Sampai dengan saat ini penanganan limbah industri dan kerusakan lingkungan belum dapat ditangani secara maksimal. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya dampak ikutan seperti berkembangnya penyakit berbasis lingkungan, perpindahan pola penularan penyakit binatang ke manusia (spill over) seperti flu burung, perubahan keseimbangan musim hujan dan kemarau, lahan kritis yang semakin meluas, kasus banjir di musim hujan dan krisis air di musim kemarau yang semakin meluas, frekuensi bencana longsor yang meningkat, serta berkembangnya konflik sosial berupa konflik antara pencemar dan yang tercemar, konflik antara pemanfaat sumber daya alam dan lingkungan di hulu dan hilir.

Berbagai faktor penyebab dan dampak negatif yang muncul tersebut merupakan fenomena lingkungan yang saling terkait dan menjadi semakin kompleks di penghujung sepuluh tahun terakhir. Pemicu utama adalah perilaku dan budaya yang belum ramah lingkungan, baik dari sisi perilaku membangun maupun perilaku individu masyarakatnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan belum diterapkan sepenuhnya dalam proses pembangunan.

Kesadaran untuk memelihara dan menanggulangi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara sistematis baru tumbuh dan berkembang akhir akhir ini, melalui berbagai upaya, namun masih belum mampu mengurangi proses penurunan daya dukung lingkungan, khususnya daya dukung lahan, air, dan keanekaragaman hayati, karena laju kerusakan lingkungan jauh lebih cepat dibandingkan berbagai upaya yang dilakukan.

Pembangunan sumberdaya alam, lingkungan hidup menempati posisi penting dalam keseluruhan pembangunan Kabupaten Sumedang, baik di masa lalu, kini, dan masa mendatang. Kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup mampu menjadi soko guru utama

perekonomian masyarakat. Peran ekonomi tersebut terus meningkat dan berkembang dari masa ke masa, namun belum diimbangi dengan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang setiap tahun terjadi kenaikan, dimana pada tahun 2005 mencapai 1.045.863 jiwa dengan komposisi laki-laki 515.628 jiwa (49,31%) dan perempuan 530.195 jiwa (50,70%). Jumlah ini meningkat sebesar 8,14% dibanding tahun 2000 yaitu sebanyak 967.049 jiwa dengan komposisi laki-laki 481.568 jiwa (49,79%) dan perempuan 485.481 jiwa (50,20%). Jumlah ini meningkat 23,38% dibanding tahun 1995 sebanyak 847.658 jiwa terdiri dari laki-laki 420.107 jiwa (49,56%) dan perempuan 427.551 jiwa (50,44%). Secara keseluruhan jumlah penduduk wanita lebih banyak dibanding laki-laki secara berturut pada tahun 1995 (50,44%), tahun 2000 (50,20%) dan tahun 2005 (50,70%). Adapun laju pertumbuhan penduduk pada tahun 1995 sebesar 0,69%, dan tahun 2000 sebesar 8,86% serta tahun 2005 sebesar 1,42%.

Dilihat dari piramida penduduk pada tahun 1995 dan tahun 2005 memperlihatkan distribusi persentase penduduk dalam tiap kelompok umur dan jenis kelamin. Pada tahun 1995 piramida penduduk Kabupaten Sumedang memperlihatkan tipe lonceng. Terjadi penurunan tingkat kelahiran yang sangat cepat sedangkan angka kematian rendah. Namun demikian, pada tahun 2005, piramida penduduk menunjukkan tipe dengan tingkat kelahiran rendah dan kematian yang rendah pula, umur media tinggi, angka beban tanggungan (total) yang rendah, dan komponen penduduk yang paling besar adalah penduduk berumur dewasa dan tua. Persentase penduduk usia di bawah 10 tahun mengalami penurunan. Penurunan persentase ini merupakan cerminan penurunan angka kelahiran dalam dasawarsa delapan puluhan dan sembilan puluhan. Penurunan persentase di bawah 10 tahun ini dibarengi dengan peningkatan persentase penduduk di atas 50 tahun. Peningkatan persentase ini mencerminkan perbaikan kesehatan antara penduduk usia tua serta angka kelahiran yang tinggi di masa lalu sedangkan persentase penduduk usia 15-19 dan 20-24 tahun juga naik.

Seperti halnya pada beberapa daerah di Indonesia, piramida penduduk di Kabupaten Sumedang mempunyai pola yang serupa. Persentase penduduk 0-4 lebih kecil daripada persentase penduduk 5-9. Pola ini ditemukan juga untuk data tahun 1995, laki-laki dan perempuan. Dalam tahun 1995 persentase penduduk Kabupaten Sumedang pada kelompok usia 0-4 relatif hampir sama walaupun masih lebih kecil dibandingkan persentase untuk penduduk 5-9. Persentase penduduk 0-4 dan 5-9 relatif lebih kecil daripada kohor berikutnya

10-14, 15-19 dan 20-24. Persentase yang lebih besar pada penduduk 15-19 dan 20-24 ini mungkin disebabkan karena arus masuk pelajar ke Kabupaten Sumedang.

Pada tahun 1995 anak balita di Kabupaten Sumedang berjumlah 78.297 jiwa yang terdiri dari 39.672 laki-laki dan 38.635 perempuan. Anak balita merupakan 9,23% seluruh penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 1995. Artinya tiap 100 penduduk Kabupaten Sumedang rata-rata terdapat 9 anak balita. Sedangkan jumlah lansia pada tahun 2005 sebanyak 25.171 laki-laki dan 27.393 perempuan. Tampak bahwa lebih banyak lansia perempuan daripada lansia laki-laki. Laju pertumbuhan jumlah manula (antara tahun 1995-2005) rata-rata sebesar 5,5% per tahun yang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan jumlah anak balita sebesar 1,21% per tahun. Di masa depan proporsi manula akan meningkat. Dimana saat ini jumlahnya relatif masih kecil. Tetapi, 20-30 tahun mendatang akan membesar. Untuk penduduk yang sekarang berusia 35 tahun ke atas, sudah waktunya untuk memikirkan kondisi ekonomi sosial manula. Waktu 20-30 tahun bukan waktu yang lama untuk suatu perencanaan pembangunan, bahkan mungkin Kabupaten Sumedang menjadi daerah tujuan masa tua, masa pensiun dari daerah lainnya.

Kepadatan penduduk terus meningkat walaupun tidak merata sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, dimana pada tahun 1995 sebanyak 12.805 jiwa per km persegi, tahun 2000 sebanyak 15.261 jiwa per km persegi meningkat 19,18% dan tahun 2005 sebanyak 23.645 jiwa per km persegi atau meningkat 54,93%. Kepadatan penduduk terdapat di Kecamatan Jatinangor yaitu mencapai 3.452 jiwa per km persegi, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Jatigede yaitu sebesar 220 jiwa per km persegi. Fenomena kepadatan penduduk tersebut terindikasi oleh adanya migrasi baik karena dorongan pergerakan penduduk karena kegiatan pendidikan, ataupun tarikan kegiatan perdagangan, industri, dan permukiman yang berdampak terhadap kesulitan penyediaan perumahan dan sarana penunjang lainnya bahkan membentuk kawasan dengan fungsi perkotaan.

2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pasca krisis menunjukkan arah yang membaik. Salah satu indikatornya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dimana pada tahun 1995 sebesar 6,95% dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar Rp.3.564,3 milyar sedangkan pada tahun 2000 mengalami penurunan menjadi 4,08% dengan nilai PDRB sebesar Rp 3.699,8 milyar serta pada tahun 2005 meningkat menjadi sebesar 4,52% dengan nilai Rp 4.506,2 milyar. Pendapatan perkapita mencapai Rp 4.341.731 pada tahun 2005 dan meningkat dibandingkan tahun 2000 sebesar

Rp 3.825.868 dan tahun 1995 sebesar Rp 4.211.541. Peningkatan PDRB ini disumbang dari tiga kontribusi sektor utama yaitu sektor Industri Pengolahan (25,62%), sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (26,13%) dan sektor Pertanian (28,12%).

Peningkatan LPE dan PDRB tidak terlepas dari iklim investasi yang terus membaik. Hal mana ditandai dengan perkembangan investasi pada tahun 2005 (atas dasar harga konstan tahun 2000) mencapai Rp 766 milyar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,37%. Pertumbuhan investasi yang terus membaik ternyata tidak memberikan korelasi positif terhadap pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan tetap belum dapat terselesaikan mengingat perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis dan faktor budaya antar wilayah mengakibatkan perbedaan kondisi serta permasalahan kemiskinan yang dihadapi. Sebagai gambaran kemiskinan tersebut pada tahun 2006, terdapat sekitar 82.719 rumah tangga menurut yang dikategorikan miskin di Kabupaten Sumedang. Sedangkan berdasarkan perhitungan Badan Keluarga Berencana Nasional di daerah Sumedang pada tahun 2005 tercatat 9.738 KK dikategorikan fakir, dan 46.506 dikategorikan miskin dari 293.141 KK yang ada, sedangkan dilihat dari jumlah pencari kerja terus mengalami peningkatan dibanding dengan angkatan kerjanya. Jumlah pencari kerja pada tahun 1995 sebanyak 6.172 jiwa, tahun 2000 meningkat menjadi 10.301 jiwa, tahun 2005 sebanyak 456.810 jiwa. Oleh karena itu perlu adanya model investasi keberpihakan kepada UKM, tanpa menghambat investasi.

Banyaknya jumlah pengangguran yang diakibatkan tidak seimbangnya antara angkatan kerja dengan penyediaan lapangan kerja. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sumedang pada tahun 2005 sebanyak 456.810 jiwa sedangkan jumlah pencari kerja mencapai 8,25% dari angkatan kerja. Berdasarkan jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Sumedang sebagian besar bermatapencarian secara berurutan di sektor pertanian, perdagangan dan industri. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 1995 sebanyak 130.752 orang (33,76% dari 387.247 orang) dan bertambah menjadi 155.052 orang (39,91%) pada tahun 2000 serta sebanyak 169.544 orang (38%) pada tahun 2005. Begitu yang bekerja di sektor perdagangan sebesar 15,65% pada tahun 1995, 23,51% pada tahun 2000 dan 23,50% pada tahun 2005. Sedangkan yang terkecil berkerja di sektor keuangan. Secara demografis, penduduk Kabupaten Sumedang masih didominasi oleh kegiatan primer (pertanian dalam arti luas) dan diikuti industri dan sebagian kecil di sektor jasa.

Sebagai gambaran kondisi pembangunan pada beberapa bidang/sektor ekonomi dapat sebagai berikut ini :

1. Dihubungkan dengan visi dan misi daerah tahun 2003-2008 yang tertuang dalam Renstrada, dalam perkembangannya sistem agrobisnis dan pariwisata ini belum merekatnya (belum berkeadilan) antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya. Khususnya persentase nilai tambah disektor-sektor primer, tempat masyarakat miskin, terutama di sektor pertanian persentase nilai tambah perkapita pekerja menurun, berbeda dengan pekerja disektor sekunder dan tersier semakin meningkat. Pembangunan agrobisnis dalam arti luas masih dihadapkan pada persoalan hubungan antar sub sistem pertanian yang belum sepenuhnya menunjukkan keharmonisan baik pada skala lokal, regional dan nasional. Kinerja masing-masing subsistem pertanian masih rendah, terutama pada subsistem budidaya (on-farm) dimana petani dihadapkan pada luasan lahan yang semakin sempit, teknologi masih tradisional, mutu produk rendah, harga tidak mendukung, dan struktur pasar yang cenderung merugikan petani. Cara pandang sektoral yang belum terintegrasi pada sistem pertanian, serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang penting apabila ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, tergambar dari proporsi penduduk di Kabupaten Sumedang yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 37% dengan pola persebaran yang hampir merata. Selain itu pertanian di Kabupaten Sumedang sudah ada dan tumbuh di masyarakat, khususnya masyarakat petani di perdesaan dan memiliki potensi yang besar dan variatif didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan dan hutan) antara lain ubi cilembu, sawo, talas semir, jeruk cikoneng, tembakau, dan sapi perah (susu sapi). Sumberdaya lahan darat dengan luas total 118.712 Ha atau 77,99% merupakan sumberdaya potensial untuk agribisnis termasuk pengembangan tanaman sumber energi alternatif seperti jarak pagar. Sumberdaya lahan darat untuk sawah (irigasi dan tadah hujan), ladang dan tegalan menunjukkan penggunaan pada umumnya lebih dari 23.82%. Potensi luas panen tanaman pangan di Kabupaten Sumedang didominasi oleh tanaman padi yaitu sekitar 33.508 hektar atau 22,01%, sementara tanaman palawija hanya mencapai 36,249 hektar. Potensi lahan kehutanan dengan luas 367.746,63 hektar, tersebar hampir di semua wilayah Kabupaten Sumedang. Produksi ternak di Kabupaten Sumedang meliputi domba, kambing, sapi potong dan sapi perah. Jumlah produksi ternak ini berkaitan dengan luas lahan yang diperlukan sebagai lahan pengangonan atau penanaman pakan ternak. Produksi ikan menunjukkan produk hasil budidaya yang dilakukan masyarakat dari kolam, sawah, karamba, kolam air deras, dan jaring apung. Produksi perikanan tahun 2005 adalah sebanyak 4.181,520 ton.

2. Meskipun Sumedang telah lama memiliki program pengembang sentra-sentra yang diusahakan oleh usaha kecil dan menengah agar bergairah dan tumbuh secara dinamis, namun dirasakan masih belum efektif dan berkelanjutan. Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan kurang maksimal dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu (1) Relevansi pembinaan terhadap UKM masih terbatas pada penyediaan jasa berlandaskan pandangan sempit tentang kebutuhan UKM, yaitu lebih banyak ditentukan dari sisi pemberian layanan dan bukan karena pengetahuan tentang apa yang diperlukan UKM, (2) Jangkauan sasaran terbatas, hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada stimulan dan ketentuan jenis bantuan terhadap UKM, akibatnya jumlah perusahaan dan pelaku UKM yang menerima bantuan jadi terbatas, terutama oleh jumlah dana yang dianggarkan melalui program pembangunan, (3) Kestinambungan yang lemah dan kemacetan program yang tengah dijalankan terjadi karena ketergantungannya pada dana pemerintah maupun skema mekanisme pemberian bantuan. Perkembangan koperasi dan UKM di Kabupaten Sumedang menunjukkan pertumbuhan yang relatif cukup jika diukur dari jumlah, yaitu sebanyak 28 pada tahun 1995 meningkat pesat menjadi 464 koperasi pada tahun 2000 dan mencapai jumlah sebanyak 519 koperasi pada tahun 2005. Pada tahun 2005 kondisi aktif sebanyak 397 koperasi atau 76,49%, meningkat 2,01%, koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sampai dengan akhir tahun 2005 sebanyak 240 unit atau 60,45% dari jumlah koperasi aktif, meningkat 6,25% dibanding tahun 2005. Sedangkan koperasi yang tidak aktif sebanyak 122 unit atau 23,51%, menurun 1,54% dibanding tahun 2005. Banyak koperasi yang dikategorikan aktif namun tidak melaksanakan aktivitasnya secara optimal sesuai dengan prinsip dan norma koperasi, hal ini tergambarkan dari rendahnya nilai transaksi rata-rata anggota koperasi jauh di bawah Rp 100.000,- per bulan. Jumlah anggota koperasi dari tahun ke tahun rata-rata naik 2-5%, tercatat sampai dengan 2005 sebanyak 239.339 orang baru 31,26% dibanding jumlah penduduk dewasa sebanyak 765.503 jiwa (73,21%) dari jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sebesar 1.045.626 jiwa, sisanya sebanyak 526.164 masih perlu didorong untuk berkoperasi. Jumlah modal sendiri sampai dengan akhir tahun 2005 senilai Rp 130,427 juta, sedangkan modal luar Rp 50.174 juta, hal ini masih cukup baik terbukti dengan mendominasinya kekuatan modal sendiri (swadaya) yaitu 1:2,60. Asset koperasi pertahun 2005 tercatat Rp 228.020 juta, naik rata-rata 5,88% dibandingkan dengan posisi tahun 2003-2005. Volume usaha koperasi secara kumulatif dari tahun 2000-2005 sebesar Rp 8.638 juta, dengan laju kenaikan rata-rata pertahun sebesar 13,02%.

3. Dilihat dari persepsi kondisi daya saing yang dimiliki para pengusaha kecil, menengah dan besar, beberapa pihak telah melakukan kajian tentang daya saing daerah, walaupun masih terbatas kajian tersebut mengandung kelemahan/kekurangan, diantaranya, Pertama dari hasil kajian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2004, daya tarik investasi Kabupaten Sumedang dikategorikan sedang atau cukup. Kedua yaitu hasil kajian tentang pemetaan pengusaha andalan dan usaha unggulan untuk industri berbasis kayu, dinyatakan bahwa kompetensi pengusaha rendah dengan komitmen tinggi, tetapi dilihat dari daya tarik industri dan kekuatan bisnis pertumbuhannya berkonsentrasi melalui integrasi horizontal, sedangkan keandalannya pengusaha rendah, walaupun usaha unggulannya sedang. Pada industri berbasis pangan dinyatakan bahwa citra dan kualitas produk yang masih lemah, selain kapasitas dan koordinasi keterpaduan antar stakeholder. Sebagai gambaran umum tentang inovasi Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan daya saingnya, ditunjukkan dari Pertama, sumber daya yang masih dikategorikan marginal, yaitu pembiayaan bisnis selain bank komersil (misalnya modal beresiko, seperti modal ventura, lembaga keuangan mikro) belum berkembang, juga sumber daya manusia tingkat keahliannya rendah. Kedua, keluaran (output) intelektual yang relatif rendah, hal ini dilihat dari perolehan HAKI, baru perlindungan beberapa varietas tanaman dan merk, sedang rahasia dagang, disain industri, disain tata letak sirkuit terpadu, paten, hak cipta, pengetahuan tradisional dan indikasi geografis belum ada. Ketiga, teknologi yang dihasilkan lembaga litbang atau perguruan tinggi belum dimanfaatkan oleh dunia usaha (masyarakat), kurang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha (masyarakat), selain modal bisnis yang mendukung transaksi (pasar) yang efektif belum berkembang. Oleh karenanya, budaya dan struktur inovasi yang ada masih memerlukan interaksi yang intensif antar pemangku kepentingan, sehingga adanya suatu sistem inovasi ke arah yang lebih baik, agar posisi rentan dalam dinamika persaingan bisa terantisipasi. Dalam kerangka kebijakan makro perekonomian pada tahun 2002 dan dilanjutkan pada tahun 2005 diberlakukan kemudahan dalam perizinan/investasi (lama proses, biaya, mekanisme) melalui prosedur tetap pelayanan di tempat pelayanan satu pintu/atap serta pelimpahan beberapa perizinan kepada kecamatan.
4. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dampaknya masih dirasakan sampai saat ini karena masih ada beberapa industri yang belum bisa beroperasi lagi, walaupun sejak tahun 2005 secara perlahan pembangunan industri relatif tumbuh dan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 24%. Pada sektor industri, masih diandalkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun dukungan infrastruktur belum memadai. Pemanfaatan

kawasan industri yang sudah ada belum optimal difungsikan dikarenakan persaingan dengan kawasan industri yang ada di daerah lain, dari lahan kawasan industri di Cimanggung-Jatinangor seluas 365 Ha baru dapat dimanfaatkan 60%. Kendala lainnya dalam pengembangan industri antara lain masih tingginya tingkat ketergantungan bahan baku import yang menyebabkan daya saing industri menurun, rendahnya kemampuan dalam pengembangan teknologi, rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia serta pencemaran limbah industri yang masih tinggi. Guna mengantisipasi hal tersebut, industri di Kabupaten Sumedang perlu didorong pada peningkatan kearifan lokal, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penanggulangan pencemaran lingkungan sehingga diharapkan industri yang akan dikembangkan adalah industri yang berbasis bebas polusi (clean production).

5. Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Sumedang di fokuskan pada pengembangan sistem distribusi barang dan peningkatan akses pasar termasuk berkembangnya pasar modern dan semi modern yang mampu bermitra dengan pasar tradisional. Pengembangan sistem distribusi adalah dalam rangka memperlancar arus barang, memperkecil disparitas antar daerah, mengurangi fluktuasi harga dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat. Sedangkan peningkatan akses pasar dilakukan melalui promosi produk yang dihasilkan Kabupaten Sumedang. Komoditas ekspor dari Kabupaten Sumedang masih didominasi komoditi industri terutama industri dan produk tekstil dan kerajinan. Berdasarkan perbandingan realisasi ekspor dan impor, Kabupaten Sumedang masih lebih banyak ekspor ke Luar Negeri. Hal ini sangat positif karena dapat menunjang perkembangan ekonomi secara makro melalui promosi dan mengikuti pameran.
6. Kabupaten Sumedang memiliki potensi pasar pariwisata yang sangat besar baik bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, terutama kondisi alam dan budaya yang dimiliki sebagai modal dasar pengembangan daya tarik wisata. Selain letak geografis Kabupaten Sumedang yang sangat strategis yang terletak di antara dua Pusat Kegiatan Nasional, yaitu ibukota Provinsi Jawa Barat dan Cirebon yang merupakan gerbang masuk wisatawan ke Kabupaten Sumedang. Adapun perkembangan jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Sumedang pada tahun 1995 sebanyak 58.080 wisatawan, menjadi 120.670 wisatawan pada tahun 2000 serta tahun 2005 meningkat sebanyak 256.758 wisatawan dengan 75% wisatawan lokal dan nusantara dan 25% wisatawan asing. Jumlah pengunjung yang mengalami peningkatan 7,69% dari tahun sebelumnya, tetapi masih jauh di bawah target yang harus dicapai yaitu sekitar 15%.

7. Sarana dan Prasarana Daerah (Infrastruktur)

Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah dapat dilihat dari aspek transportasi, sumberdaya air, telekomunikasi, sarana dan prasarana dasar pemukiman, listrik serta energi.

- a. Secara umum sampai akhir tahun 2005, cakupan pelayanan sarana dan prasarana jalan masih rendah, dapat dilihat dari rendahnya tingkat kemudahan suatu wilayah untuk dijangkau (indeks aksesibilitas) serta rendahnya tingkat kemudahan suatu kendaraan untuk bergerak (indeks mobilitas), yang dicirikan dengan parameter, seperti :
 - Dari panjang jalan kabupaten 756.480 km, tahun 2005 jalan dengan kondisi baik baru mencapai 293 Km, kondisi rusak berat 143,131 km, Kondisi rusak sedang 146,299 km, dan kondisi rusak ringan 174,050 km. Kerusakan berat, sedang dan ringan pada umumnya tersebar pada jalur yang menghubungkan antar kecamatan.
 - Beberapa ruas jalan di perkotaan khususnya di kecamatan Jatinangor dan ibu kota Kabupaten kapasitasnya sudah kurang memadai hal ini dicirikan dengan nilai VCR rata-rata diatas nilai 0,6.
- b. Ketersediaan air permukaan pada 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Sumedang (DAS Cimanuk, DAS Citarum dan DAS Cipunagara) terdapat ketidakseimbangan yang sangat besar antara musim penghujan dan musim kemarau. Hal ini menyebabkan terjadinya kelimpahan air yang sangat banyak di musim penghujan dan defisit di musim kemarau. Sedangkan yang menyangkut keberadaan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi, kondisinya masih belum memadai, yang dicirikan dengan adanya beberapa masalah seperti :
 - Jaringan irigasi teknis kondisinya sudah mengalami degradasi dari jumlah irigasi yang ada di Kabupaten Sumedang sebanyak 844 buah, pada tahun 2005 irigasi dengan kondisi rusak berat sebanyak 355 buah, kondisi rusak sedang 185 buah dan kondisi rusak ringan 344 buah.
 - Fluktuasi air yang masih tinggi antara musim hujan dengan musim kemarau.
 - Kondisi sumber-sumber air permukaan seperti sungai dan situ banyak yang terdegradasi, sehingga fungsi layanannya sudah terjadi penurunan.
 - Layanan jaringan yang kurang optimal, sehingga indeks penanaman tidak merata di setiap wilayah kecamatan.
- c. Cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah, hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa wilayah yang masih merupakan "blank spot". Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah perkotaan angka teledensitasnya sudah tinggi (>10), sedangkan untuk beberapa

kecamatan kondisi teledensitasnya masih rendah yaitu dibawah 5 (< 5). Sementara untuk layanan jasa telepon nirkabel/telepon seluler, untuk sarana pendukung penguat sinyal dibangun BTS (Base Transmission Station). Sampai dengan tahun 2005, di Kabupaten Sumedang terdapat 16 titik BTS, yang tersebar di Kecamatan Jatinangor, Conggeang, Sumedang Utara, Tanjungkerta, Ujungjaya, Tomo, Darmaraja, Buahdua, Wado, Rancakalong dan Jatigede.

- d. Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat, sejalan dengan pertumbuhan sektor industri dan sektor-sektor lain, namun sesuai dengan sebaran penduduk dan tingkat aktivitas ekonomi, kebutuhan listrik tidak merata. Pasokan kebutuhan listrik untuk Kabupaten Sumedang berasal dari Sistem Ketenagalistrikan Jawa Bali dan pengelolaannya dilakukan oleh PT.PLN P3B (Persero) Region Jawa Barat. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk dan kenyataan bahwa jumlah pelanggan di Kabupaten Sumedang relatif besar. Pelayanan listrik PLN baru mencapai 95% dari total permintaan sambungan listrik seluruh Kabupaten Sumedang.
- e. Pada tahun 2005 rumah tangga di Kabupaten Sumedang yang telah memiliki rumah sudah mencapai 98%, sehingga masih terdapat sekitar 2% rumah tangga yang kebutuhan rumahnya belum terpenuhi (backlog). Dari jumlah rumahtangga yang sudah memiliki rumah, masih terdapat 8014 rumah yang tidak layak huni, dengan melalui melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni telah dilakukan perbaikan kualitas rumah sebanyak 700 rumah.
- f. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi baik yang terdapat di kawasan perkotaan maupun perdesaan masih rendah. Sampai tahun 2005, cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Sumedang baru mencapai 28%, Kondisi yang sama juga terjadi pada cakupan pelayanan sanitasi, serta sarana prasarana pengelolaan persampahan bagi permukiman perkotaan.
- g. Sampai tahun 2005, Kabupaten Sumedang memiliki satu tempat pembuangan sampah akhir di Desa Cibeureum Kecamatan Cimalaka dengan kapasitas 3.500.000 m³, dengan menggunakan sistem open dumping.

8. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Sumber daya kewilayahan harus dikelola secara bijaksana untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Ketersediaan rencana tata ruang yang aplikatif dan partisipatif memegang peranan penting dalam pemanfaatan ruang termasuk

sebagai instrumen dalam perijinan investasi yang senantiasa sinergis antara RTRW Kabupaten, Provinsi dan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992. Dalam melaksanakan amanat peraturan dimaksud Kabupaten Sumedang dengan luas wilayah \pm 152.220 ha yang terdiri dari 26 kecamatan dan 277 desa dan kelurahan, sampai dengan akhir tahun 2005 telah ada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dijabarkan kedalam rencana tata ruang kecamatan serta kawasan strategis. Adapun kecamatan yang telah memiliki rencana tata ruang sebanyak 10 kecamatan yaitu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Pamulihan, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Paseh, Wado, Darmaraja, Situraja dan Tomo atau 42,31% yang meliputi desa dan kelurahan sebanyak 62 atau 52,54% dari 118 desa dan kelurahan di 11 kecamatan atau 22,38% dari 277 desa dan kelurahan. Dalam upaya sinergitas dengan rencana strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat terutama rencana pembangunan Waduk Jatigede, bandar udara Kertajati Majalengka dan Jalan Tol Cisumdawu telah disusun rencana tata ruang koridor jalan tol Cisumdawu tahap satu, rencana tata ruang lainnya yang merupakan kawasan strategis di Kabupaten Sumedang adalah Rencana Detail Tata Ruang Zona Industri Ujungjaya, Rencana Detail Tata Ruang Zona Industri Cikeruh-Cimanggung serta Rencana Umum Kawasan Tertentu Perguruan Tinggi Jatinangor. Hal ini pun tidak terlepas dari upaya pengendalian pertumbuhan wilayah bagian barat yang relatif cepat dan mendorong pertumbuhan wilayah di bagian timur dan wilayah lainnya. Dalam meningkatkan pemerataan pertumbuhan wilayah melalui sistem perwilayahan yang terbagi menjadi 5 yaitu :

1. WP Tanjungsari, terdiri dari Kecamatan Tanjungsari, Jatinangor, Rancakalong, Pamulihan, Sukasari dan Cimanggung dengan pusatnya di Tanjungsari.
 2. WP Darmaraja, terdiri dari Kecamatan Darmaraja, Wado, Cibugel, Jatinunggal, Cisitu, Situraja dengan pusatnya di Darmaraja.
 3. WP Sumedang Kota, terdiri dari Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimalaka, Cisarua, Paseh dan Ganeas dengan pusatnya di Kota Sumedang.
 4. WP Buahdua, terdiri dari Kecamatan Buahdua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Surian dan Conggeang dengan pusatnya di Buahdua.
 5. WP Tomo, terdiri dari Kecamatan Tomo, Jatigede dan Ujungjaya pusatnya di Tomo.
- Kesenjangan pembangunan antar wilayah muncul akibat adanya pertumbuhan wilayah yang sangat berbeda antar wilayah, dimana kawasan pendidikan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari dan Kawasan ibukota Kabupaten Sumedang (Kecamatan Sumedang Utara

dan Sumedang Selatan) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sementara beberapa daerah lainnya belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang, telah menyebabkan tingginya tingkat urbanisasi, pada keempat wilayah kecamatan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi ini adalah semakin meluasnya perkembangan fisik perkotaan ke wilayah pusat kota serta Kawasan Pendidikan Jatinangor dan menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan, menurunnya kualitas lingkungan, daya dukung dan tampung lingkungan, pemusatan arus pergerakan dari wilayah pinggiran ke pusat kota, dan meningkatnya konversi lahan pertanian ke lahan terbangun di wilayah tersebut. Kondisi ini dirasakan justru semakin membebani wilayah tersebut. Dari aspek penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang terutama terjadi di kawasan perkotaan telah menyebabkan terjadinya pergeseran penggunaan lahan terbangun yang cukup besar. Pada tahun 2000 penggunaan lahan untuk sawah sebesar 22,60%, pertanian lahan kering 7,68%, kebun 24,83%, hutan 30,37%, permukiman 6,55%, industri 0,26% dan sisanya berupa perairan dan tanah kosong dan lainnya.

9. Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sumedang pada tahun 2005 sebanyak 46.506 KK antara lain akibat terjadinya kenaikan BBM, tidak terserapnya angkatan kerja dan terbatasnya penyediaan lapangan kerja dengan kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin meningkat.
10. Terkait dengan sektor ekonomi dan sumberdaya alam tidak terlepas dari sumber pembiayaan pembangunan dalam APBD dan PAD Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu tahun 1995-2005 terus mengalami peningkatan, baik pada jumlah APBD maupun pada jumlah PAD. Pada tahun 1995 APBD Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 40.750.734.863 dengan PAD sebesar Rp. 6.798.463.595 Pada tahun 2000 APBD sebesar Rp. 115.017.539.001 dengan PAD sebesar Rp. 17.836.583.393 dan pada tahun 2005 APBD Sumedang mencapai Rp 492.436.373.341 dengan PAD sebesar Rp 58.669.239.115.

2.1.4. Sosial Budaya dan Politik

Pembangunan sosial budaya dan politik di Kabupaten Sumedang, meliputi bidang sosial, budaya, politik serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

a. Sosial Budaya

Perkembangan pembangunan pada bidang sosial budaya di Kabupaten Sumedang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil. Untuk mengetahui pencapaian kualitas kehidupan masyarakat tersebut, sementara ini dilakukan melalui pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditambah laju pertumbuhan ekonomi atau struktur ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang terjadi. Berdasarkan parameter tersebut, salah satu sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Sumedang dalam jangka menengah (Renstrada 2003-2008) telah menargetkan tercapainya IPM sebesar 73 pada tahun 2008, pengurangan tingkat kemiskinan 1,25% pertahunnya, dan pengurangan tingkat pengangguran 2,8% pertahunnya. Berdasarkan perkembangannya, pencapaian IPM pada tahun 2005 adalah sebesar 71,40 poin dengan rincian indeks kesehatan sebesar 71,40 poin, indeks pendidikan sebesar 83,30 poin, indeks daya beli sebesar 59,16 poin. Pencapaian indeks komposit IPM ini telah mengalami peningkatan secara bertahap sejak tahun 1999 mencapai 66,60 poin, dimana tahun sebelumnya (sebelum krisis) yaitu tahun 1996 sempat mencapai 70,10 poin. Apabila dibandingkan pencapaian IPM ini dengan rata-rata IPM Jawa Barat (2002-2004) capaian Indeks Daya Beli masih berada di bawah rata-rata Jawa Barat, sedangkan untuk Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan berada di atas rata-rata Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam 5 tahun terakhir telah memfokuskan arah pembangunannya pada pembangunan sumberdaya manusia, dimana Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator utama pembangunan daerah menunjukkan kinerja yang terus membaik. Dalam kurun waktu 2003-2004, IPM Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan, dimana untuk tahun 2003 adalah 69,67 poin pada tahun 2004 meningkat menjadi 70,65 poin, dan pada tahun 2005 IPM Kabupaten Sumedang mencapai 71,40 poin. Peningkatan IPM tidak lepas dari kontribusi ketiga komponen yaitu indeks peluang hidup sebesar 71,57 tahun, indeks pendidikan sebesar 83,30 poin dan indeks daya beli sebesar 59,34 poin. Pencapaian IPM sebesar 71,40 poin masih jauh dari harapan kita semua sehingga masih diperlukan upaya keras untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan, derajat pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun serta memperluas kesempatan kerja bagi penduduk dengan menciptakan peningkatan daya saing.
2. Pembangunan bidang agama yang berlangsung sepanjang 1995-2005, masih berorientasi pada pembangunan fisik material, dan belum maksimal memberikan nilai tambah dalam pengamalan ajaran agama di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Sementara itu apabila dilihat dari kualitas kehidupan umat beragama di Sumedang, tercipta suatu kondisi

yang harmonis dan kondusif serta toleran baik antara sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama. Intensitas komunikasi antara sesama alim ulama, tokoh agama dan pemerintah baik intern maupun antar umat beragama, berjalan dengan dinamis melalui dialog-dialog, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun difasilitasi oleh pemerintah. Salah satu indikatornya bahwa di Sumedang tidak terjadi konflik intern umat beragama, antar umat beragama dan dengan pemerintah.

3. Pembangunan pendidikan yang berlangsung sepanjang kurun waktu 1995-2005 masih dititikberatkan pada aspek pemenuhan aksesibilitas dan pemerataan. Hal tersebut telah ditunjukkan dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi anak usia sekolah, pengembangan pendidikan luar sekolah, serta peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga pendidik. Sementara itu aspek kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum secara optimal tertangani. Rendahnya penanganan aspek kualitas dan relevansi pendidikan ditunjukkan dengan rendahnya kualitas lulusan terutama lulusan pendidikan menengah dan kejuruan, proses dan muatan pembelajaran yang belum memenuhi kebutuhan, serta kualifikasi tenaga pendidik yang belum berdasarkan kompetensi. Rendahnya kualitas aspek tata kelola pendidikan ditunjukkan dengan birokrasi manajemen pelayanan pendidikan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal, serta data dan informasi yang belum terkelola secara profesional dan berbasis teknologi maju. Kondisi pembangunan pendidikan sampai tahun 2005 dapat digambarkan sebagai berikut :
 - a. Angka partisipasi pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan sederajat sebesar 103,80% dan Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI mencapai 90,10%; SLTP 51,70%; dan SLTA 25,30%.
 - b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,87 tahun.
 - c. Angka buta huruf, 3,55%, menunjukkan penurunan 1,28%. Jika dilihat dari jenis kelamin maka persentase perempuan yang buta huruf lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yaitu 6,40 % berbanding 3,00%.
 - d. Kondisi Sekolah Dasar yang Rusak Berat mencapai 8.601 lokal dan Rusak Ringan sebanyak 7.937 lokal.
 - e. Jumlah siswa SD/MI yang terancam drop out (DO) sebanyak 15,59%, dan siswa SLTP/MTs sebanyak 42,40% atau sekitar 5.622 orang.
4. Pembangunan bidang kesehatan yang berlangsung sejak tahun 1995 sampai dengan 2005 menunjukkan peningkatan yang dapat dilihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya angka kematian balita,

menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, meningkatnya kesadaran masyarakat dan melaksanakan keluarga berencana yang lebih berorientasi pada pengaturan kelahiran yang aman dan sehat serta menurunnya angka kurang gizi pada balita. Upaya memberdayakan masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan terus ditingkatkan pada periode 1995 sampai 2000 melalui pondok bersalin desa (polindes), wahana kesehatan dasar, santri raksa desa dan gerakan sayang ibu. Pada periode 2001-2005 dilakukan pembangunan bidang kesehatan dengan mengupayakan peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat serta desa siaga. Angka Harapan Hidup periode tahun 2000-2005 rata-rata sebesar 67,10, sedangkan jumlah kematian bayi periode tahun 2000-2005 adalah 444 orang per tahun. Adapun angka kematian ibu pada waktu melahirkan rata-rata 18 orang. Perkembangan periode tahun 2000-2005 untuk status gizi buruk adalah 0,88%, status gizi kurang adalah 11,84%, status gizi baik adalah 84,62%, sedangkan untuk gizi lebih adalah 2,09%.

5. Masalah kesehatan masyarakat dihadapkan pada beban ganda penyakit yaitu masih banyaknya penyakit infeksi menular yang harus ditangani meningkatnya penyakit tidak menular dan masih tingginya kesenjangan status kesehatan serta rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan.
6. Pemberdayaan perempuan telah menunjukkan peningkatan yang tergambarkan dari semakin membaiknya kualitas hidup perempuan, pada tahun 2005 Angka Melek Huruf (AMH) perempuan mencapai 97,16, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan mencapai 69,97 pada dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 7,36 tahun. Keberhasilan tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap peningkatan peran perempuan yang secara kualitatif dan kuantitatif di seluruh sektor dan aspek pembangunan. Peningkatan pemberdayaan perempuan tersebut antara lain bisa terlihat dari data tahun 2005 yang menunjukkan Jumlah perempuan yang bekerja sebagai PNS sebanyak 5.225 orang, sebagai karyawan tetap sebanyak 38.370 orang, sebagai wirausaha sebanyak 108.929 orang, telah berpendidikan sarjana mencapai 3.721 orang, jumlah organisasi perempuan sebanyak 36 buah dan dalam keanggotaan DPRD dari 45 orang anggota DPRD Kabupaten Sumédang, sebanyak 5 orang diantaranya adalah kaum perempuan. Selain itu dilakukan upaya perlindungan, baik berkaitan dengan perlindungan atas hak-hak dasar kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki, yang pada akhirnya mendorong kesadaran individual dan kolektif masyarakat untuk mencegah dan menghentikan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, trafficking dan eksploitasi kaum perempuan. Peran dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan

masih rendah yang ditandai oleh Indeks Pembangunan Gender dan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan. Upaya pengarusutamaan gender ini belum sepenuhnya dapat diaktualisasikan, terlihat dari implementasi dan hasil kegiatan yang belum optimal dan pemahaman gender belum merata baik di pemerintahan, legislatif, swasta, LSM, perguruan tinggi maupun masyarakat.

7. Pemuda merupakan sumber daya manusia yang harus dikembangkan dan sebagai tulang punggung bangsa serta sebagai penerus cita-cita bangsa, yang harus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya. Berdasarkan data statistik Susenas tahun 2005, jumlah penduduk usia 15-34 tahun di Sumedang adalah 64% dari jumlah penduduk kabupaten. Dengan potensi tersebut, Pemerintah Sumedang harus mampu mengelola sumber daya manusia tersebut menjadi manusia berkualitas. Akan tetapi, tetap dibarengi dengan memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai terhadap penduduk usia lanjut (lansia). Secara kuantitas Pemuda di Kabupaten Sumedang memiliki potensi melalui organisasi kepemudaan sebagai wahana dalam mengembangkan bakat dan kemampuan. Para pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan merupakan salah satu elemen masyarakat potensial untuk menjadi generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri. Kader-kader yang handal sangat dibutuhkan kontribusinya dalam pembangunan. Sumedang memiliki sejarah yang cukup baik dalam kancah nasional. Prestasi olahraga Sumedang cukup diperhitungkan oleh Kabupaten lainnya baik dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) maupun dalam kejuaraan daerah berbagai cabang olahraga. Tidak sedikit atlet-atlet asal Sumedang yang memiliki prestasi baik di tingkat internasional. Pembangunan sarana prasarana olahraga di Kabupaten Sumedang sangat variatif, namun di wilayah kecamatan masih kurang dalam rangka mengembangkan olahraga sebagai sarana pembangkit kreativitas masyarakat.
8. Pembangunan seni dan budaya di Sumedang didasari oleh berbagai kebijakan yang terkait dengan penguatan identitas budaya. Pembangunan seni dan budaya sepanjang periode 1995-2005 berlangsung sesuai dengan kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembangunan budaya di Kabupaten Sumedang ditujukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah yang memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya asing. Pembangunan budaya ditujukan untuk mengembangkan nilai-nilai baru yang dapat mendorong keberhasilan pembangunan daerah seperti nilai-nilai entrepreneur.

Pengembangan seni budaya di Sumedang diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian. Integritas pembangunan seni budaya dan pariwisata merupakan sesuatu yang lazim dan perkembangannya ke depan akan berhubungan erat dengan kualitas kondisi alam dan lingkungan, politik dan keamanan, serta sarana dan prasarana. Pentingnya pembangunan kebudayaan ditujukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jatidiri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya asing. Sebagai gambaran potensi seni budaya hingga tahun 2005, antara lain berupa museum sebanyak 1 buah, prasarana seni sebanyak 21 buah, pembimbing kesenian sebanyak 138 orang, kelompok kesenian tradisional sebanyak 935 buah, kelompok kesenian pentas sebanyak 86 buah, nilai tradisi masyarakat 34 buah, jumlah seniman sebanyak 2.930 orang dan cagar budaya sebanyak 178 buah.

9. Sepanjang periode 1995-2005 pembangunan bidang kesejahteraan sosial menunjukkan perubahan dan perbaikan orientasi, dari pembangunan fisik material menjadi pembangunan yang lebih mampu mencapai harmoni dengan pembangunan mental spiritual. Pada tahun 2005 terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebesar 9%. Masalah kesejahteraan sosial diantaranya adalah pengemis, gelandangan, anak jalanan, tuna susila, kekerasan pada anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), trafficking pada anak dan perempuan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Terkait dengan pengembangan partisipasi sosial masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, pengembangan peran lembaga lembaga swadaya masyarakat, karang taruna, dan panti rehabilitasi sosial dikelola secara lebih profesional dan komprehensif.

b. Politik

Proses demokratisasi diawali dengan adanya krisis ekonomi tahun 1997 yang mendorong reformasi dalam segala bidang termasuk sistem politik. Perubahan politik secara besar-besaran terjadi dan tercermin pula dalam kehidupan di Kabupaten Sumedang. Untuk dan atas nama demokratisasi, proses perubahan politik berlangsung sedemikian cepat ke arah kebebasan. Perubahan tersebut membawa dampak positif yang mendorong paradigma penyelenggaraan pembangunan partisipatoris, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Kendati demikian, proses perubahan politik yang berorientasi pada penetapan ulang sistem penyelenggaraan negara tersebut telah berkembang nyaris tanpa kendali, karena

diterjemahkan sebagai proses pembebasan. Kondisi berkembangnya euforia yang mencerminkan kegamaan menghadapi perubahan. Euforia yang tanpa kendali menjadikan pembangunan politik masih terus mencari bentuk yang tepat.

Partai politik belum mampu dengan optimal berperan sebagai pencerdas masyarakat, sehingga partai politik masih mendorong masyarakat untuk memilih profil calon dan partai daripada program baik dalam pemilu maupun dalam pilkada. Dalam masa pencarian bentuk dan keseimbangan baru, pemerintah dan masyarakat Sumedang telah berhasil menciptakan situasi yang kondusif, yang dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 dan 2004, baik dalam Pemilihan Presiden maupun pemilihan anggota DPR dan DPD serta DPRD. Sepanjang kurun waktu 2005-2025 secara normal akan terjadi penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2008, 2013, 2018 dan 2023.

Perkembangan demokrasi juga ditandai dengan adanya perubahan hubungan pusat dan daerah dan perbedaan posisi legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan. Perubahan tersebut didasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri dan mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya juga mengatur hubungan kewenangan antar tingkat pemerintahan.

Sebagai bagian dari demokratisasi, hubungan pusat dengan daerah berubah secara drastis sejak diberlakukan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah. Saat ini, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah belum terlaksana secara optimal serta menghadapi beberapa kendala, yang disebabkan adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan dari berbagai tingkat pemerintahan serta belum lengkapnya peraturan untuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah secara komprehensif. Demikian pula hubungan lembaga legislatif dengan eksekutif, telah menempatkan kedudukan legislatif berada di atas lembaga eksekutif, melalui mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Kondisi demikian menyebabkan terjadinya proses komunikasi politik yang kurang harmonis dalam hubungan kerja legislatif dan eksekutif, karena dalam prakteknya seringkali terjadi penghentian kepala daerah oleh tekanan kepentingan politik jangka pendek, yang mendorong ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun pada akhirnya melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan kembali rekonstruksi hubungan eksekutif dan legislatif daerah yang lebih menempatkan kedudukan keduanya dalam kesejajaran peran dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Pemilihan Umum pada tahun 2004 untuk keanggotaan DPR, DPD, DPRD diselenggarakan dengan penggabungan antara sistem proporsional terbuka dan daerah pemilihan yang telah dilaksanakan cukup efektif dan menghasilkan keanggotaan DPRD Kabupaten Sumedang sebanyak 45 orang dari perwakilan 7 partai politik. Demikian pula penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden telah berlangsung dengan tertib.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Publikasi dan kajian ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga penelitian baik yang dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta yang berlokasi di Kabupaten Sumedang belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh sumberdaya iptek masih terbatas, mekanisme intermediasi yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna belum sanggup memberikan hasil yang signifikan dan budaya pemanfaatan iptek di masyarakat belum berkembang serta belum terkaitnya hasil kajian dengan kebutuhan riil masyarakat. Namun demikian keberadaan kawasan perguruan tinggi Jatinangor yang didalamnya terdapat IPDN, UNPAD, UNWIM dan IKOPIN serta perguruan tinggi lainnya telah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan iptek di Kabupaten Sumedang.

2.1.5. Pemerintahan

a. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum ditentukan oleh perkembangan kriminalitas, termasuk terkendali dan berkurangnya kecenderungan friksi dan konflik sosial berdasarkan perkembangan kepentingan masyarakat yang beragam. Penciptaan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, juga berkaitan dengan konsistensi dalam penegakan hukum, dan supremasi hukum yang dihormati. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan memiliki peran sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam menyelenggarakan pembangunan. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum guna mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, tertib dan damai, telah diupayakan peningkatan peran masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini juga dapat diakibatkan oleh lemahnya penegakan peraturan daerah.

b. Hukum

Pembangunan hukum di daerah selama ini lebih difokuskan pada perlindungan kepada masyarakat guna menjamin terlaksanakannya pemenuhan hak azasi manusia yang saling

menghormati perilaku individu dalam kebebasan bersama. Permasalahan dalam pembangunan hukum di daerah, umumnya berkaitan dengan penegakkan hukum yang belum konsisten, tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, sarana dan prasarana hukum yang belum memadai serta ketersediaan hukum daerah yang belum memenuhi semua kebutuhan hukum masyarakat daerah. Pembangunan hukum dalam rangka mewujudkan good governance diukur berdasarkan orientasi pemerintahan yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik dengan tolok ukur penegakan hukum/efisiensi yudisial.

Fungsi penegakan hukum diperlukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuatnya. Konsistensi dalam penegakan hukum dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemegang otoritas. Dengan demikian pembangunan hukum berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai aturan dan penegakan aturan tersebut guna melindungi hak azasi manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan penegakan hukum secara berkeadilan.

Secara makro, dinamika pembinaan hukum dapat dilihat dari intensitas penyusunan dan pembentukan produk hukum serta peningkatan prasarana dan sarana hukum. Perkembangan penyusunan dan pembentukan hukum daerah pada tahun 2005 terdiri dari berbentuk Peraturan Daerah yang disetujui DPRD sebanyak 12 buah, Peraturan Bupati 49 buah, Keputusan Bupati 269 buah, Instruksi Bupati 2 buah, Perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan/ Lembaga/ Swasta dan antar daerah sebanyak 12 buah.

c. Aparatur

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis governance didasarkan pada orientasi pemerintah dengan tolok ukur efisiensi birokrasi yang terdiri dari jumlah unit kerja, jumlah aparat, dan kinerja pelayanan. Secara umum fungsi pemerintahan mencakup fungsi regulasi, fungsi pembangunan/ pemberdayaan, dan fungsi pelayanan publik. Hal-hal tersebut akan optimal bila didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik dari sisi sumberdaya manusia, dana, maupun sarana dan prasarana agar kualitas pelayanan publik makin meningkat.

Aparatur pemerintah memegang peran sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan aparatur pemerintah daerah tidak hanya untuk menggerakkan manajemen dan organisasi pemerintahan, melainkan juga dalam keseluruhan konteks demokratisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka perencanaan sumberdaya termasuk di dalamnya pengembangan organisasi, sistem renumerasi, sistem perencanaan dan pe-

ngembangan karir menjadi penting dan prioritas, khususnya dalam mewujudkan kondisi pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan.

Bertolak dari pengalaman empirik penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun 1995-2005 kelemahan yang dihadapi adalah struktur lembaga pemerintah daerah masih cukup besar, aparatur yang belum didayagunakan secara optimal, dan pelayanan publik masih belum memuaskan. Dalam pemberdayaan aparatur permasalahan yang dihadapi adalah belum berlangsungnya proses perencanaan karir sesuai dengan kebutuhan organisasi dan manajemen pemerintahan. Pola mutasi berbasis promosi dan pertukaran antar fungsi untuk memperkaya pengalaman aparatur masih terkendala oleh proses regenerasi yang lamban. Dalam situasi demikian berlangsung proses pengembangan karir aparatur masih dipengaruhi oleh berbagai keputusan berdasarkan political appointy dan penilaian subyektif.

2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

2.2.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Sumedang sampai tahun 2025 adalah melestarikan dan memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan termasuk penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan, perlindungan dan penanganan air tanah dan air permukaan, mata air, mitigasi dan penanganan bencana alam, iklim mikro (kaitan dengan global warming). Bersamaan dengan itu keterlibatan seluruh potensi masyarakat untuk melakukan berbagai penguatan bagi terwujudnya perilaku dan budaya sadar serta ramah lingkungan perlu terus ditumbuhkembangkan dengan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan menjadi tumpuan bagi upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup ke depan. Dukungan pembiayaan penataan lingkungan yang memadai merupakan aspek penting yang selama ini sulit dilaksanakan karena terkait kerjasama dan komitmen semua pihak. Pola pembiayaan pengelolaan lingkungan saat ini masih bertumpu kepada pemerintah daerah serta Provinsi dan pusat. Keterbatasan anggaran pemerintah tidak akan mampu menanggulangi upaya pengelolaan lingkungan kondisi saat ini, melihat kondisi laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang masih tinggi. Tantangan ke depan adalah mengedepankan penerapan prinsip yang mencemari dan merusak harus membayar (Polluters Pay Principle), pola role sharing hulu hilir atau pusat-daerah, bagi hasil pajak untuk lingkungan, dana lingkungan, serta pola pembiayaan pemulihan lingkungan lainnya. Pengawasan secara kontinyu dan penegakan hukum secara konsisten harus diwujudkan, untuk mendukung upaya pemulihan daya dukung lingkungan lebih maksimal disertai pemahaman resiko bencana diintegrasikan pada proses pembangunan, guna meminimalisasi resiko dan kerugian akibat bencana.

2.2.2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang akan mencapai 1,11 juta pada tahun 2010, yang berarti tiap tahun rata-rata terjadi kenaikan jumlah penduduk sekitar 111 ribu jiwa. Namun demikian jumlah penduduk dan pertumbuhannya diperkirakan akan mencapai 1,26 juta pada tahun 2020 dan pada tahun 2025 mencapai 1,43 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini akan memberi implikasi bahwa jumlah konsumen potensial juga akan terus meningkat. Jumlah penduduk yang besar itu tersebar tidak merata secara geografis. Sebagian besar penduduk Kabupaten Sumedang bermukim di beberapa lokasi sentra yaitu Jatinangor, Tanjungsari, Sumedang Utara, Sumedang Selatan dan Cimalaka. Hal ini sebagian disebabkan oleh adanya pusat kegiatan pembangunan dengan basis pendidikan, industri, perdagangan, dan permukiman, serta tersedianya berbagai prasarana pembangunan di lokasi tersebut.

Ketidakmerataan geografis tidak harus berarti adanya ketimpangan secara ekonomis, namun usaha pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan daerah dengan pendekatan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi lokal diharapkan akan memberikan peluang usaha untuk berbagai usaha terutama pengangkutan dan komunikasi. Penduduk akan pindah ke daerah yang menjanjikan suatu penghidupan yang lebih baik. Pembangunan daerah yang menekankan pada penciptaan pusat pertumbuhan dan kegiatan, maka penduduk di daerah yang padat penduduk akan berusaha mencari pusat pertumbuhan tersebut. Kelancaran sarana komunikasi dan pengangkutan akan memungkinkan penduduk memanfaatkan berbagai hasil pusat pertumbuhan. Jasa komunikasi serta pengangkutan akan digunakan oleh para penduduk. Mereka mau membayar untuk memperoleh jasa itu karena mereka berharap mendapat hasil yang lebih besar daripada biaya yang mereka keluarkan. Usaha pemukiman sekitar pusat pertumbuhan merupakan usaha yang menarik, jenis pemukiman yang sesuai dengan jenis pekerja yang dibutuhkan pada lokasi pusat pertumbuhan tersebut. Pekerja dengan kualifikasi tinggi yang berpendapatan tinggi, akan dicirikan pula oleh permukiman yang lebih baik. Bila pusat pertumbuhan tersebut masih lebih banyak membutuhkan pekerja dengan keterampilan rendah, maka kecenderungannya adalah pembangunan pemukiman sederhana.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang terus meningkat, terutama di pusat-pusat pertumbuhan dan kegiatan. Di Jatinangor, kepadatan penduduk meningkat dari 2.130 penduduk per km persegi di tahun 1995 menjadi 3.452 penduduk per km persegi di tahun 2005. Kepadatan penduduk menimbulkan kesulitan penyediaan air bersih, pengelolaan layanan publik yang lebih memadai, bahkan membentuk kawasan dengan fungsi perkotaan.

Jumlah penduduk yang besar di suatu kabupaten akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam membuat dan menetapkan kebijakan pembangunan, terutama bagi penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Luas wilayah kabupaten akan menentukan kepadatan penduduknya, dimana rata-rata hunian pada setiap km²nya beserta sebaran antar wilayahnya akan menggambarkan peluang dan tantangan yang dihadapi penduduk dalam mengakses berbagai layanan dan kebutuhan baik aspek ekonomi, interaksi sosial, transportasi dan komunikasi, maupun motif pergerakan penduduk dalam melakukan berbagai kegiatannya.

Di masa depan proporsi manula akan meningkat. Jumlahnya sekarang memang relatif masih kecil. Tetapi, dalam 20-30 tahun mendatang akan membesar. Untuk penduduk yang sekarang berusia 35 tahun ke atas, sudah waktunya untuk memikirkan kondisi ekonomi sosial manula. Waktu 20-30 tahun bukan waktu yang lama untuk suatu perencanaan pembangunan, bahkan mungkin Kabupaten Sumedang menjadi daerah tujuan masa tua, masa pensiun dari daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang dengan jumlah penduduknya akan menghadapi tantangan untuk mengendalikan pertumbuhan, persebaran, kualitas penduduk serta penyediaan kebutuhan bagi kehidupan penduduk di masa mendatang.

2.2.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pembangunan ekonomi dalam 20 tahun mendatang dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu tahun 2005-2025 diperkirakan akan berada pada kisaran 4-6% pada akhir perencanaan.

Struktur ekonomi ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta pertanian. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi Indonesia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.

Beberapa tantangan spesifik di Kabupaten Sumedang yang tengah dan akan dihadapi di masa datang berkaitan dengan pembangunan perekonomian yaitu:

1. Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi/ penyampaian inovasi, yaitu kesenjangan relevansi antara penghasil pengetahuan/teknologi dengan pengguna, masih terbatasnya pola hubungan dan transaksi bisnis maupun non bisnis antara berbagai aktor,

- serta asimetri/tidak ada keseimbangan perolehan informasi hasil inovasi diantara para pelaku dan keterbatasan dalam dukungan interaksi dalam sistem inovasi.
2. Persoalan budaya inovasi, yaitu masih rendahnya penghargaan/apresiasi masyarakat terhadap pentingnya semangat kreativitas/inovasi dan kewirausahaan, belum berkembangnya pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan dan sistem pendidikan yang belum mendukung perkembangan inovasi, sehingga mengakibatkan keterbatasan SDM berbakat. Masih rendahnya mobilitas dan interaksi dari dan antar perkembangan kewirausahaan dalam masyarakat, serta kelemahan di lingkungan pemerintahan yang umumnya juga belum menghargai pentingnya kewirausahaan dan inovasi.
 3. Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial, yaitu keragaman aktivitas bisnis yang belum mengarah pada berkembangnya kompetensi bagi pembentukan potensi keunggulan, struktur dan keterkaitan dalam bisnis beserta aktivitas non-bisnis pendukungnya yang masih lemah, masih rendahnya kepeloporan dalam pemajuan inovasi dan difusinya, relatif rendahnya perkembangan/regenerasi perusahaan-perusahaan baru terutama pada UKM untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan peluang dari kemajuan/perkembangan yang terjadi.
 4. Berbagai kelemahan pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesiapan Sumedang (pada tataran daerah maupun kecamatan dan desa) untuk berperan di arena global beserta beragam kecenderungan perubahan yang berkembang untuk dapat meminimalisasi dampak negatif dalam memaksimalkan kemanfaatan bagi masyarakat, misalnya isue-isue di sekitar lingkungan hidup, standarisasi, pelanggaran HAM, pembajakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), konsistensi dalam pengarus utamaan gender, serta mempekerjakan anak sebagai tenaga kerja, terutama di sektor informal.

Selain tantangan spesifik sebagaimana disebutkan diatas, beberapa isue atau tantangan yang diperkirakan berpengaruh bagi peningkatan kapasitas ekonomi di Kabupaten Sumedang. Setidaknya terdapat lima kecenderungan umum yang perlu dicermati, yaitu :

1. Globalisasi, dimana aspek teknis semakin penting dalam perdagangan internasional, seperti aspek standarisasi produk, aspek hak kekayaan intelektual (HAKI), dan kelestarian lingkungan. Dimana faktor yang terkait dengan pengetahuan/inovasi semakin menentukan daya saing dan posisi tawar dalam perdagangan/perekonomian secara global. Disisi lain, kecenderungan global membuka peluang untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas internasional. Peluang tersebut antara lain adalah investasi, hubungan perdagangan, dan kerjasama internasional untuk meningkatkan kapasitas inovatif sesuai kebutuhannya. Sedangkan dari sisi ancaman adalah kapitalisme global

yang disebabkan keterikatan Indonesia dengan lembaga/organisasi dunia seperti WTO, IMF dan World Bank, implikasinya adalah liberalisme pertanian, yaitu perjanjian tarif komoditi, yang mulai terasa dampaknya, misalkan pupuk, impor beras. Liberalisme air, yaitu akan hilangnya ketahanan pangan karena petani kecil akan kesulitan mendapatkan air untuk pertaniannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan yang bersifat global memiliki dua sisi yang perlu dicermati, yakni munculnya peluang, terutama tentang makin pentingnya teknologi dan pengetahuan dalam bersaing secara global, serta semakin munculnya kesadaran akan faktor lokal yang makin berpengaruh. Dalam konteks ini, Kabupaten Sumedang memiliki potensi untuk menjawab tantangan ini, yakni keunggulan lokal berupa terdapatnya "knowledge pool" sehingga memiliki potensi itu memberi muatan pengetahuan pada semua produknya.

2. Perkembangan Iptek, dimana perkembangan iptek yang semakin cepat berdampak pada perubahan pasar dan persaingan. Sebagai contoh terdapat pada siklus produk yang makin pendek, pasar makin terfragmentasi dan persaingan makin ketat. Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk menggali dan mengembangkan potensi terbaik agar memiliki keunggulan kompetitif yang khas. Pengetahuan dan keterampilan beserta aktivitas produktif dalam sistem inovasi yang mendukung hal tersebut di atas semakin perlu dikembangkan. Akibat yang paling berdampak besar pada perkembangan iptek dunia adalah makin pendeknya siklus produk. Tantangan bagi Kabupaten Sumedang adalah bagaimana dapat melakukan antisipasi terhadap kecenderungan perubahan ini dengan lebih cerdas. Prakarsa untuk melakukan pemantauan pasar internasional merupakan salah satu langkah diantara strategi yang perlu diupayakan.
3. Perkembangan ekonomi jaringan, dimana akibat perkembangan tuntutan pasar dan semakin ketatnya persaingan bisnis, mendorong pelaku usaha untuk semakin berspesialisasi dalam bidang kompetensinya. Karena itu, terjadi pergeseran dalam aktivitas usaha dari semuanya dikerjakan sendiri menjadi masing-masing mengerjakan sesuai keahliannya (keunggulan kompetensinya) untuk kemudian saling melengkapi melalui suatu jaringan keterkaitan usaha. Kecenderungan spesialisasi dan jaringan ini perlu dijawab dengan landasan yang tepat. Kabupaten Sumedang menetapkan bahwa landasan jaringan akan digunakan untuk mewakili ekonomi jaringan ini, sehingga tantangannya adalah bagaimana memperkuat jaringan dengan tema yang terfokus.
4. Pengendalian pasar modern dan semi modern yang mampu bermitra dengan pasar tradisional.

5. Kecenderungan tumpuan atas kekhasan faktor lokal, di mana semakin diyakini bahwa keunggulan daya saing global semakin ditentukan oleh faktor lokal yang antara lain mencakup pengetahuan lokal, motivasi, sumber daya alam lokal, sumber daya manusia, religi dan sosial budaya. Bahwa faktor lokal yang semakin menentukan daya saing bukanlah semata faktor alamiah, melainkan faktor yang harus dikembangkan sehingga terspesialisasikan dan memiliki keunggulan spesifik. Keunikan faktor lokal tantangannya adalah bagaimana menyusun roadmapping untuk membawa keunikan lokal menjadi produk unggul di kemudian hari. Faktor lokal yang perlu dipertimbangkan adalah yang bertumpu pada keragaman hayati (misalnya) karena Kabupaten Sumedang memiliki potensi yang tinggi, juga sudah mulai kesadaran dengan HAKI di bidang ini, misal HAKI varietas tanaman untuk Ubi Cilembu, Sawo, dan Jeruk Cikoneng. Tantangan peningkatan investasi ke depan tidak lepas dari stabilitas keamanan dan ketertiban yang diiringi oleh kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur wilayah, ketersediaan dan kepastian tata guna lahan, perijinan, perburuhan dan masalah lainnya. Pemecahan masalah tersebut sangat menentukan keberhasilan untuk menarik investasi ke Sumedang. Upaya promosi investasi juga menjadi faktor lainnya yang menentukan untuk menarik investasi baru. Beberapa permasalahan dalam pembangunan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sumedang, yaitu :
1. Permasalahan utama dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Sumedang adalah skala usaha tani yang semakin mengecil, sehingga kurang kompetitif, rendahnya akses terhadap teknologi baru, permodalan, informasi, dan pasar serta kurangnya koordinasi antar sub sistem dalam sistem agribisnis. Pada sisi lain adanya konversi lahan usaha tani ke non-pertanian menyebabkan terjadi konsentrasi kapital di non-pertanian yang semakin menekan posisi rebut tawar sektor pertanian. Pengembangan sarana dan prasarana yang ada relatif belum dapat memperbaiki kinerja pertanian, peningkatan kesempatan kerja maupun pengurangan kemiskinan. Pada level pemerintahan atau perumus kebijakan, permasalahan utama yang dihadapi adalah cara pandang yang masih parsial, sehingga timbul masalah koordinasi dan sinkronisasi antar subsistem dalam sistem pertanian. Berdasarkan permasalahan di atas, pengembangan pertanian diarahkan menjadi penggerak perekonomian daerah dan menjadi bagian integral dari arah dan pembangunan. Tingkat kebutuhan konsumsi pangan di masa yang akan datang untuk beberapa komoditi relatif meningkat sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk serta proyeksi tingkat konsumsi per kapita per tahun.
 2. Upaya untuk mendukung pencapaian pertumbuhan sektor industri jangka panjang, diarahkan pada penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing industri yang

berkelanjutan. Pembangunan industri yang berkelanjutan didasarkan pada industri yang berbasis pada sumber daya alam lokal dan penguasaan teknologi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian diharapkan sektor industri dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan dan tangguh di pasar domestik dan internasional. Untuk mendukung pertumbuhan industri 20 tahun ke depan selain memanfaatkan kawasan industri Cimanggung, pemerintah Sumedang telah menyiapkan lahan kawasan industri di wilayah Ujungjaya yang diperuntukan bagi industri yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan termasuk didalamnya industri energi alternatif biodiesel dan bioetanol dari tanaman jarak atau lainnya. Pengembangan industri di arahkan pada penguatan keterkaitan mata rantai industri, peningkatan mutu, peningkatan sumber daya industri (SDA dan SDM), mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan pengembangan diversifikasi dan inovasi produk. Dengan fokus pengembangan diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas industri, baik industri besar, menengah dan kecil, pengembangan inovasi produk, peningkatan kualitas mutu baik produk maupun sumber daya manusia.

3. Tantangan ke depan untuk pengembangan **perdagangan** di Sumedang adalah di fokuskan peningkatan akses pasar ekspor yang diikuti dengan peningkatan kualitas dan desain produk, serta memperluas kawasan dan tujuan ekspor. Kelemahan Kerangka umum, antara lain keinginan adanya kondisi yang lebih kondusif bagi sektor swasta untuk bergerak dan berkembang; diantaranya perlu dilakukan reformasi lingkungan kewenangan formal mencakup aplikasi regulasi yang menghambat, mengurangi kelemahan lingkungan legal (yaitu belum terkoordinasi diantara lembaga perizinan usaha), dan kelemahan infrastruktur, telekomunikasi dan transportasi yang menghubungkan dengan sentra-sentra produktif, lebih meningkatkan jalinan hubungan baik antar lembaga yang ada, mengurangi administrasi perizinan usaha yang masih birokratif, sanksi terhadap penyimpangan peraturan yang telah ada, ada pembiayaan/pendanaan APBD terhadap inovasi. Selain itu, untuk penguatan perdagangan dalam negeri di tujukan peningkatan sarana distribusi barang, penguatan pasar domestik, menggalakkan pemberdayaan produk dalam negeri dan peningkatan perlindungan konsumen.
4. Penguatan **Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis

penelitian dan teknologi serta pasar. Perkembangan koperasi di Sumedang menunjukkan peningkatan jika diukur dari jumlah, yaitu sebanyak 519 koperasi dan 76,49% diantaranya berada pada katagori aktif. Namun demikian, masih banyak koperasi yang tidak aktif, hal ini tercermin dari rendahnya nilai transaksi peranggota koperasi jauh di bawah Rp.100.000,- perbulan. Tantangan lainnya secara kelembagaan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Koperasi dan usaha mikro kecil menengah telah tumbuh dan berkembang, namun laju pertumbuhan dan perkembangannya masih lambat, oleh karena itu tantangan utama yang dihadapi pengembangan usaha ke depan adalah mempercepat upaya memperkuat struktur dunia usaha yang berintikan koperasi dan usaha mikro kecil menengah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi baik di pedesaan maupun diperkotaan guna mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan lapangan usaha.
- b. Pemulihan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah melalui upaya penyelamatan, pemulihan, stabilitas serta pertumbuhan koperasi dan usaha mikro kecil menengah sehingga mampu menjadi basis perekonomian.
- c. Koperasi dan usaha mikro kecil menengah dituntut untuk memiliki usaha yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri, dengan memegang teguh prinsip dan norma koperasi serta mampu menjadi unsur kekuatan ekonomi rakyat dan sebagai tulang punggung pembangunan perekonomian di daerah.
- d. Koperasi dan usaha mikro kecil menengah dituntut mampu meningkatkan daya saingnya sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar, dan mendiversifikasi produknya di pasar baik tingkat lokal, regional maupun nasional.

Sedangkan kendala yang sering dihadapi oleh koperasi dan usaha mikro kecil menengah adalah :

- a. Rendahnya kualitas SDM pengelola Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang membawa pengaruh terhadap efisiensi dan produktifitas usaha, dan selanjutnya membatasi daya saing dan kemampuan dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan penyebaran yang kurang merata, belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap perkembangan iklim usaha koperasi dan usaha mikro serta belum mantapnya pembinaan usaha.
- c. Terbatasnya akses terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, informasi, pasar produk (kemasan ,promosi) dan lokasi usaha serta jaringan kerja dan kemitraan.

- d. Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi juga masih merupakan kendala pengembangan koperasi di Kabupaten Sumedang.
 - e. Tingkat kepedulian pembina dari instansi/badan terkait relatif masih belum maksimal terhadap upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, di sisi lain tuntutan politik dari masyarakat untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro kecil menengah relatif tinggi.
 - f. Kelemahan Kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM, yaitu karena belum berfungsinya lembaga-lembaga litbang universitas yang ada sebagaimana yang diperlukan oleh masyarakat, kelemahan daya dukung iptek/litbang yang relevan bagi pengembangan potensi, keterbatasan antara lain dalam mengakses, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan/teknologi untuk meningkatkan daya saing bisnisnya. Sehingga penyerapan iptek dan litbang oleh UKM dirasakan masih rendah.
5. Tantangan pengembangan pariwisata 20 tahun mendatang adalah mewujudkan Kabupaten Sumedang sebagai daerah kunjungan wisata utama bagi wisata Budaya. Guna mendukung pertumbuhan wisatawan ke Kabupaten Sumedang, pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan daya tarik wisata alam (ecotourism) dan budaya yang didukung oleh kompetensi sumberdaya manusia, pengelola daya tarik wisata dan fasilitas penunjang wisata. Guna mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumedang, diharapkan dapat didukung oleh penataan produk dan daya tarik wisata (ODTW) dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata. Adapun pengembangan produk dan daya tarik wisata di fokuskan pada pengembangan daya tarik wisata yang berakar pada alam dan budaya Sumedang, sehingga dapat mencerminkan jati diri masyarakat Sumedang. Sedangkan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia difokuskan pada meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran seluruh pengelola daya tarik wisata dan fasilitas penunjang wisata termasuk masyarakat terhadap pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Community Based Development).
6. Sarana dan Prasarana
- Dalam menghadapi 20 tahun ke depan, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Sumedang dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah adalah:
- a. Pengembangan jaringan jalan arteri didukung jaringan jalan kolektor dan lokal yang efektif dan efisien, baik berupa jaringan jalan tol maupun non tol, yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan wilayah kecamatan

- b. Perlunya pengaturan hirarki peran serta fungsi jaringan transportasi yang lebih baik, agar menghasilkan pergerakan yang efisiensi dan efektif yang didukung oleh sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas.
- c. Normalisasi dan pengembangan jaringan drainase jalan
- d. Pengembangan jalur penjalan kaki (trotoar)
- e. Normalisasi dan pengembangan jembatan.
- f. Meminimalisasi terjadinya bencana alam antara lain longsor, banjir, kekeringan bahkan kebakaran.
- g. Mengembangkan infrastruktur penampung air baku, baik yang bersipat buatan maupun alami.
- h. Normalisasi, rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi.
- i. Mengembangkan jaringan air kotor/limbah.
- j. Mengembangkan pengelolaan persampahan.
- k. Mengembangkan jaringan listrik pedesaan termasuk memanfaatkan energi listrik alternatif.
- l. Mengembangkan jaringan energi lainnya sebagai upaya mengganti sumber energi minyak bumi.
- m. Mengembangkan jaringan telekomunikasi baik menggunakan jaringan kabel maupun nirkabel, terutama pada daerah yang teledensitasnya masih rendah.
- n. Mengembangkan sarana dan prasarana pemukiman termasuk penangananan utilitas umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan, berupa pengembangan rumah susun, meningkatkan jaringan air bersih, pengembangan jaringan air kotor/limbah rumah tangga, pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga dan peningkatan sanitasi lingkungan.
- o. Meningkatkan partisipasi dan kemitraan dunia usaha serta masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai.

7. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Tantangan jangka panjang yang harus diantisipasi adalah menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Penyusunan rencana tata ruang kawasan (kecamatan) yang belum memiliki rencana tata ruang, merevisi rencana tata ruang termasuk yang habis masa berlakunya, konsistensi pemanfaatan ruang serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang yang didukung dengan peningkatan kualitas aparatur penataan ruang. Selain itu, regulasi yang jelas agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Perlu pula

diantisipasi agar kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat dikurangi. Tantangan lainnya adalah bagaimana menyediakan kebutuhan lahan untuk kawasan lindung dan budidaya (budidaya pertanian, permukiman, industri, perdagangan, pusat pemerintahan, dan lainnya) serta ruang terbuka hijau yang memadai dengan fungsi kawasan lindung yang harus dipertahankan keberadaannya, serta tetap memperhatikan prinsip pembangunan wilayah yang serasi, seimbang dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan pemerataan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Sumedang. Selain itu pengelolaan kawasan perkotaan akan menjadi tantangan tersendiri dalam mengatur aktivitas perkotaan dan memenuhi segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Rencana pembangunan waduk Jatigede, ruas jalan tol Cisumdawu yang semakin mendekatkan jarak antara Metropolitan Bandung dengan Kabupaten Sumedang serta Cirebon. Ditambah rencana zona industri Ujungjaya yang sinergis dengan rencana pembangunan Bandara Internasional Kertajati, akan menuntut ketersediaan berbagai fasilitas pertumbuhan pembangunan di kota-kota tersebut dan wilayah pinggirannya.

8. Masalah kemiskinan sangat berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan merupakan tantangan yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu upaya penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang sehingga diharapkan pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin terus berkurang. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang merupakan kelompok usia produktif perlu disikapi dengan berbagai upaya untuk membuka kesempatan kerja yang lebih besar, meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, mengurangi permasalahan perburuhan dalam rangka mengendalikan jumlah pengangguran yang diprediksi akan semakin besar di masa mendatang.
9. Kemampuan anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD walaupun jumlahnya makin meningkat setiap tahunnya akan tetapi belum mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan anggaran dalam penanganan lingkup permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah daerah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan difokuskan untuk mengatasi berbagai permasalahan mendasar dan kebutuhan masyarakat yang menjadi tugas pemerintah daerah serta mendorong peningkatan partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan.

2.2.4. Sosial Budaya dan Politik

a. Sosial Budaya

Tantangan yang dihadapi untuk mencapai target nilai IPM Jawa Barat 79,6 poin pada tahun 2010 diperlukan rata-rata kenaikan 0,8% per tahun bukanlah hal yang mudah, perlu keterlibatan dan peran aktif semua pihak. Target Kabupaten Sumedang dalam pencapaian IPM pada tahun 2010 sebesar 75,47 poin. Untuk Indeks Pendidikan tahun 2010 target dari Provinsi Jawa Barat 87,40 poin, sedangkan Kabupaten Sumedang menargetkan 87,00 poin, dimana pada tahun 2008 di targetkan sebesar 85,52 poin, sedangkan indeks kesehatan target Provinsi Jawa Barat 82,10 poin, Kabupaten Sumedang mentargetkan 74,21 poin, dimana pada tahun 2008 ditargetkan 73,28 poin.

Target Provinsi Jawa Barat dalam indeks daya beli pada tahun 2010 adalah 69,3 poin dan tahun 2008 sebesar 63,5 poin sedangkan Kabupaten Sumedang sebesar 65,21 poin dan sebesar 62,79 poin. Memperhatikan fakta tersebut, tantangan peningkatan IPM pada masa yang akan datang, bahwa masing-masing indikator harus mendapatkan perhatian secara berkelanjutan oleh semua stakeholders.

Untuk mencapai target diperlukan langkah strategis yang dituangkan dalam program yang langsung menyentuh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya adalah sasaran dan waktu yang tepat mengarah pada peningkatan sumberdaya manusia seperti peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat.

1. Agama, pembangunan bidang agama dalam 20 tahun ke depan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat, baik organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan seluruh potensi umat beragama dalam menciptakan kondisi kehidupan beragama secara fungsional dan proporsional. Terkait semakin deras pengaruh globalisasi baik arus informasi dan pengaruh budaya asing melalui berbagai media, perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Pembangunan bidang keagamaan harus didorong untuk menciptakan kondisi terbaik bagi berlangsungnya proses pendidikan dan pengamalan nilai-nilai agama di lingkungan keluarga, masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Pembangunan bidang keagamaan juga diharapkan memberi prioritas bagi pemberdayaan potensi ekonomi umat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keagamaan yang dianut. Dengan demikian kondisi pembangunan keagamaan di penghujung tahun 2025 mampu memberi ruh bagi semakin mantapnya keimanan, ketakwaan, dan akhlak di seluruh lapisan masyarakat. Disamping pembangunan fisik material yang harus tetap dilanjutkan dalam menghadapi tahun 2020, juga diharapkan dapat terwujud :

- a. Peningkatan kualitas pendidikan agama di sekolah umum dan di perguruan.
 - b. Pengembangan kehidupan keluarga sakinah.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah keagamaan.
 - d. Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
 - e. Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar rasa saling hormat menghormati.
 - f. Terwujudnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah (silih asih, silih asah, silih asuh, pikeun ngawujudkeun anu cageur, bageur, bener, pinter tur singer).
 - g. Terjadinya partisipasi masyarakat Sumedang yang tinggi dengan penuh keikhlasan dalam mewujudkan baldah thayyibah warabbun ghafur.
2. Pendidikan, pembangunan bidang pendidikan perlu didorong untuk mencapai dimensi kualitatif sumberdaya manusia yang selain memiliki keterampilan berdasarkan pencapaian proses akademis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta moralitas dan juga memiliki komitmen terhadap perkembangan kemajuan masyarakat. Hal tersebut mengandung makna, bahwa pembangunan pendidikan semestinya dilandasi oleh tujuan, kebijakan dan sasaran yang membawa dampak positif secara langsung terhadap kinerja pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya, pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses transformasi nilai kehidupan dalam tata kehidupan berperadaban global. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, kualitas lulusan harus menjadi perhatian utama karena semakin tingginya persaingan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin kompetitifnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Demikian pula halnya dengan pemberdayaan lembaga pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, menjadi kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Dalam hal pengembangan sains dan teknologi, peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) juga perlu mendapatkan penanganan yang optimal. Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan metodologi dan teknologi dalam bidang pendidikan, perlu dilakukan antisipasi melalui pengembangan inovasi dan sistem tata kelola pendidikan, pemberdayaan profesi guru dengan meningkatkan kompetensinya, penyempurnaan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih tanggap teknologi, serta pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dilandasi oleh nilai-nilai kecerdasan dan kearifan budaya lokal. Hal tersebut mengandung makna, bahwa pembangunan pendidikan semestinya dilandasi oleh tujuan, kebijakan, dan sasaran yang membawa dampak positif secara langsung terhadap kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itu, meski secara

kuantitatif, pembangunan pendidikan harus mampu memenuhi standar dan ukuran formal pencapaian jenjang pendidikan bagi penduduk melalui pengembangan program wajib belajar 12 tahun, juga harus mampu menguatkan daya hidup masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dirinya, keluarganya, lingkungan sosialnya, dan masyarakat pada umumnya.

3. Kesehatan, masalah kesehatan masyarakat di Sumedang masih dihadapkan pada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak mengingat tantangan dan kondisi ke depan dengan segala perubahan-perubahan yang ada, selain masih harus menghadapi penyakit infeksi berbasis lingkungan juga harus menghadapi penyakit-penyakit tidak menular (degeneratif). Adanya kesenjangan status kesehatan dan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, penggunaan teknologi di bidang kesehatan menjadi tantangan bagi para stakeholder untuk mengatasinya. Perlu juga menjadi perhatian, adalah bagaimana pemerintah memfasilitasi masyarakat. Memperhatikan kondisi tersebut, dalam kurun waktu 2005-2025, pembangunan kesehatan lebih didorong pada tercapainya perilaku sehat dan lingkungan yang sehat baik fisik maupun sosial yang mendukung produktivitas masyarakat. Untuk mencapai keadaan tersebut, pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, penggunaan teknologi maju yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan manajemen kesehatan yang berkualitas. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan epidemiologi penyakit, perubahan lingkungan dengan semangat kemitraan, tuntutan jaman, sosial budaya setempat dan juga peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif. Selain itu, perlu juga didorong kepada berlangsungnya paradigma hidup sehat yang terintegrasi pada pencapaian kualitas hidup penduduk yang sehat dan berumur panjang.
4. Pemberdayaan Perempuan, berbagai upaya telah dilakukan khususnya upaya perlindungan terhadap kaum perempuan, namun peran dan kualitas perempuan di berbagai bidang pembangunan belum maksimal. Tantangan yang harus dihadapi adalah masih adanya stigma di masyarakat terutama di perdesaan dimana perempuan masih lemah, porsi perempuan adalah rumah, perempuan merupakan objek kaum laki-laki dan diskriminasi perlakuan di dunia usaha maupun politik. Oleh karena itu, kesetaraan gender menjadi masalah penting dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sehingga kondisi yang diarahkan pada tahun 2025 adalah peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan gender, advokasi/hukum, peningkatan kualitas hidup dan peran

- perempuan, penurunan tindak kekerasan, penurunan eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai sektor serta penguatan kelembagaan, kelompok masyarakat (khususnya perempuan) dan jaringan kemitraan pengarusutamaan gender.
5. Kepemudaan, kondisi kepemudaan di Sumedang memiliki potensi dan peluang yang cukup besar, sekaligus kelemahan dan tantangan yang tidak ringan. Potensi dalam hal ini adalah jumlah yang cukup besar, pola pikir dan semangat yang tinggi. Kelemahannya adalah kondisi perkembangan psikologis pemuda yang belum stabil, masih pada tahap pencarian identitas diri dan lemahnya sandaran nilai serta norma. Tantangan yang muncul di kalangan pemuda adalah masa depan yang penuh kompetisi baik keterampilan, idealisme maupun nilai budaya. Sementara peluang yang dimiliki oleh pemuda adalah ruang gerak atau ekspresi idealisme yang terbuka, baik konteks sistem nilai, sistem pendidikan, sistem ekonomi maupun sistem politik. Dalam aspek keolahragaan, Sumedang memiliki potensi olahraga yang baik, namun masih banyak cabang-cabang olahraga yang belum menyumbangkan medali dalam event-event yang berskala regional dan nasional. Ini berarti bahwa pembinaan olahraga prestasi di Sumedang belum dilakukan secara optimal. Untuk itu perlu diperhatikan peran organisasi-organisasi masing-masing cabang olahraga untuk melakukan pembinaan yang komprehensif agar seluruh potensi olahraga di Sumedang dapat dikembangkan secara berjenjang dengan baik termasuk bagi penduduk lansia. Prioritas utaman adalah melanjutkan proses pembangunan bidang olah raga yang telah berlangsung selama ini, serta penguatan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam mengembangkan sarana, prasarana, dan kegiatan olah raga.
 6. Kebudayaan, kondisi kebudayaan dua dasawarsa ke depan akan menghadapi berbagai perubahan sebagai imbas perubahan global sekaligus menjadi tantangan bagi terwujudnya kondisi yang diinginkan sampai dengan tahun 2025. Nilai-nilai tradisional, peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman, pada masa yang akan datang perkembangannya akan semakin bertentangan dengan arus perubahan teknologi informasi dan era komputerisasi, sehingga diperlukan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap keempat aspek kebudayaan tersebut, agar terhindar dari kepunahan dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan budaya daerah. Untuk itu perlu upaya konkrit yang berkesinambungan terhadap pelestarian dan pengembangan bahasa dan budaya daerah. Berbagai upaya yang perlu dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap menurunnya nilai-nilai luhur budaya di masyarakat, perlu dilakukan sejak dini. Diterapkannya muatan pendidikan nilai-nilai budaya daerah terhadap anak usia dini dan usia pendidikan dasar, akan menjadi salah satu strategi yang optimal. Selan itu diperlukan upaya revitalisasi

terhadap lembaga/organisasi kesenian dan kebudayaan yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak swasta, juga upaya pelestarian cagar dan desa budaya, dan pengembangan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kondisi kebudayaan yang diharapkan terwujud sampai dengan tahun 2025 adalah :

- a. Perlindungan terhadap nilai-nilai tradisional, peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman, sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan budaya daerah.
 - b. Tingginya penghargaan dan apresiasi masyarakat pada bahasa dan budaya daerah, serta semakin kuatnya sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya daerah.
 - c. Semakin banyaknya ruang publik untuk pertunjukan dan apresiasi seni dan budaya.
 - d. Semakin mantapnya perlindungan hak cipta para pelaku seni, bahasa dan budaya.
7. Kesejahteraan sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) perlu dilakukan berbagai upaya, diantaranya pengembangan peran lembaga swadaya masyarakat, karang taruna, dan panti rehabilitasi sosial agar dikelola secara lebih profesional dan komprehensif. Tantangan ke depan, beban permasalahan kesejahteraan sosial akan semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial seperti menipisnya nilai budaya dan agama, meningkatnya ekses dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi, serta terjadinya bencana sosial dan alam. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam kurun waktu 2005-2025 taraf kesejahteraan sosial masyarakat diarahkan pada upaya pemberdayaan, pelayanan, pencegahan, rehabilitasi, pengembangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Disamping itu, penanggulangan PMKS menjadi PSKS (potensi kesejahteraan sosial) perlu diupayakan terus menerus melalui penggalan dan pendayagunaan potensi yang dimiliki, meningkatkan sarana dan prasarana, peningkatan mutu sekolah serta pelatihan/optimalisasi bagi organisasi/ lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta kondisi sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan norma-norma agama dan budaya.

b. Politik

Selama kurun waktu 2005-2025 diperlukan penyelenggaraan proses komunikasi massa, komunikasi sosial, dan komunikasi politik yang berorientasi pada penyelenggaraan proses demokratisasi yang harmonis. Pembangunan bidang komunikasi dan informasi tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kualitas pemahaman terhadap fungsi kelembagaan dan media

komunikasi. Secara fungsional, kelembagaan dan media komunikasi merupakan bagian integral dari keseluruhan masyarakat, oleh karenanya itu tunduk terhadap dimensi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Melihat tantangan perubahan yang dihadapi pembangunan Kabupaten Sumedang, diperlukan kualifikasi pemimpin daerah yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual untuk menggerakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang inovatif dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta visioner untuk menggerakkan perubahan dan pembaharuan dalam keseluruhan konteks pembangunan, serta egaliter untuk menggerakkan tata pikir, sikap, dan tindakan yang mampu menggerakkan proses demokratisasi yang “elegant” dan bermuara pada terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis. Demikian juga partai politik di harapkan dapat berperan melakukan pencerahan dan pencerdasan bagi kehidupan demokrasi khususnya bagi kader partai dan umumnya bagi masyarakat.

Proses dan mekanisme politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di masa mendatang adalah terciptanya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, damai, dan stabil. Karena itu, partisipasi warga dalam kehidupan politik dilaksanakan melalui sistem masyarakat madani yang egaliter dan terbuka terhadap perubahan.

c. Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan perubahan paradigma dari resource-based competitiveness menjadi knowledge-based competitiveness. Karena itu kemampuan suatu daerah untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor dalam berkompetisi di pasar global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka peningkatan kemampuan iptek, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang adalah meningkatkan kemampuan iptek yang ditunjang oleh SDM yang berkualitas, peningkatan sarana dan prasarana, serta pembiayaan menuju masyarakat berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pembangunan iptek 20 tahun mendatang, mengacu pada nilai-nilai luhur yaitu dapat dipertanggungjawabkan, prima, inovatif, berpandangan jauh ke depan serta berkelanjutan.

2.2.5. Pemerintahan

a. Ketentraman Dan Ketertiban Umum

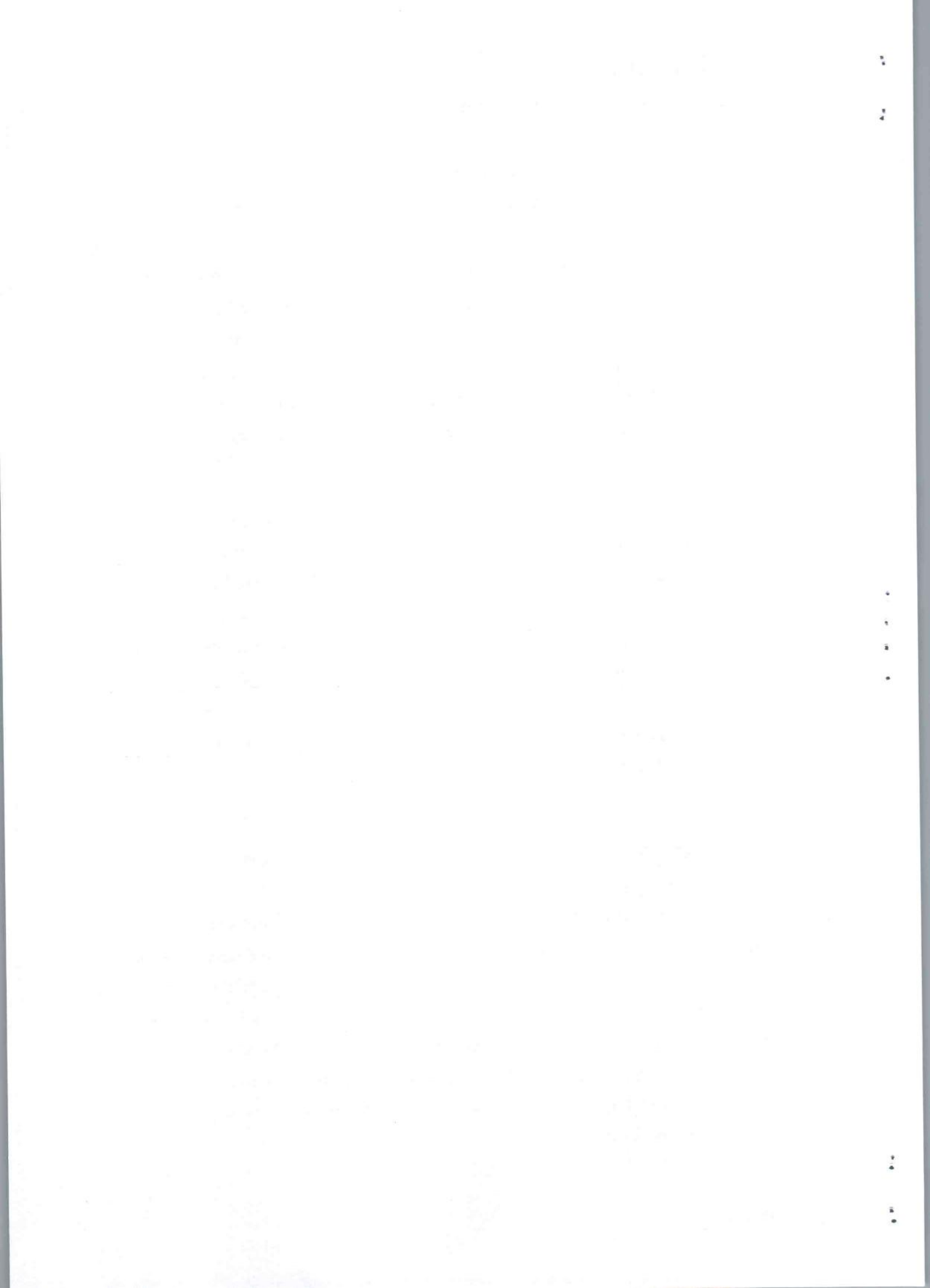
Potensi ancaman keamanan akan dihadapi dari terjadinya friksi dan konflik sosial terkait dengan menurunnya daya dukung lahan, air, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Selain itu juga dari lambannya pencapaian keseimbangan jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih akan berlangsung dengan pertumbuhan kriminalitas yang disebabkan masih besarnya pengangguran, akibat belum seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Upaya penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib melalui pengembangan motivasi hidup disiplin, berkaitan dengan pencapaian kondisi di berbagai sektor pembangunan, khususnya ekonomi dan politik, serta kemampuan melakukan proses transformasi terhadap berbagai nilai global yang berkembang sangat cepat.

b. Hukum

Menyikapi perkembangan pembangunan dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam pembangunan sosial dan ekonomi, pembangunan hukum daerah berpotensi mengembangkan berbagai alternatif untuk menguatkan sistem hukum yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual, cyberlaw, hukum agama yang melandasi penyelenggaraan zakat dan perkawinan, dan penguatan terhadap kepentingan pragmatis hukum tata usaha. Pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat berbasis kesadaran hukum menjadi penentu berlangsungnya proses tata hukum daerah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Terutama dalam mendapatkan kepastian hukum untuk menjalankan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

c. Aparatur

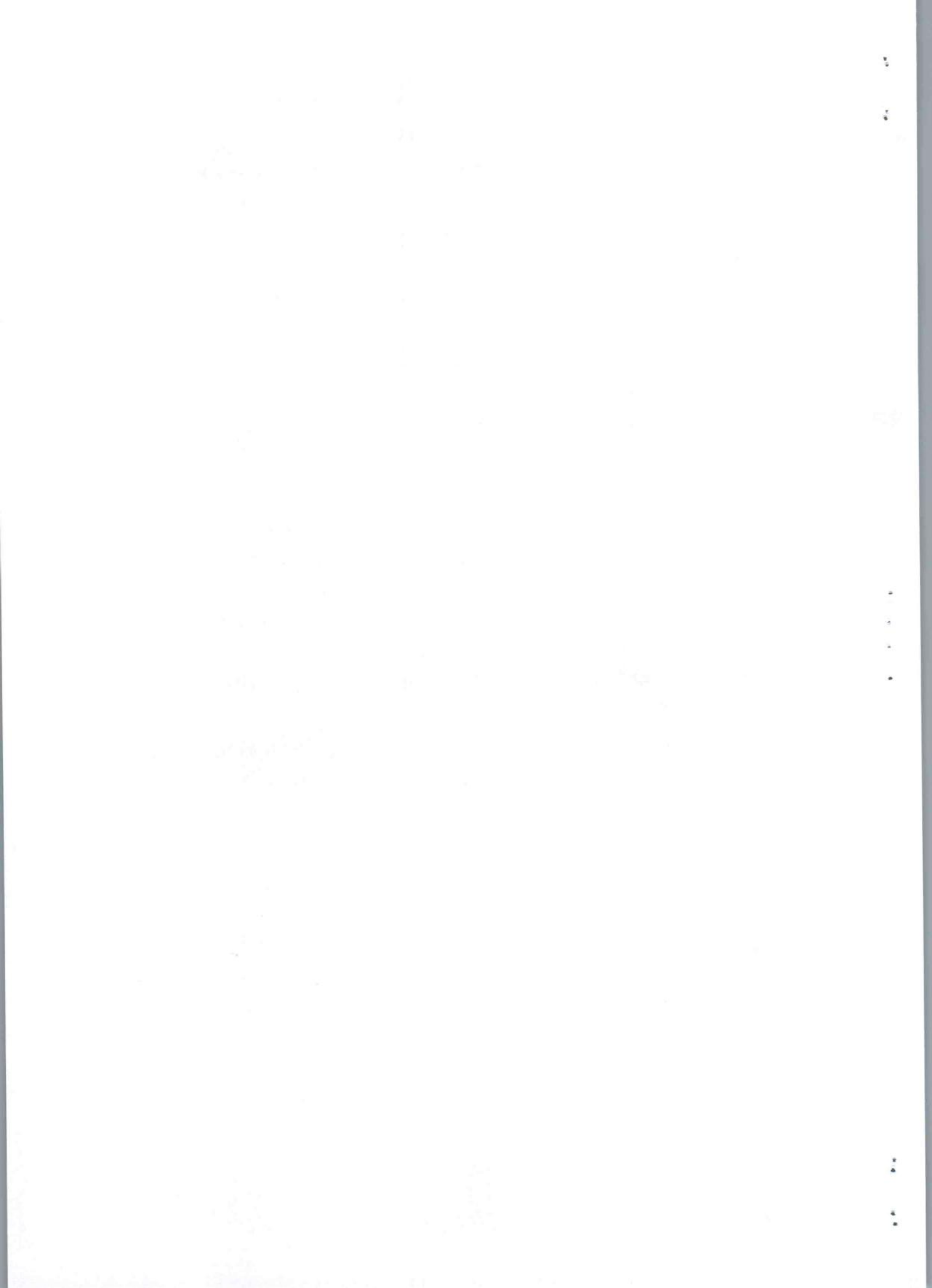
Tantangan terbesar yang dihadapi adalah menanggulangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh terjadinya disharmoni antar tingkat pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan kewenangan pemerintahan. Selain itu penyelenggaraan manajemen yang efektif dan efisien juga menjadi tantangan yang besar. Birokrasi juga masih belum sederhana dan belum mengalami perubahan, untuk menghadapi demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Dengan adanya desentralisasi, aparatur dituntut untuk mengembangkan sumberdayanya agar lebih kreatif dalam mengembangkan daerahnya menuju kemandirian dan siap berkompetisi dengan daerah lain untuk menarik investasi. Kesiapan aparatur dalam mengantisipasi demokratisasi perlu ditingkatkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih sederhana, murah dan cepat.



2.3. Modal Dasar

Modal dasar pembangunan merupakan salah satu kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan daerah, antara lain :

1. Posisi geografis Kabupaten Sumedang yang terletak diantara pegunungan dengan berbagai kekayaan alamnya serta diapit oleh dua Pusat Kegiatan Nasional, yaitu Bandung dan Cirebon, menjadi lintasan arus penumpang dan barang regional, merupakan dasar dalam penetapan kebijakan daerah di berbagai bidang pembangunan.
2. Sumberdaya kekayaan alam termasuk didalamnya sumberdaya lahan dan sumberdaya air serta keanekaragaman hayati menjadi potensi pembangunan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan dan kemakmuran masyarakat.
3. Ketersediaan sumberdaya buatan yang dapat berfungsi sebagai daya tarik bagi investasi dan mempercepat proses pembangunan daerah.
4. Jumlah penduduk menjadi sumberdaya yang potensial dan produktif bagi pembangunan daerah.
5. Modal rohaniyah dan mental yaitu keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
6. Keragaman budaya lokal, kesenian tradisional, peninggalan sejarah dan objek wisata serta modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan.
7. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil akan menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan daya tarik dalam investasi.
8. Perkembangan politik era reformasi dan otonomi daerah telah memberikan perubahan yang mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.



BAB III

VISI DAN MISI

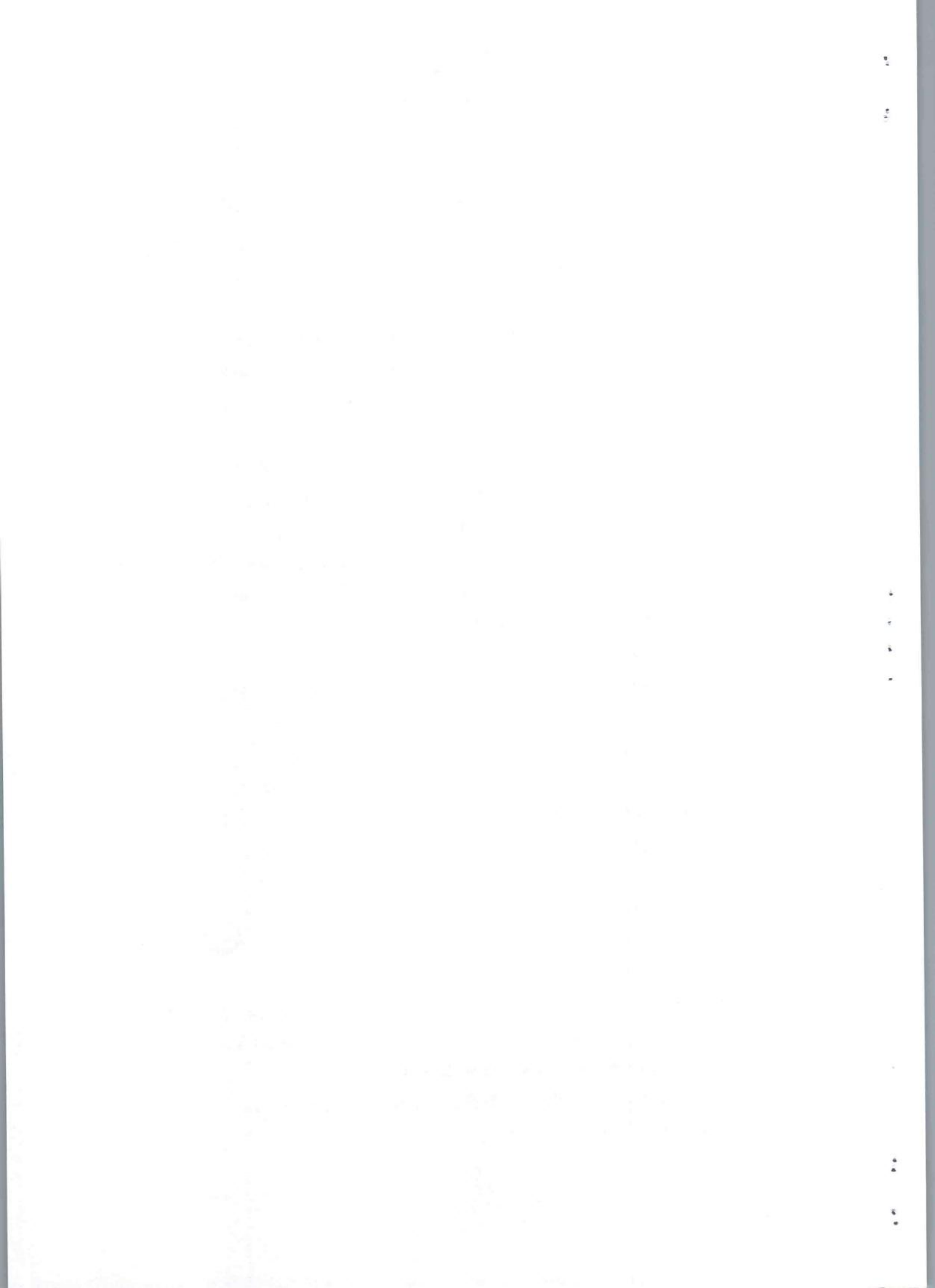
3.1. Visi Daerah

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan berbagai masukan dari berbagai pihak pada saat proses penyusunan RPJPD, maka visi pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 adalah "*KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025*". Visi tersebut dapat diringkas menjadi "*SUMEDANG SEHATI*", yang dapat diartikan sebagai kabupaten yang makin kokoh dan berdaya juang tinggi dalam membangun daerahnya dengan dilandasi orientasi masyarakat berupa:

1. Perilaku yang berpegang pada prinsip sauyunan, sareundeuk saigel, sabobot sapihanean. Maknanya adalah dalam lingkungan kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat, senantiasa mengedepankan kepuasaan dalam layanan pemerintahan dan pembangunan di berbagai bidang melalui pola kemitraan, permusyawarahan, transparansi, saling percaya serta senantiasa proporsional dalam mendistribusikan hak dan kewajiban diantara stakeholder pemerintahan guna mewujudkan kemajuan pembangunan daerah yang dikehendaki masyarakat daerah.
2. Masyarakat yang telah mengedepankan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam mengelola permasalahan dan kebutuhan masyarakat daerah.
3. Masyarakat yang makin kokoh dalam mewujudkan tanggungjawab untuk mendistribusikan kemakmuran daerah, antara kelompok ekonomi lemah (kaum dhuafa) atau miskin secara materi namun potensial untuk menopang kemajuan kelompok ekonomi kuat (kaum agnia) yang terus menunjukkan kesetiakawanan sosio-ekonominya untuk mengarahkan kaum ekonomi lemah menjadi produktif.
4. Meningkatnya pelayanan publik.

Kabupaten Sumedang yang *sejahtera* ditandai dengan kondisi kehidupan masyarakat Sumedang yang memenuhi standar kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan dan bermatapencarian layak serta jaminan keamanan dengan senantiasa mempertimbangkan kelestarian daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Kondisi ideal di **bidang pendidikan** ditunjukkan dari :

1. Meningkatnya tingkat pendidikan formal masyarakat yang dilihat dari target pendidikan dasar telah tuntas dan memasuki tahapan pendidikan menengah.



2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan di daerah yang berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat yang makin mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
3. Meningkatnya penguasaan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu mengimplementasikan dalam perikehidupan masyarakat daerah yang makin produktif.
4. Terwujudnya pendidikan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi ideal di **bidang kesehatan** ditunjukkan dari :

1. Terciptanya kondisi lingkungan sehat sesuai standar kesehatan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan sosial.
2. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan tidak memisahkan lokasi perdesaan dan perkotaan.
3. Terwujudnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang berkeadilan dan berdaya saing.
4. Terwujudnya stabilitas kehidupan sosial yang mendukung terciptanya perikehidupan masyarakat daerah yang tercermin dalam perilaku silih asah, silih asih dan silih asuh.
5. Terwujudnya keluarga sebagai basis persemaian nilai-nilai budaya, pendidikan dan kesehatan.

Kondisi ideal di **bidang mata pencaharian layak dan berkesinambungan** ditunjukkan dari :

1. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing serta keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan.
2. Makin kokohnya perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional, nasional dan internasional, berbasis pada upaya mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dalam mendayagunakan potensi agribisnis, pariwisata dan industri.
3. Meningkatnya akses yang lebih berkeadilan terhadap sumberdaya ekonomi bagi seluruh masyarakat Sumedang.
4. Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat Sumedang dengan tingkat harga yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatnya perlindungan dan regulasi pemerintah terhadap pelaku sosio ekonomi daerah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif.
6. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat yang ditopang oleh makin produktifnya pendayagunaan potensi agribisnis, pariwisata dan industri daerah.

7. Meningkatnya laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto yang berdampak terhadap penurunan kemiskinan.
8. Meningkatnya pendayagunaan dan pemanfaatan potensi agribisnis, pariwisata dan industri daerah yang selaras dengan kearifan sosial.
9. Meningkatnya ketersediaan dan kontribusi infrastruktur perekonomian daerah serta infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, sumberdaya air yang handal dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan skala regional dan nasional.
10. Meningkatnya partisipasi dan kemitraan dunia usaha serta masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai.
11. Terwujudnya pembangunan pemeliharaan infrastruktur yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi dan berkelanjutan antara kawasan lindung dan budidaya serta antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
13. Meningkatnya penyediaan lapangan pekerjaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing secara berkesinambungan berbasis pada keunggulan potensi daerah guna mendukung pembangunan.

Kabupaten Sumedang yang **agamis** ditandai dengan kondisi lingkungan kehidupan sosial yang makin dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa sesuai keyakinan masyarakat yang diakui dalam sistem keagamaan nasional, kondisi ideal kehidupan agamis ditunjukkan dari :

1. Meningkatkan jatidiri dan karakter masyarakat yang makin beriman dan bertakwa dalam keragaman keyakinan beragama dan beribadat yang dijamin kelangsungannya oleh pemerintah.
2. Menguatnya kemitraan dan tanggungjawab dalam pembangunan pendidikan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan di daerah.
3. Menguatnya kesalehan sosial masyarakat dan aparat pemerintah serta memperkokoh silaturahmi antar dan inter umat beragama untuk menguatkan pengamalan agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kabupaten Sumedang yang **demokratis** ditandai dengan kondisi lingkungan kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat yang makin dijiwai oleh supremasi dan kesadaran hukum, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, partisipasi masyarakat berlandaskan kesetaraan gender yang makin dewasa dalam proses penetapan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pewarisan nilai nilai kejuangan bangsa dan kearifan lokal masyarakat.

Kondisi ideal kehidupan demokratis ditunjukkan dari :

1. Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas Pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang proporsional.
2. Meningkatnya aksesibilitas, transparansi, pengawasan masyarakat dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang makin efisien dan efektif dan peningkatan pelayanan prima pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur dan efisiensi birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi yang makin mantap.
5. Terwujudnya kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif.
6. Terselenggaranya otonomi desa yang makin efektif.
7. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang lebih baik.

Dengan visi di atas, menjadikan corak masyarakat dan daerah Kabupaten Sumedang yang ingin diwujudkan pada tahun 2025 mendatang adalah daerah yang dihuni oleh masyarakat yang makin sejahtera, yang senantiasa bersikap arif dan berkemampuan produktif dan mempertimbangkan kesinambungan lingkungan hidup daerahnya, serta makin mengindahkan prasyarat terbangunannya tatanan masyarakat berkesadaran hukum tinggi guna mewujudkan sistem sosial dan politik yang demokratis. Untuk memperkuat kondisi sejahtera dan demokratis tersebut, maka diperlukan pula kelangsungan kehidupan agama yang akan menyeimbangkan kebutuhan ragawi dan ukhrowi, yang dibangun oleh penghormatan yang makin baik terhadap kesalehan sosial dan keragaman dalam keyakinan beragama dalam satu kesatuan sistem keagamaan nasional yang dilindungi Undang Undang Dasar 1945.

Guna mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Sumedang jangka panjang diperlukan pemahaman terhadap pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintahan daerah dalam mengelola fungsi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan yang kian variatif. Peletakkan tanggungjawab yang sepenuhnya terhadap para penyelenggara pemerintahan daerah, diyakini tidak mungkin lagi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis dan demokratis karena antar komponen tata kelola pemerintahan memiliki batas batas potensi keperansertaan, kontribusi serta keterbatasan. Harus menjadi kecenderungan positif bahwa mewujudkan masyarakat maju, yang ditandai kecerdasan (IQ, SQ, EQ), demokratisasi dan ketaatan dalam keyakinan agama dan kepercayaan dalam kehidupan sosial, akan mampu berjalan efektif manakala masyarakat dan potensi sosio ekonominya menjadi pencipta kemakmuran dan pemerintah daerah menjadi fungsi pemicu, penyeimbang serta pemberi jaminan kepastian hukum.

Dengan meletakkan paradigrama pemerintahan berlandaskan keseimbangan potensi elemen dalam tata kelola pemerintahan, maka fungsi stabilisasi, fungsi pertumbuhan ekonomi serta distribusi hasil pembangunan, akan menjadi segitiga agenda yang resiprokal antara pemerintah, dunia usaha serta komponen masyarakat daerah di Kabupaten Sumedang dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup di daerah.

3.2. Misi Daerah

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumedang 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Misi Pertama, **Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat**, adalah membangun masyarakat Sumedang yang berbudaya mulia dan mandiri yang memiliki akses terhadap pendidikan formal yang berkualitas, dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan mendorong kesetaraan gender, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi berdaya saing, mengutamakan pola hidup sehat sejahtera secara jasmani, rohani dan sosial, sehingga berada dalam kondisi stabil yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang dilandasi kearifan lokal, kesalehan sosial dengan mencerminkan pola perilaku silih asah, silih asih, silih asuh, akhirnya tercipta keluarga yang dapat menjadi tempat persemaian nilai budaya, pendidikan dan kesehatan.
2. Misi Kedua, **Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri**, adalah mengembangkan dan memperkuat keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional dan internasional, dengan berbasis pada upaya mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif, dan kooperatif dalam mendayagunakan potensi sosio ekonomi lokal terutama dalam agribisnis, pariwisata dan industri yang mengindahkan kearifan budaya lokal dan keseimbangan lingkungan hidup. Perkembangan ekonomi daerah didukung oleh kerjasama antara domain pemerintahan dalam penyediaan infrastruktur yang memadai, pemeliharaan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya serta antara kawasan perkotaan dan perdesaan, penciptaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdayasaing serta perlindungan regulasi pemerintahan terhadap pelaku sosio ekonomi daerah guna mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. **Misi Ketiga, Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila,** adalah meningkatnya jatidiri dan karakter masyarakat yang makin beriman dalam keragaman keyakinan beragama dan beribadat yang dijamin kelangsungannya oleh pemerintah, memperkuat kemitraan dan tanggung jawab dalam pembangunan pendidikan keagamaan dan sarana dan prasarana keagamaan di daerah, menguatnya kesalehan sosial masyarakat dan aparatur pemerintah serta memperkokoh silaturahmi antar umat beragama dan intern umat beragama untuk menguatkan pengamalan agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. **Misi Keempat, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,** adalah mewujudkan penyelenggaraan akuntabilitas Pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang proporsional, meningkatkan aksesibilitas, transparansi, pengawasan masyarakat dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah, meningkatkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang makin efisien dan efektif dan peningkatan pelayanan prima pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah daerah, meningkatkan profesionalisme aparatur dan efisiensi birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi yang makin mantap, mewujudkan kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif, menyelenggarakan otonomi desa yang makin efektif, serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang lebih baik.
5. **Misi Kelima, Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia,** adalah mewujudkan penyelenggaraan kelembagaan demokrasi daerah, baik pada supra struktur maupun infrastruktur politik serta meningkatkan budaya hukum dan HAM, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, mewujudkan kemitraan dengan media dalam bentuk penyampaian kepentingan masyarakat daerah serta meningkatkan penegakan hukum secara adil dalam kesetaraan gender dan menghormati hak asasi manusia.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Sumedang yang sejahtera, agamis dan demokratis sebagai landasan bagi tahap pembangunan daerah berikutnya menuju masyarakat Sumedang yang makmur dalam satu kesatuan arah pembangunan provinsi Jawa Barat serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan pada kesamaan paham dan konsistensi dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Sumedang yang sejahtera, agamis dan demokratis pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

1. **Terwujudnya masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat, ditandai oleh hal-hal berikut :**
 - a. Meningkatnya tingkat pendidikan formal masyarakat, yang dilihat dari tercapainya target pendidikan dasar dan memasuki tahapan pendidikan menengah.
 - b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan di daerah yang berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat yang makin mendorong kesamaan gender dan pemberdayaan kaum perempuan .
 - c. Meningkatnya penguasaan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu mengimplementasikan dalam perikehidupan masyarakat daerah yang makin produktif.
 - d. Terwujudnya pendidikan yang berdayaguna dengan kebutuhan kecakapan hidup sepanjang hayat.
 - e. Terciptanya kondisi lingkungan sehat sesuai standar kesehatan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan sosial.
 - f. Terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, dengan tidak membedakan kawasan perdesaan dan perkotaan, yang ditandai dengan penurunan kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan kelahiran yang tidak diinginkan, peningkatan kesehatan kaum ibu, lansia dan remaja perempuan serta penurunan kasus penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit endemik lainnya.
 - g. Terwujudnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang berkeadilan dan berdaya saing.

- h. Terwujudnya sistem kehidupan sosial dengan kondisi yang stabil, sehingga dapat mendukung terciptanya perikehidupan masyarakat yang dilandasi kearifan budaya daerah.
 - i. Terwujudnya kesalehan sosial yang menjadi perekat dalam lingkungan kehidupan masyarakat daerah yang tercermin dalam perilaku silih asah, silih asih dan silih asuh.
 - j. Terwujudnya keluarga sebagai basis persemaian nilai-nilai budaya, pendidikan dan kesehatan.
2. **Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri**, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
- a. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing serta keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah baik di kawasan perdesan maupun perkotaan .
 - b. Meningkatnya kekokohan perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional, nasional dan internasional, dengan berbasis pada upaya mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif, dan kooperatif dalam mendayagunakan potensi agribisnis, pariwisata dan industri.
 - c. Meningkatnya akses yang lebih berkeadilan terhadap sumberdaya ekonomi bagi seluruh masyarakat.
 - d. Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan tingkat harga yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - e. Meningkatnya perlindungan regulasi pemerintahan terhadap pelaku sosio ekonomi daerah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif.
 - f. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat yang ditopang oleh makin produktifnya pendayagunaan potensi agribisnis, pariwisata dan industri.
 - g. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto, yang berdampak terhadap penurunan kemiskinan.
 - h. Meningkatnya pendayagunaan pemanfaatan potensi agribisnis, pariwisata dan industri yang selaras dengan kearifan lokal dan sosial masyarakat.
 - i. Meningkatnya ketersediaan dan kontribusi infrastruktur perekonomian daerah yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan skala regional, nasional dan internasional.
 - j. Meningkatnya partisipasi dan kemitraan dunia usaha serta masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai.

- k. Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi dan drainase jalan serta jalur pejalan kaki (trotoar) dan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, irigasi, telekomunikasi, energi termasuk di dalamnya energi alternatif, dan sumberdaya air yang handal dan terintegrasi, efisien, efektif dan modern serta berkualitas yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 - l. Tertangani bencana alam antara lain longsor, banjir, kekeringan bahkan kebakaran.
 - m. Tertanganinya jaringan air kotor/limbah dan persampahan.
 - n. Tersedianya sarana dan prasarana pemukiman termasuk penanganan utilitas umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan, berupa pengembangan rumah susun, meningkatkan jaringan air bersih, pengembangan jaringan air kotor/ limbah rumah tangga, pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga dan peningkatan sanitasi lingkungan.
 - o. Terwujudnya penataan ruang yang serasi, seimbang dan berkelanjutan.
 - p. Terwujudnya pengembangan wilayah perbatasan dengan kabupaten tetangga, kawasan strategis dan desa pusat pertumbuhan.
 - q. Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdayasaing secara berkesinambungan, berbasis pada keunggulan potensi daerah guna mendukung pembangunan.
3. **Terwujudnya masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila, ditandai oleh hal-hal berikut :**
- a. Meningkatkan jatidiri dan karakter masyarakat yang makin beriman dan bertakwa dalam keragaman keyakinan beragama dan beribadat yang dijamin kelangsungannya oleh pemerintah.
 - b. Menguatnya kemitraan dan tanggungjawab dalam pembangunan pendidikan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan di daerah.
 - c. Meningkatnya silaturahmi antar umat beragama dan intern umat beragama dalam mewujudkan kesalehan sosial.
 - d. Menguatnya kesalehan sosial masyarakat dan aparat pemerintah serta memperkokoh silaturahmi antar dan inter umat beragama untuk menguatkan pengamalan agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
- a. Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang proporsional.
 - b. Meningkatnya aksesibilitas, transparansi pengawasan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
 - c. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang makin efisien dan efektif serta peningkatan pelayanan prima pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah daerah.
 - d. Meningkatnya profesionalisme aparatur dan efisiensi birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi yang makin mantap.
 - e. Terwujudnya kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif.
 - f. Terselenggaranya otonomi desa yang makin efektif.
 - g. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang makin meningkat.
5. **Terwujudnya masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia**, ditandai oleh hal-hal berikut :
- a. Terwujudnya penyelenggaraan kelembagaan demokrasi daerah, baik pada suprastruktur maupun infrastruktur politik serta meningkatnya budaya hukum dan hak asasi manusia.
 - b. Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
 - c. Terwujudnya kemitraan dengan media dalam menyampaikan kepentingan masyarakat daerah.
 - d. Meningkatnya penegakan hukum secara adil, dalam kesetaraan gender dan menghormati hak asasi manusia.

1.1. Arah Pembangunan

1.1.1. Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat.

Terwujudnya masyarakat Sumedang yang beradab dan berpendidikan denganenguasaan ilmu pengetahuan serta ditopang oleh pola hidup sehat di lingkungannya merupakan modal dasar utama bagi tercapainya sasaran pembangunan di bidang lain. Pembangunan tanpa disertai dengan kondisi sumberdaya manusia sehat, mampu berpikir dan bertindak cermat serta disertai penghormatan terhadap kekayaan nilai nilai kearifan sosial yang ada, akan menghasilkan jati diri masyarakat terhadap kemajuan pembangunan yang

telah dilakukan. Oleh karenanya keseimbangan pencapaian pembangunan di berbagai bidang, harus merupakan perpaduan kemampuan fisik dan perkembangan daya pikir yang dibangun melalui pola hidup sehat dan jatidiri sebagai masyarakat bermartabat.

Untuk mewujudkan hal demikian, penyelenggaraan pembangunan daerah diarahkan melalui (a) pengutamaan pengembangan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing berbasis IMTAQ (iman dan takwa) dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) tepat guna, (b) pemantapan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh masyarakat daerah dan (c) perwujudan masyarakat berbudaya yang bermoral dan beretika.

A. Membangun pendidikan berkualitas dan berdaya saing dengan berbasis IPTEK tepat guna.

1. Pembangunan pendidikan di daerah diarahkan menjadi satu kesatuan integral dengan pembangunan pendidikan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan mandiri, sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi, dalam mewujudkan manusia berdaya saing dan memiliki keterampilan, antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender serta menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran, baik di perdesaan maupun perkotaan.
2. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan kemungkinan pembebasan biaya pendidikan, pengembangan tata kelola pendidikan yang makin efektif dan efisien dengan pencitraan publik yang akuntabel dan profesional. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat daerah yang bisa berdaya guna dengan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi tepat guna. Untuk itu terus dikembangkan peningkatan sistem evaluasi yang komprehensif dan akuntabel yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
3. Pembangunan pendidikan di daerah diarahkan untuk menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan, rasa kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam, yang menghormati hak-hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender.

4. Pembangunan kepemudaan yang makin berkualitas dan tangguh diarahkan untuk meningkatkan kualitas potensi kepemudaan daerah berlandaskan kesetaraan gender, pembangunan karakter kebangsaan (nation building) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika yang dijiwai kearifan lokal sebagai penopang keutuhan selaku bangsa Indonesia. Di samping itu, pembangunan pendidikan di kalangan pemuda tidak terlepas dari pendayagunaan potensi pemuda terdidik dalam pengembangan prestasi olahraga daerah. Untuk itu pemuda diarahkan pada peningkatan budaya olahraga yang bermartabat dan berprestasi.
5. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan harus tercermin pada peningkatan kualitas kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, baik pada lembaga pendidikan negeri maupun swasta, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan daerah yang terstandarisasi, peningkatan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam pendayagunaan potensi sosio ekonomi daerah, serta politik anggaran yang semakin sejalan dengan konstitusi UUD 1945.
6. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk mensinergikan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengembangan potensi sosio ekonomi daerah, pembangunannya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi terbarukan yang tersedia di daerah. penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, peningkatan anggaran riset daerah, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pengetahuan.
7. Pembangunan pelayanan pendidikan sesuai perkembangan iptek perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang

jumlahnya semakin besar. Dalam mengupayakan peningkatan pola dan kultur belajar siswa yang dikembangkan ke arah pembentukan budaya kualitas melalui proses pembelajaran yang demokratis dan menyenangkan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya yang dapat menjadi modal kecakapan sepanjang hayatnya.

8. Pembangunan iptek di daerah diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan yang lebih berorientasi terapan yang memungkinkan didayagunakan oleh masyarakat untuk mengembangkan potensi sosio ekonomi daerah. Peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek di daerah tidak hanya berlandaskan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, melainkan senantiasa mempertimbangkan pada nilai-nilai agama, nilai kearifan budaya daerah, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

B. Memantapkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat daerah.

1. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain kaum perempuan remaja, ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (lansia), dan keluarga miskin.
2. Pembangunan kesehatan daerah diarahkan agar berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan pemerintahan daerah selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Upaya perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan secara lintas urusan yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup dan seimbang serta terjaminnya keamanan gizi yang baik.
3. Pembangunan kesehatan daerah diarahkan agar terus mengupayakan peningkatan dan pemerataan pembangunan kesehatan dalam rangka meniadakan ketimpangan antar daerah dan antar kelompok penduduk. Dalam kerangka itu, terus dikembangkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medik. meningkatkan produksi, distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif dan aman bagi masyarakat daerah dengan harga terjangkau.

4. Pembangunan kesehatan diarahkan agar meningkatkan sistem pelayanan kesehatan dibidang pembiayaan, sistem jaminan kesehatan masyarakat, sumber daya manusia, obat dan perbekalan yang disertai peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, terutama peran serta potensi kaum perempuan beserta organisasi kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

C. Mewujudkan masyarakat berbudaya yang bermoral dan beretika.

1. Pembangunan budaya daerah diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran budaya sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan masyarakat di lingkungannya, melanjutkan pewarisan akhlak yang luhur, memupuk etos kerja kolektif dalam semangat kegotong-royongan, menghargai prestasi seni budaya, harmonisasi adat istiadat dalam keragaman menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan daerah.
2. Pembangunan budaya daerah diarahkan pada pemantapan masyarakat yang madani merupakan bagian dari upaya memperkuat jati diri masyarakat sebagai bagian integral dari jatidiri bangsa secara nasional. Untuk mewujudkan karakter masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai kearifan sosial yang selama ini berakar menjadi kekayaan budaya daerah, yang akan terus berkembang dan menyesuaikan dengan kemajuan masyarakat daerah sesuai perkembangan kemampuan pendidikan masyarakat. Keberadaban masyarakat merupakan kombinasi antara nilai-nilai kehidupan masyarakat daerah yang religius, adat istiadat daerah, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan masyarakat daerah yang madani dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya daerah sebagai bagian integral dari budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah. Untuk memperkuat keberadaban masyarakat daerah, pembangunan budaya daerah diarahkan pada peningkatan apresiasi terhadap pewarisan nilai-nilai kearifan sosial yang semakin sejalan dengan keluhuran nilai-nilai keagamaan serta penda penggunaannya dalam kehidupan sosio ekonomi masyarakat daerah.

3. Pembangunan budaya daerah diarahkan pada mengembangkan budaya daerah yang inovatif sesuai kebutuhan masyarakat yang tengah berada dalam dinamika kemajuan pembangunan nasional. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas budaya daerah, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional. Pengembangan ilmu pengetahuan serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat, dan peradaban masyarakat daerah.
4. Pembangunan budaya daerah diarahkan dengan mengakomodasi budaya baru yang relevan dengan budaya lokal sebagai hasil proses akulturasi secara selektif dengan tidak mengabaikan budaya daerah.

4.1.2. Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri.

Perekonomian daerah dikembangkan dengan memperkuat kapasitas perekonomian lokal dibangun berdasarkan pendayagunaan sumber daya daerah yang berorientasi dan berdaya saing nasional dan global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang kompetitif, melalui penyempurnaan berbagai rekayasa teknologi tepat guna dan penguatan akses pasar oleh para pelaku ekonomi daerah. Untuk memperkuat kapasitas perekonomian daerah, interaksi dengan daerah otonom lainnya didorong dengan membangun kerjasama dan keterkaitan dalam sistem produksi, distribusi, dan pengelolaan potensi pasar antar daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas daerah melalui inovasi, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek, kemandirian daerah secara berkelanjutan. mengelola kelembagaan ekonomi daerah yang berdayasaing serta pemerintahan yang baik dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam daerah secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal demikian, penyelenggaraan pembangunan perekonomian daerah diarahkan untuk :

1. Mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi, berkelanjutan dan berkualitas guna mendorong mantapnya iklim usaha daerah yang berdaya saing nasional dan global serta senantiasa berorientasi bagi peningkatan kemakmuran bagi seluruh masyarakat secara adil dan proporsional. Peranan pemerintah daerah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan

usaha yang kondusif dan berdaya saing, terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar sehat, berkeadilan serta tidak mematikan potensi masyarakat daerah.

2. Mengembangkan industri daerah melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk, pengembangan industri kecil dan menengah dan penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan. Pengembangan industri daerah di arahkan melalui (1) peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur (hulu-hilir), penguatan hubungan antar industri, dan pendukung infrastruktur industri berupa tersedianya sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi), prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri, (2) pembangunan industri yang berkelanjutan, dimana produksi industri harus memperhatikan aspek lingkungan, sehingga dapat menghasilkan industri produksi bersih (*green product/ecological product*) terutama industri-industri yang berpotensi menghasilkan limbah, mengembangkan *zero waste industries* serta mengembangkan industri berbahan baku yang terbarukan (*recycle product*), (3) pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) agar industri kecil menengah mampu berdaya saing baik di pasar lokal, nasional hingga internasional. Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri daerah, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar, (4) penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif antara lain sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi, prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri).
3. Mengembangkan kapasitas struktur perekonomian daerah yang berfokus pada industri kecil dan menengah yang bersinergi dengan industri besar, dengan mengendalikan industri yang telah tumbuh dan berkembang serta yang lebih mengarah pada ketidakseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Menumbuhkembangkan potensi wilayah untuk aktivitas industri yang sinergis dengan sektor ekonomi lainnya.
4. Mengembangkan perdagangan dalam negeri diarahkan pada peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal dan regional, meningkatkan sistem distribusi yang efektif dan efisien guna terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan perlindungan konsumen dan meningkatkan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri. Untuk pengembangan perdagangan luar negeri diarahkan pada penguatan

- akses dan jaringan perdagangan ekspor, guna memperkuat posisi produk daerah di tingkat internasional. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan perekonomian daerah dalam rangka memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya terhadap kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama bidang pertanian dilakukan melalui upaya revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing di pasar regional, nasional hingga internasional, sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha.
 6. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif para petani. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya, upaya tersebut dapat menciptakan diversifikasi perekonomian perdesaan yang pada gilirannya meningkatkan sumbangan dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Perhatian diberikan pada upaya pengembangan kemampuan masyarakat, pengentasan kemiskinan secara terarah, serta perlindungan terhadap mekanisme pasar agar adil dan tidak mematikan potensi masyarakat.
 7. Mengembangkan agribisnis daerah diarahkan pada (1) Pengembangan industri input yang memadai dari segi jumlah, kualitas dan waktu sesuai dengan tuntutan pengembangan agribisnis hilir, (2) Pengembangan teknologi budidaya dan organisasi produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman, ternak dan ikan dengan menggunakan lahan minimal dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman bagi konsumen, (3) Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil produk primer, (4) Pengembangan sistem pemasaran yang berorientasi pada permintaan konsumen, (5) Pengembangan penunjang sistem agribisnis yang berfungsi mengatur dan memandu sistem agribisnis, dan (6) Pengembangan jejaring bisnis terintegrasi yang menggambarkan harmoni antar pelaku bisnis pada tingkat institusi pemerintah terkait, produsen dan pelaku jasa agribisnis dalam lingkup wilayah dan lingkup fungsional.
 8. Mengembangkan objek dan daya tarik wisata daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat pariwisata. Mengembangkan potensi kepariwisataan daerah/ODTW secara utuh dan terpadu dengan sistem pengembangan kepariwisataan nasional dan regional yang dikelola secara sinergis dan partisipatoris dengan mempertimbangkan nilai-nilai ekonomis, teknis, kekayaan seni dan budaya lokal serta mempertahankan kelestarian kondisi alam dan lingkungan hidup. Pengembangan ODTW tersebut dilaksanakan

- melalui penataan sarana dan prasarana potensi wisata andalan dan budaya, peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata/kebudayaan serta pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat kelompok penggerak pariwisata.
9. Mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif dan non-diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat. meningkatkan perlindungan konsumen,; mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi; meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam memperkuat basis ekonomi daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi regional dan nasional.
 10. Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan ketersediaan stock kebutuhan pokok lainnya melalui pengembangan UMKM yang merupakan faktor strategis untuk pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan. Semua itu harus dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin ketahanan perekonomian daerah yang sejalan dengan kebijakan perekonomian nasional.
 11. Meningkatkan produktivitas pangan daerah dan kebutuhan pokok lainnya melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing khususnya dalam menyediakan pangan serta kebutuhan pokok lainnya, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Pengembangan UKM dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan serta peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
 12. Meningkatkan diversifikasi pangan daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Penganekaragaman pangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan keanekaragaman pangan, mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan, membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan, meningkatkan motivasi masyarakat dalam

- penyelenggaraan ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan.
13. Memperkuat perlindungan dan kapasitas struktur perekonomian daerah, dengan terus mengupayakan dan memantapkan pertumbuhan investasi bagi para pelaku usaha di daerah yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik, mendorong penanaman modal dalam negeri dan asing bagi peningkatan daya saing perekonomian lokal yang menopang perekonomian regional dan nasional serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.
 14. Memberikan jaminan insentif dan disinsentif investasi bagi para pelaku usaha di daerah, berupa perlindungan regulasi bagi keamanan investasi yang ditanamkan serta punishment bagi investor yang melanggar aturan, hingga tercipta iklim investasi yang kondusif.
 15. Mengembangkan jasa keuangan di daerah, sehingga memiliki kemampuan dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah dalam membiayai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis perekonomian yang berimbas ke daerah, peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan bank dan non-bank dalam pendanaan pembangunan daerah terutama peningkatan akses pendanaan bagi keluarga miskin baik di perdesaan maupun perkotaan.
 16. Mengoptimalkan berbagai lapangan usaha PDRB. Selain ke tiga sektor yang menjadi unggulan daerah dan mesin pertumbuhan ekonomi utama (sektor pertanian, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Industri Pengolahan), dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah bersama swasta dan masyarakatnya perlu menggali potensi baru unggulan di sektor lainnya disamping terus meningkatkan sektor-sektor yang sudah menjadi unggulan tersebut melalui pembentukan sentra-sentra produk unggulan daerah dan pengembangan klaster-klaster pendukungnya dengan pengelolaan yang baik dan sinergis antar pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah sebagai fasilitator.
 17. Pemerataan distribusi pendapatan (gini ratio). Distribusi pendapatan yang berkeadilan sebagai hasil mengelola sumberdaya alam maupun manusia dari suatu daerah adalah dimana distribusi pendapatan yang diperoleh dapat dinikmati secara merata oleh rakyatnya, dengan meratanya pembagian pendapatan diharapkan tingkat konsumsi masyarakat juga relatif lebih baik dan akhirnya secara simultan tingkat kesejahteraan akan tercapai secara lebih merata. Dalam kaitannya distribusi pendapatan ini adalah seberapa besar masyarakat Kabupaten Sumedang dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi. Perhitungan atau analisis yang biasa dipergunakan para ahli ekonomi dengan analisis

Indeks Gini atau Gini Ratio. Arah tersebut akan dicapai melalui pemerataan pembangunan di segala bidang dengan mengutamakan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

18. Menanggulangi kemiskinan yang diarahkan pada penghormatan dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang bermartabat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta peningkatan produktivitas penduduk miskin.
19. Meningkatkan kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi melalui industri pengolahan dan jasa yang berbasis pada agribisnis serta sejalan dengan pengembangan kegiatan utama (core business) yang menopang pembangunan ekonomi daerah Jawa Barat.
20. Mengembangkan pariwisata agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan peran kepariwisataan daerah yang mendorong peningkatan citra dalam pembangunan kepariwisataan regional dan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan daerah memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, potensi seni budaya daerah, industri kerajinan kecil serta keragaman dan kekhasan seni kuliner daerah.
1. Meningkatkan kapasitas keuangan dan investasi daerah, sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi regional dan nasional, agar mampu mendukung secara efektif peningkatan pembangunan dan kontribusi infrastruktur, sehingga sesuai dengan sistem dan standar pengelolaan yang sesuai dengan praktik terbaik nasional dan internasional, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan perekonomian daerah dan perdesaan serta nilai tambah perekonomian daerah.
2. Memperkuat kerjasama investasi infrastruktur daerah dalam rangka mendukung peningkatan aktifitas perekonomian, sosial, budaya dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan memperhatikan keserasian pembangunan antar perdesaan, perkotaan dan antar daerah serta daya dukung lingkungan. Guna pengembangan infrastruktur daerah terus dikembangkan peningkatan peran serta masyarakat dan investasi swasta.
 - a. Aspek Transportasi.

Pembangunan infrastruktur transportasi dikembangkan melalui pendekatan

keseimbangan dan pemerataan, pembangunan antar perdesaan dan perkotaan yang semakin mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan di daerah. Pembangunan transportasi darat dilaksanakan dengan mengembangkan pembangunan infrastruktur transportasi darat yang efektif dan efisien yang diarahkan untuk dapat melayani pergerakan lalu lintas orang dan barang dengan pelayanan dan biaya yang optimum serta mempercepat dan memperlancar pergerakan lalu lintas orang dan barang melalui perbaikan manajemen dan kualitas transportasi antar moda angkutan umum massal, pengembangan jalan bebas hambatan serta peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan.

b. Aspek Sumberdaya Air dan Irigasi.

Pembangunan infrastruktur sumberdaya air dikembangkan melalui upaya konservasi, pendayagunaan dan perlindungan sumberdaya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air. Pembangunan infrastruktur sumberdaya air diarahkan dengan mengembangkan prasarana penampungan air baku sekaligus sebagai pengendali daya rusak, meningkatkan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai, mengoptimalkan penggunaan air baku permukaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pemanfaatan air yang berwawasan lingkungan hidup. Sedangkan pengembangan infrastruktur irigasi diarahkan terutama dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi pada daerah irigasi yang keandalan airnya baik sehingga dapat meningkatkan intensitas tanam.

c. Aspek Energi Listrik.

Pembangunan infrastruktur Energi listrik diarahkan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan masyarakat terhadap listrik, dengan mengembangkan potensi energi listrik terbaharukan seperti, potensi hidro, surya, dan angin.

d. Aspek Telekomunikasi.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan masyarakat terhadap telekomunikasi, dengan prioritas pengembangan pada daerah yang memiliki teledensitas rendah.

e. Aspek sarana dan prasarana dasar pemukiman

Pembangunan infrastruktur pemukiman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar pemukiman yang memadai (air minum dan sanitasi) dan pusat-pusat pertumbuhan daerah. Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman akan diarahkan pada pengembangan sistem komunal skala kecil untuk kawasan

pedesaan dan skala besar untuk kawasan perkotaan. Pembangunan prasarana pengelolaan sampah, pengolahan air bersih dan pengolahan air limbah dilaksanakan melalui peningkatan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat/ kelompok masyarakat, sehingga secara bertahap peran pemerintah akan terus berkurang yang pada akhirnya hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator saja.

23. Meningkatkan komitmen antar stakeholders dalam aktivitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah yang berkelanjutan. Diarahkan untuk mengimplementasikan peran serta stakeholders melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan pola kemitraan ini ditujukan untuk menggali potensi kontribusi dan partisipasi yang merupakan salah satu bentuk kearifan budaya lokal masyarakat Sumedang dalam aktivitas penanganan infrastruktur daerah. Baik dalam bentuk bantuan stimulan salah satu atau beberapa komponen kebutuhan dalam penanganan infrastruktur daerah. Pola kemitraan didesain sedemikian rupa, sehingga baik pihak swasta maupun masyarakat sangat tertarik untuk ikut serta dalam penanganan infrastruktur daerah.
24. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjamin tersedianya sumberdaya yang berkelanjutan bagi pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sinergitas dalam implementasi di seluruh bidang pembangunan dan antar kawasan pedesaan dan perkotaan menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.
25. Mewujudkan penataan ruang yang serasi, seimbang dan berkelanjutan melalui peningkatan ketersediaan rencana tata ruang kecamatan dan kawasan strategis kabupaten, Provinsi dan nasional (kawasan perguruan tinggi Jatinangor, kawasan waduk Jatigede, kawasan industri dan kawasan koridor jalan tol) termasuk kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
26. Mewujudkan keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, menciptakan kemandirian, serta peningkatan nilai tambah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, upaya pengembangan energi alternatif perlu mendapatkan perhatian khusus dalam mendukung ketahanan energi, pemanfaatan jasa-jasa lingkungan dalam pengembangan kepariwisataan dan pendidikan, pengelolaan sumber daya air terpadu, pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dan produk pertambangan, peningkatan cadangan energi atau sumber daya alam tak terbarukan, pengembangan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan pembatasan penggunaan

- sumber daya alam tidak terbarukan. Upaya mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab.
27. Mendorong dan mengendalikan pertumbuhan dan pengembangan wilayah diarahkan untuk menjaga daya tampung suatu daerah dalam suatu kesatuan ruang. Untuk itu, pengendalian terhadap laju pertumbuhan wilayah menjadi perhatian utama agar pertumbuhannya terkendali serta memacu wilayah yang lambat pertumbuhannya agar tidak terjadi disparitas/ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Sumedang. Pertumbuhan dan pengembangan wilayah tersebut harus sesuai dengan daya dukung, maupun daya tampung wilayah, terutama dari sisi ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur wilayah, lahan dan permukiman, bahkan dari sisi jumlah limbah atau bahan buangan yang dihasilkan.
 28. Meningkatkan kesadaran masyarakat lebih diarahkan melalui peningkatan pendidikan lingkungan sejak dini, sosialisasi, komunikasi dan informasi lingkungan, serta memperkenalkan berbagai kearifan lokal kepada seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan memerlukan suatu perhatian. Ketauladanan sebagai bagian dari budaya masyarakat yang harus mendapat perhatian khusus agar berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat berperilaku ramah lingkungan dapat tercapai.
 29. Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang serasi, berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadilan, serta mampu mewadahi perkembangan daerah perdesaan, perkotaan dan aktifitas perekonomiannya, dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perdesaan dan perkotaan yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen pembangunan terpadu yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona lindung, penciptaan aktivitas ekonomi beserta dukungan sistem transportasi masal yang efisien dan ramah lingkungan.
 30. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan, memantapkan kepranataan, penguatan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan, mengoptimalkan penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air dan kawasan lindung. Berbagai upaya tersebut perlu didukung oleh sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik, dengan arahan kepada tersedianya perangkat hukum dan perundangan yang

memberikan kepastian kewenangan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diarahkan pada upaya peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan serta kontrol terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, demikian pula upaya meningkatkan penyediaan sistem pengelolaan lingkungan terpadu, baik berupa instalasi pengolahan limbah bersama, sanitasi komunal atau tempat pemrosesan akhir sampah terpadu, penerapan pola 3R (recycle, reduce, reuse). Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada pengembangan instrumen atau upaya non struktur dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti kegiatan ecolabeling, sertifikasi pengelola lingkungan, penegakan hukum lingkungan, maupun pola insentif dan disinsentif.

31. Penanganan bencana alam di daerah lebih diarahkan kepada mengurangi resiko bencana melalui upaya pencegahan lebih dini (mitigasi), dan meningkatkan kesiapsiagaan, untuk meminimalkan tingkat kerusakan, kerugian ekonomi, bahkan korban jiwa. Dalam pelaksanaannya, upaya pengurangan resiko bencana terintegrasi dalam setiap proses tahapan pembangunan dan pengembangan daerah. Penataan ruang yang berbasis bencana alam, sistem informasi, sistem peringatan dini, perencanaan penanganan bencana, sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat agar lebih mempunyai kesiapan dan ketahanan menghadapi bencana, merupakan hal-hal yang mendapat perhatian khusus.
32. Pemulihan kualitas lingkungan diarahkan kepada upaya optimalisasi rehabilitasi lahan dan konservasi tanah baik melalui pola vegetasi maupun sipil teknis, reklamasi lahan pasca maupun bekas penambangan, penataan daerah resiko tinggi bencana (gerakan tanah dan banjir), penataan kawasan kumuh perkotaan, pemulihan ekosistem kawasan lindung, perlindungan atau pemulihan daerah resapan air, pemulihan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah. Pola kemitraan perlu dibangun dengan masyarakat untuk lebih memacu pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan.
33. Pelestarian fungsi kawasan lindung diarahkan pada pemulihan kondisi dan peningkatan fungsi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan ekosistem kawasan, kestabilan iklim baik mikro maupun makro, manfaat ekologis dan menjaga sumber daya ekonomi kawasan. Dalam kaitan pengurangan resiko bencana alam, kawasan lindung akan bermanfaat besar guna mencegah atau mengurangi besaran serta dampak akibat bencana alam, seperti banjir dan longsor. Kawasan lindung juga mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi dari sisi jasa lingkungan (misalnya wisata alam), keanekaragaman hayati, atau sumber daya air, untuk itu setiap pemanfaatannya harus tetap dalam kaidah konservasi yang telah ditentukan.

34. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong berkembangnya penciptaan lapangan kerja formal dan informal. Hal tersebut diwujudkan melalui penciptaan pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak.
35. Para pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi, sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program pelatihan strategis untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi produksi sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia.
36. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja melalui perlindungan regulasi yang berpihak pada tenaga kerja tanpa mengabaikan hak para investor, sehingga tercipta keseimbangan dan kondusivitas iklim investasi.

4.1.3. Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila.

Untuk mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila, maka diperlukan penguatan pembangunan yang diarahkan pada :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama sebagai landasan pembinaan akhlak mulia dalam kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Upaya ini perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan agama baik jalur formal, non formal maupun informal (melalui pendidikan didalam keluarga) serta dengan mengembangkan majelis Pendidikan agama bagi orang dewasa.
2. Menguatkan kemitraan dan tanggung jawab pembangunan dan pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tokoh agama atau keluarga semata melainkan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, dengan kuatnya kemitraan diantara sesama komponen masyarakat keberhasilan pembangunan dan pendidikan keagamaan akan dapat diraih.
3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana keagamaan di daerah. Ketersediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan bidang keagamaan. Upaya ini ditempuh melalui penyediaan anggaran yang memadai bagi bantuan penyediaan sarana prasarana maupun melalui upaya menumbuhkembangkan keswadayaan masyarakat sebagai suatu modal sosial yang sangat berharga.

4. Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan melalui upaya (1) Penguatan jatidiri dan karakter masyarakat yang makin beriman dan bertakwa dengan dijiwai penghormatan terhadap keragaman keyakinan dalam memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya yang terus dijamin kelangsungannya oleh pemerintah daerah, (2) Makin memperkokoh silaturahmi antar dan intern umat beragama serta umat beragama dengan para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesalehan sosial, yang makin sinergi dalam menyeimbangkan nilai-nilai hakiki keagamaan dan konsensus falsafah kebangsaan nasional Pancasila.

4.1.4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari pendekatan kekuasaan ke orientasi kerakyatan, telah menuntut adanya perubahan kerangka pikir (mindset) di kalangan penyelenggara pemerintahan. Pelaku tata kelola pemerintahan telah bergeser yang menuntut berbagi peran antara sektor publik, sektor swasta dan peran serta masyarakat sipil, dimana satu sama lain saling berkontribusi dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan seperti itu diperlukan penguatan dalam pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang makin diarahkan pada :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan kapasitas keuangan daerah serta kapasitas lembaga legislatif daerah. Selain itu, pemberdayaan masyarakat terus dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan sumber daya alam, pemberian kesempatan menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka, serta peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.
2. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan tata kelola pemerintahan daerah melalui kelembagaan DPRD dan masyarakat serta media publik terus dimantapkan. Demikian pula, kemitraan antara para penyelenggara pemerintahan daerah, terutama kesamaan komitmen Kepala daerah dan perangkatnya dengan DPRD serta pelaku politik di daerah, akan menjadi penopang tertibnya tata pemerintahan dalam mengelola sumber daya daerah untuk percepatan kemakmuran masyarakat.

3. Meningkatkan pelayanan publik yang ditopang oleh aparatur yang bertanggung jawab dan profesional yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi etika, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dengan wadah struktur kelembagaan daerah yang tepat guna mewujudkan birokrasi yang efisien. Untuk itu perlu dilakukan melalui upaya (1) Penataan birokrasi pemerintahan dari sisi struktur dan budaya organisasi, (2) Pemberlakuan secara ketat penyusunan anggaran pemerintahan daerah berbasis kinerja serta akuntabilitasnya, (3) Peningkatan kinerja pelayanan publik operasionalisasi pelayanan prima melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, (4) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, (5) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, (6) Pengembangan kapasitas otonomi desa dalam rangka penguatan daya saing, (7) Peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkatan pemerintahan dan dengan stakeholders lainnya.
4. Melakukan pembangunan aparatur pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari aparatur negara melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di berbagai bidang guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
5. Meningkatkan kerja sama antar daerah dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif untuk menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik, melalui sistem jejaring antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan dari kerja sama, maupun berbagi tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana maupun dalam pembangunan lainnya.
6. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan otonomi desa yang makin efektif, dilakukan melalui upaya regulasi kewenangan pemerintah daerah terhadap keberadaan pemerintahan desa, sehingga wadah otonomi desa yang dikuatkan melalui Undang-undang otonomi desa dapat diterapkan secara aspiratif dan akomodatif
7. Meningkatkan pengawasan terhadap aparatur pemerintah daerah dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta semua kegiatan. pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. serta peningkatan etika birokrasi

dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

8. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan, dengan melakukan proteksi terhadap segala kemungkinan terjadinya ancaman tantangan hambatan dan gangguan dari dalam dan luar daerah, sehingga sekecil apapun bentuk infiltrasi dapat terdeteksi sejak dini
9. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan memberi motivasi yang berupa stimulan pembangunan sarana potensi ketentraman dan ketertiban di wilayah masing-masing.
10. Menguatkan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia, melalui upaya penegakan supremasi hukum terhadap seluruh komponen yang berpotensi untuk melakukan upaya-upaya hukum termasuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang berurusan dengan hukum.

4.1.5. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia.

Keberadaan praktek berdemokrasi yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Demokrasi merupakan wahana untuk menumbuhkembangkan sekaligus jaminan bagi kesinambungan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta mendorong terselenggaranya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan. Dalam kehidupan demokrasi, kesetaraan peran diantara penduduk dijamin dalam konstitusi negara. Oleh karenanya dalam kehidupan demokrasi, kedudukan hukum kaum perempuan dan kaum laki-laki sama derajatnya. Namun dalam faktanya, pengarusutamaan gender masih merupakan isu strategis yang masih menunjukkan ada perbedaan perlakuan peran yang kurang memberi ruang memadai bagi kaum perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai bidang. Kondisi demikian, perlu terus diperbaiki, sehingga pengarusutamaan gender yang optimal, akan menempatkan kaum perempuan dan laki laki dalam sistem sosial dan politik pemerintahan, mendapatkan tempat yang sama sebagaimana dikehendaki berdasarkan konstitusi dan hukum nasional Indonesia. Untuk itulah penguatan akses kaum perempuan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan, akan mendorong tumbuhnya demokrasi yang makin dewasa secara nasional.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun

gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal. Untuk mewujudkan masyarakat daerah yang semakin mendorong terciptanya Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat bottom up bisa berjalan. menumbuhkan masyarakat tanggap (responsive community) yang akan mendorong semangat sukarela (spirit of voluntarism) yang sejalan dengan makna gotong royong. memperkuat kualitas otonomi daerah, tugas pembantuan dan otonomi desa. menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat. meningkatkan budaya hukum serta melakukan pembenahan dan pemantapan dalam penegakkan hukum di daerah secara adil, konsisten, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada masyarakat. Untuk mewujudkannya, diperlukan serangkaian arah pembangunan berikut ini :

1. Mewujudkan demokrasi yang berbasis etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Demokrasi dicapai melalui konsensus seluruh stakeholders untuk berperan sesuai fungsinya masing-masing yang didukung oleh kemapanan suprastruktur dan infrastruktur politik, meningkatnya peran partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik, sehingga dapat meredam potensi konflik di daerah baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, juga semakin kuatnya peran masyarakat sipil dalam mendukung kapasitas dan kapabilitas sistem politik. Demokrasi diarahkan untuk memperkuat otonomi daerah yang menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat pewujudan demokrasi di daerah, dilakukan melalui (1) Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, (2) Revitalisasi fungsi dan peran partai politik dalam pendidikan politik, (3) Penguatan peran civil society dalam demokratisasi, (4) Perluasan akses partisipasi publik, (5) Pengembangan budaya politik masyarakat dan elit-elit politik lokal, (6) mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warganegara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing, (7) Penataan kecamatan, desa dan kelurahan dalam rangka pemerataan pembangunan dan efektivitas rentang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik melalui proses penyusunan produk hukum yang aspiratif dan partisipatif, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman, sehingga dapat meningkatkan kualitas legislasi

daerah. Produk hukum yang ditetapkan disertai dengan penegakkan hukum yang makin konsisten dengan didukung aparat penegak hukum yang bersih dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Upaya itu dilakukan melalui upaya (1) Mewujudkan produk hukum daerah yang berorientasi pada keadilan masyarakat, (2) Mewujudkan harmonisasi produk hukum daerah dengan nasional, (3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, (4) Membangun budaya hukum, (5) Membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

3. Meningkatkan akses informasi publik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan daerah dan penyaluran aspirasi masyarakat sehingga terwujud ketenteraman dan ketertiban sosial berlandaskan hukum dengan meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) secara adil tanpa mengabaikan hak asasi manusia. Ketenteraman dan ketertiban umum sebagai faktor utama dan berperan dalam menciptakan situasi kondusif bagi keberlanjutan pembangunan di daerah.
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib perlu didukung konsistensi penegakan hukum dengan aparat hukum yang bersih dan lembaga peradilan yang kuat dan independen. Untuk itu ditempuh melalui upaya (1) Penegakan hukum (law enforcement) secara adil, (2) Peningkatan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan, (3) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, (4) Penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia.
5. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

4.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang daerah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan merupakan pilihan yang paling memungkinkan mendapatkan dukungan sumber daya daerah yang tersedia pada kurun waktu lima tahunan. Namun demikian, penekanan fokus prioritas setiap perencanaan daerah dalam kurun lima tahunan, tetap merupakan satu kesinambungan yang memiliki keterkaitan erat bagi pencapaian sasaran pokok dalam menangani permasalahan pembangunan di daerah sampai batas waktu perencanaan pembangunan jangka

panjang daerah yaitu pada tahun 2025. Untuk mengendalikan tingkat capaian dan kepastian fokus prioritas sasaran pembangunan jangka panjang daerah, disadari bahwa pencapaiannya turut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternalitas perencanaan daerah yang bisa timbul di luar asumsi perencanaan serta kondisi dinamis yang terus tumbuh dalam lingkungan strategis perencanaan pembangunan, sejak tingkat nasional hingga daerah, maka penetapan fokus prioritas menggunakan pendekatan yang berlandaskan fleksibilitas berdasarkan perkiraan kecenderungan permasalahan yang secara umum berada dalam lingkungan kondisi perencanaan pembangunan daerah, dalam kondisi pemberlakuan kebijakan otonomi daerah, yang terus mengalami perubahan regulasi secara nasional.

Untuk menstrukturkan penguatan fokus prioritas pada setiap sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, setiap misi yang telah dan ingin dicapai ditetapkan prioritasnya kedalam masing-masing tahapan dengan prinsip keberlanjutan, penataan, peningkatan, pemantapan dan mempertahankan keunggulan program pembangunan pada setiap tahapan dan tahapan berikutnya, yang satu sama lain saling menguatkan dan dapat berjalan secara simultan. Untuk itu, maka tahapan dan skala prioritas utama meliputi RPJMD ke-1 (2005-2008), ke-2 (2009-2013), ke-3 (2014-2018) dan ke-4 (2019-2025).

4.2.1. RPJMD KE-1 (2005 – 2008)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJMD Ke-1 diarahkan untuk melanjutkan hasil hasil pembangunan daerah di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Sumedang yang sejahtera, agamis dan demokratis yang semakin merasakan dampaknya bagi masyarakat daerah serta terus memberikan kontribusi terhadap kualitas pembangunan regional Jawa Barat dan nasional.

Sumedang yang sejahtera ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup yang semakin berkualitas serta berkurangnya kesenjangan antar perdesaan dan perkotaan. Kondisi itu dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi daerah yang kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur. Pembangunan infrastruktur terus didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan investasi daerah yang transparan serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan perijinan investasi daerah terutama untuk sektor transportasi, perdagangan, agribisnis, industri kecil serta kepariwisataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan bagi percepatan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain melalui penajaman upaya persiapan pembangunan jalan Tol Cisumdawu, bendungan Jatigede,

zona industri Jatinangor-Cimanggung dan Ujungjaya, rencana induk pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang serta bandara internasional Kertajati di Majalengka.

Untuk menarik potensi perekonomian daerah, yang diletakkan pada agribisnis, pengembangan agribisnis Sumedang terus diarahkan untuk mendukung core business Jawa Barat dengan ditandai dengan beberapa penguatan yaitu penguatan sumber daya manusia, penguatan usaha, penguatan kondisi lingkungan, penguatan sarana dan prasarana, penguatan penelitian, pengembangan agribisnis dan penguatan koordinasi kelembagaan. Sejalan dengan agenda regional, dirintis penyusunan strategi penguatan sistem agribisnis yang didasarkan kepada kondisi permasalahan faktual pada sistem agribisnis serta adanya peluang dan tantangan yang muncul sebagai akibat terjadinya perubahan lingkungan. Strategi penguatan sistem agribisnis diharapkan dapat menghantarkan agribisnis pada kondisi ideal dan mampu mewujudkan masyarakat sejahtera. Tahapan penguatan sistem agribisnis yang perlu disusun meliputi enam aspek penguatan antara lain (1) Penguatan sumber daya manusia, (2) Penguatan usaha, (3) Penguatan kondisi lingkungan, (4) Penguatan sarana dan prasarana, (5) Penguatan penelitian dan pengembangan agribisnis, (6) Penguatan koordinasi kelembagaan.

Bersamaan dengan hal tersebut ditingkatkan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Kabupaten Sumedang. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dan menyadari keadaan wilayah yang rawan bencana sehingga makin peduli dan antisipatif. Hal itu didukung oleh pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas di setiap tingkatan pemerintahan dalam rangka penanggulangan bencana serta rencana tata ruang daerah terus dikendalikan dalam implementasinya dengan kebijakan tata ruang di tingkat regional dan nasional sebagai payung kebijakan spasial semua sektor dalam rangka mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi prioritas daerah adalah mengoptimalkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia antara lain, ditandai oleh (1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar melalui Tuntas Wajardikdas 9 Tahun, (2) meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, (3) meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun masyarakat daerah yang berkarakter cerdas, adil dan beradab, berkepribadian tangguh, bermoral, dan berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong-royong yang berdasarkan falsafah Pancasila, (4) meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, (5) meningkatkan kesejahteraan

dan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menurunnya Angka Kematian Bayi dan meningkatnya gizi balita dan anak serta (6) mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Sumedang yang sejahtera ditandai pula semakin meningkatkannya nilai-nilai peradaban masyarakat yang tercermin dari pola pikir dan tingkat laku di lingkungannya. Kondisi itu didukung oleh berkembangnya pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang positif dan produktif pada setiap aspek kehidupan dalam rangka pemantapan budaya daerah yang berlandaskan falsafah Pancasila.

Untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, semakin diperlukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, terutama terkait dengan reformasi birokrasi daerah. Reformasi birokrasi daerah, akan ditandai dengan semakin terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada seluruh tingkatan pemerintahan daerah hingga di tingkat desa/kelurahan. Hal ini tercermin dari penerapan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi publik dalam proses penyusunan perencanaan daerah, penyusunan dan pembahasan APBD, penyusunan regulasi daerah serta pengawasan daerah. Bersamaan dengan itu, pelayanan kepada masyarakat makin membaik dengan meningkatnya penyelenggaraan otonomi daerah dan otonomi desa yang tercermin dengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Sumedang yang demokratis ditandai dengan (1) meningkatnya keadilan dan penegakan hukum, (2) tersediannya regulasi daerah untuk memperkuat kelembagaan demokrasi, terutama di perdesaan dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan umum, (3) meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, (4) meningkatnya upaya-upaya lebih baik dalam penegakan supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sasaran lainnya, yang menjadi prioritas untuk RPJMD ke-I adalah memperkokoh kehidupan masyarakat agamis di Kabupaten Sumedang yang memiliki toleransi dalam pelaksanaan peribadatan berdasarkan keyakinan agama menurut tingkat kepercayaan para pemeluknya. Untuk itu penguatan silaturahmi antar umat beragama, silaturahmi inter seagama serta antar umat beragama dengan para penyelenggara pemerintahan daerah terus diperkokoh. Bersama dengan itu, pengamalan keagamaan daerah akan tercermin dari semakin tumbuhnya kesadaran untuk membangun tempat-tempat peribadatan yang dilandasi kebersamaan umat

beragama dan toleransi serta mendorong pengamalan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan ketahanan moral masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yang kian memperkuat penegakkan nilai-nilai yang dijadikan landasan hukum daerah dan nasional.

Dari tahapan dan prioritas pada RPJMD ke-1 ini, terdapat fokus yang menjadi panduan untuk dapat dituntaskan pada kurun perencanaan tahap ini yaitu :

1. Peningkatan dan pemerataan tenaga kependidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Pemantapan seluruh komponen yang menunjang wajar dikdas 9 tahun.
3. Mempertahankan keunggulan pewarisan dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.
4. Pengembangan nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat untuk pembangunan daerah.
5. Penataan kelembagaan pendidikan masyarakat di Kecamatan melalui peningkatan kapasitas PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
6. Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dapat bermanfaat untuk Pembangunan daerah.
7. Peningkatan dan pemerataan tenaga kependidikan dari segi kualitas maupun kuantitas.
8. Pengembangan kurikulum dan sistem pendidikan berbasis keagamaan.
9. Pengembangan organisasi kepemudaan.
10. Pemantapan kerjasama dengan lembaga pendidikan non formal.
11. Peningkatan penyediaan air bersih bagi seluruh penduduk.
12. Peningkatan promosi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
13. Peningkatan perbaikan gizi bagi seluruh penduduk, terutama wanita dan anak.
14. Peningkatan upaya pencegahan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
15. Penguatan kelembagaan kesehatan di kecamatan dan desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan .
16. Peningkatan penyerapan pengangguran sekurang-kurangnya 25% dari penambahan angkatan kerja baru.
17. Penanggulangan jumlah penduduk miskin pada setiap tahun perencanaan.
18. Pemantapan penyelenggaraan Unit Layanan Satu Pintu Dalam setiap proses perijinan dan investasi.
19. Penataan dan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian daerah dalam mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi unggulan terutama pertanian.

20. Pengembangan potensi daerah sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional dan internasional.
21. Pengembangan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi ekonomi daerah.
22. Pemantapan kondisi neraca untuk baku mutu lingkungan hidup mengalami perbaikan untuk setiap tahun perencanaan.
23. Pemantapan regulasi yang berkaitan dengan perijinan investasi disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
24. Meningkatnya partisipasi dan kemitraan dunia usaha serta masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai.
25. Pemantapan tersedianya dukungan teknis dan administrasi bagi penyelenggaraan proses pelelangan Tol Cisumdawu.
26. Pemantapan tersedianya dukungan teknis dan administrasi bagi pembangunan Bendungan Jatigede.
27. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi dan drainase jalan serta jalur pejalan kaki (trotoar) dan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, irigasi, telekomunikasi, energi termasuk di dalamnya energi alternatif, dan sumberdaya air yang handal dan terintegrasi, efisien, efektif dan modern serta berkualitas yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
28. Peningkatan penanganan bencana alam antara lain longsor, banjir, kekeringan bahkan kebakaran.
29. Peningkatan penanganan jaringan air kotor/limbah dan persampahan.
30. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman termasuk penangananan utilitas umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan, berupa pengembangan rumah susun, meningkatkan jaringan air bersih, pengembangan jaringan air kotor/limbah rumah tangga, pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga dan peningkatan sanitasi lingkungan.
31. Peningkatan ketersediaan rencana tata ruang kecamatan dan kawasan strategis kabupaten, provinsi dan nasional termasuk kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
32. Pelestarian lingkungan yang diperlukan untuk pengembangan agribisnis daerah, dengan fasilitasi pada pusat pengembangan agribisnis daerah, upaya pemberian fasilitas permodalan perbankan daerah serta penguatan kelembagaan tani.

33. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas dan pengembangan lahan pertanian.
34. Meningkatkan penguatan dalam mitigasi bencana, bekerjasama dengan lembaga terkait.
35. Memperkuat fasilitasi dalam penguatan kegiatan keagamaan daerah melalui silaturahmi dengan tokoh tokoh keagamaan daerah dan prasarana keagamaan daerah.
36. Pemantapan internalisasi dan pengamanan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.
37. Pemantapan proses perijinan melalui unit layanan satu pintu.
38. Peningkatan konsolidasi berkesinambungan terhadap kelembagaan bencana daerah melalui penguatan SDM dan sarana prasarana pendukungannya.
39. Pembaharuan dalam sistem administrasi keuangan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta administrasi kepegawaian daerah guna memperkuat upaya reformasi birokrasi daerah.
40. Peningkatan operasionalisasi pelayanan prima pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
41. Meningkatkan koordinasi antar institusi.
42. Pemantapan konsolidasi aparat daerah dalam penegakkan peraturan daerah melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarananya serta kerjasama dengan aparaturnegak hukum lainnya.
43. Pemantapan ketahanan mental ideologi Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan.

4.2.2. RPJMD Ke-2 (2009-2013)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap RPJMD ke-1, maka RPJMD ke-2 diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan upaya mewujudkan masyarakat daerah yang sejahtera dan berkeadilan dalam suasana perikehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat yang demokratis dengan disertai perilaku yang makin berakhlakul karimah sesuai keimanan terhadap Allah Yang Maha Kuasa dengan terus memupuk toleransi antar umat beragama dalam melaksanakan peribadatan dan kepercayaannya.

Masyarakat sejahtera yang akan diletakkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang makin menguasai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, terutama yang langsung bisa diterapkan untuk pengembangan kualitas lingkungan sosial serta memiliki kesiapan berdaya saing dalam situasi persaingan global yang makin kencang.

Peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang tercapai makin ditunjukkan dari (1) meningkatnya pendapatan per kapita, (2) menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial di daerah, (3) meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap, 4) meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, (5) meningkatnya peran keluarga secara optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak, (6) terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, (7) menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan daerah perdesaan dan perkotaan. serta dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di perdesaan disertai dengan kemapanan penerapan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal yang menyertai peningkatan kesejahteraan yang makin beradab di daerah.

Daya saing perekonomian daerah akan terus meningkat melalui penguatan industri manufaktur yang tetap berbasis pada pendayagunaan sumber daya agribisnis dan potensi wisata daerah secara terpadu dan berorientasi pengelolaan ekonomi kreatif serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan (1) lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha, (2) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kecakapan hidup yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, serta 3) penataan kelembagaan ekonomi daerah yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika. peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan. serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui (1) penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat, (2) terpeliharanya kekayaan hayati daerah yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah dan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang, (3) mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di daerah. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penegakan peraturan untuk pengendalian pemanfaatan ruang.

Bersamaan dengan itu, kehidupan masyarakat daerah yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan otonomi daerah, tugas pembantuan serta otonomi desa yang makin ditunjang oleh penguatan peran masyarakat sipil yang makin menghormati pengarusutamaan gender, partai politik dan kelembagaan legislasi daerah dalam kehidupan berpemerintahan di daerah. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum pada seluruh urusan pemerintah yang bersifat wajib. Kondisi ini ditopang oleh peningkatan akuntabilitas para penyelenggara pemerintahan daerah yang makin ditunjang oleh kelaikan remunerasinya serta penegakkan hukum untuk seluruh para penyelenggara negara dan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Demikian pula dalam kehidupan kemasyarakatan antar pemeluk umat beragama, makin berjalan dengan penuh kedewasaan, toleransi serta mengedepankan persatuan dan keutuhan selaku-bagian dari bangsa Indonesia yang makin disadari keberagamannya.

Dari tahapan dan prioritas pada RPJMD ke-2 ini, terdapat fokus yang menjadi panduan untuk dapat dituntaskan pada kurun perencanaan tahap ini yaitu:

1. Melanjutkan fokus pembangunan daerah pada RPJMD ke-1 yang dapat memperkuat capaian RPJMD ke-2.
2. Pengembangan pendidikan jalur non formal
3. Peningkatan perintisan penerapan wajar dikdas 12 tahun.
4. Peningkatan pemberian dukungan subsidi siswa berprestasi pada perguruan tinggi.
5. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi.
6. Pengembangan pendidikan kejuruan.
7. Pengembangan lembaga-lembaga Diklat/Balai Latihan Kerja.
8. Pengembangan jalur pendidikan non formal.
9. Pemantapan sumber daya kesehatan yang makin setara dalam layanan kesehatan daerah perkotaan dan perdesaan.
10. Pemantapan dalam perlindungan kesehatan ibu, remaja dan anak dalam lingkungan rumah tangga dan sosialnya.
11. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan perumahan dan pemukiman termasuk pengungsian, sanitasi dasar, dan sanitasi tempat-tempat umum, industri dan tempat-tempat lain yang dapat mempengaruhi kesehatan.
12. Peningkatan akses masyarakat ("poor and vulnerable"/miskin dan rentan terhadap penyakit) terhadap pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus, termasuk kedaruratan medik yang berkualitas.

13. Peningkatan surveilans (pengamatan) penyakit dan Kejadian Luar Biasa serta Bencana.
14. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan.
15. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan.
16. Pengembangan Tanaman Obat, Obat Tradisional dan Pengobatan Tradisional.
17. Pengembangan kearifan budaya daerah sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan masyarakat.
18. Pemeliharaan dan pemantapan penanaman nilai-nilai luhur dalam proses pendidikan pada setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk membangun masyarakat madani.
19. Peningkatan kualitas dan produktivitas sektor produksi unggulan termasuk pertanian.
20. Pengembangan potensi daerah sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional dan internasional.
21. Pengembangan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi ekonomi daerah.
22. Peningkatan advokasi dan sosialisasi untuk mengembangkan budaya daerah yang inovatif.
23. Pengembangan dan penyesuaian budaya baru hasil akulturasi untuk mengantisipasi perubahan zaman.
24. Penguatan usaha perekonomian mikro, kecil dan menengah di daerah.
25. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang berkualitas disertai perbaikan dalam distribusi pendapatan antar wilayah.
26. Pemantapan sinergisitas antara Industri Besar dengan Industri Kecil Menengah (IKM) sehingga tercipta penguatan masing-masing skala usaha
27. Pemantapan infrastruktur ekonomi dan sosial pada daerah yang dijadikan sentra pengembangan industri manufaktur dan perdagangan serta sektor jasa lainnya.
28. Penguatan dalam fasilitasi kelembagaan-kelembagaan keuangan yang menopang aktivitas usaha mikro dan kecil serta akses pelaku usaha terhadapnya.
29. Pemantapan dalam pengendalian tata ruang daerah yang makin sinergi dengan tata ruang regional.
30. Peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi serta perintisan pembangunan beureum benget dalam rangka menunjang pembangunan wilayah.
31. Penataan moda transportasi daerah untuk menopang pembangunan antar wilayah.
32. Peningkatan fasilitasi dalam penyediaan sarana energi tepat guna untuk pedesaan.
33. Penguatan dalam pengelolaan upaya-upaya pelestarian kekayaan plasma nutfah sumber daya hayati daerah.
34. Peningkatan perintisan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

35. Peningkatan fasilitasi keberdayaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial penopang kehidupan masyarakat madani di daerah.
36. Peningkatan kerjasama antar daerah.
37. Meningkatnya partisipasi dan kemitraan dunia usaha serta masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai.
38. Pemantapan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi dan drainase jalan serta jalur pejalan kaki (trotoar) dan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, irigasi, telekomunikasi, energi termasuk di dalamnya energi alternatif, dan sumberdaya air yang handal dan terintegrasi, efisien, efektif dan modern serta berkualitas yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
39. Pemantapan penanganan bencana alam antara lain longsor, banjir, kekeringan bahkan kebakaran.
40. Pemantapan penanganan jaringan air kotor/limbah dan persampahan.
41. Pemantapan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman termasuk penangananan utilitas umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan, berupa pengembangan rumah susun, meningkatkan jaringan air bersih, pengembangan jaringan air kotor/limbah rumah tangga, pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga dan peningkatan sanitasi lingkungan.
42. Penguatan pelayanan publik dengan berbasis SPM.
43. Melanjutkan ketersediaan rencana tata ruang kecamatan dan kawasan strategis kabupaten, provinsi dan nasional termasuk kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
44. Peningkatan penegasan batas daerah.
45. Pengembangan kemitraan sejajar antara legislatif dengan eksekutif.
46. Pemantapan reformasi, membangun jatidiri dan kreatifitas birokrasi daerah melalui penyempurnaan sistem remunerasi, sistem karier dan besaran jumlah pegawai.
47. Mempertahankan dan pemantapan ketahanan mental ideologi Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan, kegiatan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan.
48. Pemantapan dalam pewarisan nilai-nilai kejuangan bangsa.
49. Pemantapan konsolidasi dan dukungan fasilitasi pelaksanaan Pemilu 2009 dan 2014.

4.2.3. RPJMD KE-3 (2014-2018)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, maka RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam yang tetap mengandalkan potensi agrobisnis dan kepariwisataan daerah yang dikembangkan pada sumber daya air terbangun (bendungan Jatigede) dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terapan yang terus meningkat.

Sejalan dengan makin baiknya kelembagaan nilai-nilai demokrasi di daerah dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, tugas pembantuan dan otonomi desa. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dalam mendorong terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, yang makin menggunakan akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah guna mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat daerah yang makin berkeadilan dan berperadaban. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta kesetaraan gender dalam berbagai profesi dan kehidupan sosio politik daerah telah semakin mapan.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat menuju kemapanan sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita secara regional dan nasional dengan distribusi pendapatan terus merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial di daerah.

Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif, serta meningkatnya derajat kesehatan, status gizi masyarakat, kesejahteraan keluarga, perlindungan yang mapan untuk ibu anak dan tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS) dan penduduk tanpa pertumbuhan (PTP) yang makin merasakan kemanfaatan norma keluarga berencana yang sejahtera yang memperkuat penerapan akhlak dan norma-norma sosial dalam menangkal infiltrasi budaya negatif, baik timbul dari mass media elektronik maupun perilaku yang menyimpang, terutama di kalangan generasi muda.

Daya saing perekonomian daerah semakin menguat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, serta terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri yang tetap bertumpu pada pertanian luas, agrobisnis yang kompetitif, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan serta tumbuhnya sektor jasa yang terus menguat terutama pada jasa industri kepariwisataan. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek terapan yang makin maju sehingga mendorong perekonomian daerah yang efisien dan produktivitas yang tinggi. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin berkualitas dan berkesinambungan serta mendukung perencanaan ekonomi regional dan nasional guna pencapaian target pendapatan per kapita pada tahun 2025 yang setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh kabupaten, tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat penghuninya sehingga terwujud pusat-pusat permukiman yang sehat dan berbudaya yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, seluruh potensi daerah yang beragam terus dipelihara dan ditingkatkan kualitas pendayagunaannya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sekitarnya guna mempertahankan nilai tambah dan daya saing masyarakat daerah dalam memasuki tahapan pembangunan jangka panjang selanjutnya.

Dari tahapan dan prioritas pada RPJMD ke-4 ini, terdapat fokus yang menjadi panduan untuk dapat dituntaskan pada kurun perencanaan tahap ini yaitu:

1. Melanjutkan fokus pembangunan daerah pada RPJMD ke-3 yang dapat memperkuat capaian RPJMD ke-4.
2. Pengembangan sistem insentif daerah dalam penyelenggaraan kemitraan pembangunan di sektor swasta, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, jaringan energi tepat guna perdesaan serta jaringan transportasi ke lingkungan perdesaan.
3. Pengembangan tatanan sistem pemerintahan daerah yang menjadi supporting sistem bagi aktivitas ekonomi kreatif.
4. Peningkatan pelaksanaan implementasi falsafah Pancasila dalam perikehidupan sosial dan berpemerintahan dengan keseimbangan penerapan nilai-nilai keagamaan yang beraam dalam suasana penuh toleransi.

5. Pemantapan reformasi birokrasi yang menopang pelayanan berorientasi customer satisfaction.
6. Pengembangan tatanan sistem pemerintahan daerah yang menjadi supporting sistem bagi aktivitas kehidupan sosial masyarakat yang lebih dewasa dalam berinteraksi dengan pembangunan politik daerah.
7. Pemantapan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik guna penerapan kehidupan sosio politik masyarakat daerah yang telah matang dalam melaksanakan norma-norma konstitusi negara dan Pancasila.
8. Penataan penyesuaian kewenangan dalam wilayah kecamatan.
9. Meningkatkan proteksi terhadap potensi, gangguan terhadap masyarakat.
10. Meningkatkan kemandirian desa.
11. Pemantapan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi dan drainase jalan serta jalur pejalan kaki (trotoar) dan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, irigasi, telekomunikasi, energi termasuk di dalamnya energi alternatif, dan sumberdaya air yang handal dan terintegrasi, efisien, efektif dan modern serta berkualitas yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Peningkatan penanganan bencana alam antara lain longsor, banjir, kekeringan bahkan kebakaran.
13. Pemantapan penanganan jaringan air kotor/limbah dan persampahan.
14. Pemantapan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman termasuk penangananan utilitas umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan, berupa pengembangan rumah susun, meningkatkan jaringan air bersih, pengembangan jaringan air kotor/limbah rumah tangga, pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga dan peningkatan sanitasi lingkungan.
15. Pemantapan rencana tata ruang kecamatan dan kawasan strategis kabupaten, provinsi dan nasional termasuk kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
16. Pemantapan penyiapan data dan analisis potensi daerah untuk penyusunan RPJPD tahun 2025-2050.
17. Pemantapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sebagai sumber informasi perencanaan pembangunan yang akurat.

18. Pemeliharaan dan pemantapan ketahanan mental ideologi Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan, kegiatan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan.
19. Pemantapan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi unggulan termasuk pertanian.
20. Pengembangan potensi daerah sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional dan internasional.
21. Pemantapan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi ekonomi daerah.
22. Pemantapan realisasi rencana pembangunan strategis seperti jalan tol Cisumdawu dan waduk Jatigede.
23. Pemantapan partisipasi dan kemitraan dunia usaha serta masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005–2025 mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, arah dan tahapan prioritas pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat koordinatif, integratif dan sinergis serta berkesinambungan. Juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta sebagai acuan dalam penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Untuk itu, keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi **Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis dan Demokratis disingkat Sumedang Sehati** perlu didukung oleh (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis, (2) Konsistensi antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, (3) Konsistensi untuk membangun kemitraan antara domain pemerintahan daerah, yang menempatkan potensi para penyelenggara pemerintahan daerah seiring dan seia sekata dalam bingkai otonomi daerah, (4) Keberpihakan para penyelenggara pemerintahan yang senantiasa berorientasi pada amanah kerakyatan dalam mengemban tugas-tugas kedinasan dan pengabdianya, (5) Semuanya itu, tidak terlepas dari berbagai kemampuan dan keterbatasan serta kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.